



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 6 (Enam)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Pertanian RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 2 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.25 WIB s.d 16.11 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDI P)
Acara : Membahas:
1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023; dan
2. Isu-isu aktual lainnya.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI:
41 dari 52 orang Anggota dengan rincian :
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10 dari 11 orang Anggota
1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
3) H. Sunarna, S.E., M.Hum - Virtual
4) Ir. Mindo Sianipar - Virtual
5) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
6) Drs. I Made Urip, M.Si. - Virtual
7) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
8) Vita Ervina, S.E., M.B.A. - Virtual
9) Maria Lestari, S.Pd.
10) Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. - Virtual
2. Fraksi Partai Golongan Karya
7 dari 7 orang Anggota
1) H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

- 2) H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M. - Virtual
 - 3) Firman Soebayo, S.E., M.H. - Virtual
 - 4) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S. - Virtual
 - 5) Ir. Panggah Susanto, M.M.
 - 6) Alien Mus
 - 7) Teti Rohatiningsih, S.Sos. - Virtual
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
5 dari 7 orang Anggota
 - 1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 - 3) Ir. H. T. A. Khalid, M.M. - Virtual
 - 4) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
 - 5) Dr. Azikin Solthan, M.Si.
 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
5 dari 6 orang Anggota
 - 1) H. Sulaeman L. Hamzah
 - 2) Ir. Abdullah Tuasikal - Virtual
 - 3) Julie Sutrisno
 - 4) Yessy Melania, S.E.
 - 5) Ir. Hj. Sri Kustina - Virtual
 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
5 dari 6 orang Anggota
 - 1) Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) H. Muhtarom, S.Sos.
 - 3) Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A. - Virtual
 - 4) Daniel Johan, S.E.
 - 5) Edward Tanur, S.H.
 6. Fraksi Partai Demokrat
3 dari 5 orang Anggota
 - 1) DR. Suhardi Duka, M.M.
 - 2) Muhammad Dhevy Bijak Pawindu
 - 3) Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
2 dari 5 orang Anggota
 - 1) drh. H. Slamet
 - 2) Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 8. Fraksi Partai Amanat Nasional
3 dari 3 orang Anggota
 - 1) H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
 - 2) Haerudin, S.Ag., M.H.
 - 3) Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E. - Virtual
 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
1 dari 2 orang Anggota

1) Ema Umiyyatul Chusnah - Virtual

B. Pemerintah

1. Menteri Pertanian RI (Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H);
2. Sekretaris Jenderal (Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc);
3. Inspektur Jenderal (Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H.);
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dr. Ir. Suwandi, M.Si.);
5. Direktur Jenderal Hortikultura (Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.);
6. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perkebunan (Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D;
7. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.)
8. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Prof. (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr.)
9. Kepala Badan Karantina Pertanian (Ir. Bambang, M.M.);
10. Bagya Mulyanto (Direktur Keuangan Perum BULOG);
11. Direktur Bisnis Perum BULOG (Febby Novita);
12. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD (Frans Marganda Tambunan); dan
13. Kuasa Direktur Utama/Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), (Nugroho Christijanto).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Yang terhormat Menteri Pertanian beserta jajarannya,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Bulog, dalam hal ini ada surat kuasa dari Dirut Bulog kepada Pak Saifullah karena Pak, eh *sorry sorry* ya. Bulog tidak dapat hadir tetapi diwakili oleh direksi yang lain,
Kemudian Pupuk Indonesia memberikan kuasa kepada Pak Nugroho,
Kemudian Pusri memberikan kuasa dari Wahyu kepada Pak Saifullah,
Yang terhormat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia atau Holding Pangan ID Food, serta
Hadirin kami hormati.

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat mengadakan rapat kerja dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021/2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Pengganti Bamus tanggal 28 Maret 2022 dan keputusan Rapat Internal tanggal 18 Mei 2022 pada hari ini, Kamis, tanggal 2 Juni, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dalam rangka membahas: yang pertama, RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023, dan isu-isu aktual lainnya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan tentang Tata Tertib, rapat kerja ini kami nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.25 WIB)

Rapat kerja hari ini kita mulai pada pukul 10.25 WIB dan akan dihadiri, akan diakhiri pada pukul 14.25 WIB, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) Peraturan tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama, sebagai susunan berikut:

1. Pengantar ketua rapat;
2. Penjelasan Menteri Pertanian;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri Pertanian;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah dapat disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas Komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan tentang Tata Tertib, antara lain mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang meliputi kerja pemerintah (RKP) dan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga RKA K/L dalam ruang lingkup tugas Komisi dan usulan. Saya tegaskan lagi, dan usulan anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan pemerintah. Selanjutnya hasil pembahasan akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.

Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan rapat kerja hari ini adalah sesuai dengan surat Badan Anggaran Nomor B7379/AG.01.01/4/2022 tanggal 5 April 2022 mengenai Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2023 dan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2023 sebagai acuan dalam rangka pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan RKP Tahun 2023 antara komisi dengan mitra kerjanya.

Dalam dua tahun terakhir pandemi Covid-19 menjadi tantangan utama yang berdampak signifikan bagi dunia. Salah satu dampaknya adalah perekonomian domestik dari sisi produksi yang turut mengalami dinamika. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kita ketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir sektor pertanian tumbuh relatif stabil dengan pertumbuhan rata-rata 3,8%. Bahkan, dalam masa pandemi tahun 2020 secara nasional sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dan tumbuh positif sebesar 1,8% serta menyerap tenaga kerja kurang lebih 38 juta orang. Tidak berlebihan jika sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi nasional di masa transisi dari pandemi menjadi endemi Covid-19 pada saat ini. Saudara Menteri Pertanian beserta jajarannya harus mampu menerjemahkan hal tersebut menjadi suatu rumusan kebijakan pertanian yang tepat sasaran di tengah tren anggaran yang sejak tahun terus menerus setiap tahunnya.

Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 18 April 2022, pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun anggaran ditetapkan, tahap pertanian tahun anggaran 2023 ditetapkan 13,72 triliun. Komisi IV meminta Kementerian Pertanian agar rencana kegiatan program disusun secara cermat dengan *output* yang jelas dan mampu menjawab tantangan pembangunan di jangka menengah maupun jangka panjang. Beberapa tantangan yang harus diperhatikan diantaranya ekspor berbasis komoditas yang dinilai tidak *sustainable* karena rentan terhadap gejolak harga internasional, serta permasalahan perubahan iklim dan kenaikan suhu dunia yang berdampak pada ketersediaan pangan dalam negeri.

Berbagai studi menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan berpotensi menjadi salah satu negara paling terdampak. Beberapa risiko yang harus menjadi kekhawatiran kita bersama, yang pertama, nomor 1. Risiko kelangkaan air yang diiringi dengan meningkatnya risiko banjir dan kekeringan yang parah; 2. Kerusakan ekosistem lahan; 3. Risiko kelangkaan pangan, belum lagi risiko muncul berbagai hama dan penyakit baik pada tanaman maupun hewan ternak. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian dalam menyusun kebijakan APBN 2023 harus memperhatikan aspek perubahan iklim tersebut dan lebih berpihak pada pelaku usaha pertanian nasional terutama petani kecil.

Selain itu, kegiatan utama dan strategis yang dirancang harus terukur bersifat massal serta dapat dilaksanakan oleh petani. Hindari kegiatan sebatas wacana, saya tegaskan sebatas wacana dengan menampilkan seolah-olah "produksi sekian, kedelai sekian, jagung sekian." Nyatanya kedelai kita masih impor cukup besar. Bagaimana Presiden tidak marah, disubsidi pupuk sekian triliun pun masih juga impor besar-besaran. Hindari kegiatan hanya sebatas wacana seperti kegiatan penanam padi dan konsep IP-400. Ini IP-400 ini saya bilang pejabatnya pembohong, saya tegaskan pejabatnya pembohong. Dari periode lalu pun itu IP-400 ini sudah diumumkan oleh Wandu ini. Saya enggak

tahu Wandi ini siapa gurunya karena kegiatan tersebut tidak didukung dengan data dan kesediaan lahan yang memadai. Kalau IP-400 itu hanya demplot 1 hektar mungkin. Kita bukan bicara demplot tapi pertanian, pertanian itu keseluruhan.

Selain itu, program swasembada daging harus jelas konsep, target dan rumusan strateginya, apalagi di tengah wabah PMK saat ini. Tentu saja program disusun harus dilihat kegiatannya dengan dukungan anggaran tahun 2023. Hal ini termasuk strategi Badan Karantina untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan maupun tumbuhan yang berpotensi menurunkan produksi. Adapun untuk kegiatan peningkatan daya saing dan nilai tambah agar difokuskan kepada beberapa komoditas yang saat ini memiliki potensi di pasar internasional, antara lain karet alam dimana harga karet tersebut sudah beberapa tahun hancur dan sekarang *Alhamdulillah* harganya sudah bagus di pasar internasional.

Pada rapat hari ini juga Komisi IV menyoroti adanya penambahan *Automatic Adjustment* belanja Kementerian Pertanian tahun anggaran sebesar, tahun anggaran 2022 sebesar 490 miliar atau hampir setengah triliun.

Terkait hal tersebut di atas, Komisi IV meminta agar hal tersebut tidak mempengaruhi kegiatan yang bertujuan meningkatkan produksi dalam rangka kesediaan pangan nasional, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan petani yang bersifat bantuan kepada masyarakat.

Demikian pengantar kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Menteri Pertanian untuk menyampaikan rencana kerja hari ini. Saya persilakan.

MENTERI PERTANIAN RI:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang sangat kami hormati muliakan,
Pejabat-pejabat dan hadirin sekalian yang sangat saya muliakan dan hormati,

Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah.

Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja dalam keadaan sehat walafiat.

Mengawali Rapat Kerja pada hari ini perkenankan saya beserta segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan rapat kerja hari ini dengan agenda pembahasan yang pertama RKA K/L dan RKP K/L tahun anggaran 2022-2023 dan isu-isu aktual.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati,

Sebagai agenda pertama, izinkan kami melaporkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023. Seperti telah kita ketahui bersama, menyongsong tahun 2023, pemerintah telah menetapkan sasaran pembangunan nasional utamanya dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi perekonomian Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 ditargetkan pada kisaran 5,3 sampai 5,9, khususnya untuk sektor pertanian pada tahun 2023, pertumbuhan ditargetkan sebesar 4,02 4,0 dan 4,2.

Pertumbuhan pada sektor pertanian selain bertumpu pada berbagai program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan sebagai kelanjutan program atau kegiatan tahun 2022, pemerintah juga akan fokus pada kebijakan peningkatan kapasitas produksi melalui pengembangan *Food Estate* berkelanjutan dan Program Gratiexs Pertanian dalam rangka meningkatkan investasi dan ekspor produk pertanian. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut indikator pertumbuhan ekonomi maka telah ditetapkan rencana kerja pemerintah atau RKP dengan tema meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 arah kebijakan. Beberapa diantaranya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian diantaranya berkontribusi pada kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pembangunan rendah karbon dan lain-lainnya yang dibutuhkan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Dalam rangka menjabarkan tema RKP 2023 dan arah kebijakan pembangunan nasional tersebut, Kementerian Pertanian menyusun Rencana Anggaran Tahun 2023 yang dituangkan dalam 4 program, yaitu:

1. Program ketersediaan dan akses dan konsumsi pangan berkualitas;
2. Program nilai tambah dan daya saing industri; dan
3. Program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
4. Program dukungan manajemen.

Pada 2023 Kementerian Pertanian tidak lagi melaksanakan program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi karena berpindah fungsi Litbangjirap ke BRIN. Penetapan 4 program Kementerian Pertanian tersebut tetap berpedoman pada mandat yang diberikan kepada Menteri Pertanian dalam mendukung Prioritas Nasional 1 (PN-1), yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Untuk itu, Kementerian Pertanian akan melaksanakan Program Prioritas 3, yaitu peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan dan Program Prioritas 6, yaitu meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi sektor riil dan industrialisasi.

Dalam rangka mengimplementasikan rencana kerja program pada tahun 2023, Kementerian Pertanian tetap fokus untuk menyediakan pangan utamanya bagi 273 juta penduduk Indonesia, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi pertanian yang berorientasi ekspor. Untuk mewujudkan upaya tersebut telah dirancang kegiatan utama yang meliputi:

1. Menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas pertanian prioritas;
2. Penyediaan benih dan bibit;
3. Pengembangan diversifikasi pangan lokal; dan
4. Penguatan rantai pasok dan logistik pangan;
5. Penguatan *Food Estate* dan korporasi petani; dan
6. Pengembangan *Smart Farming* dan digitalisasi pertanian; dan
7. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor pertanian.

Untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan utama 2023, maka tumpuan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Direktorat Jenderal teknis yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Direktorat Jenderal lainnya, yaitu Dirjen PSP, BPPSDMP, Badan Karantina Pertanian, Itjen dan Sekjen yang menjadi pendukung kegiatan utama. Guna mewujudkan target peningkatan produksi dan daya saing pada tahun 2023, Kementerian Pertanian menetapkan target produksi komoditi utama, yaitu: untuk padi sebesar 55,39 juta ton, jagung 23,21 juta ton, kedelai 0,55 juta ton, bawang merah 1,71 juta ton, cabai 2,93 juta ton, tebu 37,15 juta ton atau setara Gula Kristal Putih atau GKP 2,6 juta ton, dan daging sapi atau kerbau 0,46 juta ton.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian 2023, sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Nomor S-353/MK.02/2022 dan Nomor B-301/M.PPN/d.8/PP/0402/04 Tahun 2022, Kementerian Pertanian mendapat pagu indikatif Rp13,73 triliun dengan rincian sebagai berikut:

- Sekretaris Jenderal Rp1,56 triliun;
- Inspektorat Jenderal Rp137,61 miliar;
- Yang ketiga Dirjen Tanaman Pangan Rp2,51 triliun;
- Yang keempat Dirjen Hortikultura Rp1,03 triliun;
- Dirjen Perkebunan, Rp1,14 triliun;
- Yang keenam, Dirjen PKH Rp1,64 triliun;
- Yang ketujuh, Dirjen PSP Rp2,70 triliun; dan
- Kedelapan, Badan Litbang Pertanian Rp903,81 miliar; dan
- Kesembilan, Badan PPSDM Pertanian Rp899,04 miliar;
- Yang kesepuluh, Badan Ketahanan Pangan dan Badan Pangan Nasional Rp10 103,52 miliar; dan
- Sebelas, Badan Karantina Pertanian Rp1,09 triliun.

Sebagai catatan bahwa anggaran pada Badan Ketahanan Pangan merupakan anggaran transformasi menjadi pangan nasional yang dia akan dialihkan pada proses penetapan pagu anggaran tahun anggaran 2023. Sedangkan anggaran pada Badan Litbang Pertanian akan dijadikan pada lembaga baru di Kementerian Pertanian yang saat ini dalam proses penyelesaian struktur organisasi.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati,

Sebagian dari berikutnya terkait isu aktual kami ingin melaporkan kegiatan antisipasi menghadapi fenomena perubahan iklim yang masih mempengaruhi pertanian di Indonesia sampai akhir 2022. Berdasarkan laporan BMKG terbaru, sebanyak 24,56% wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau. Wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi: Aceh bagian utara dan timur, pesisir utara Banten, pesisir utara Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian besar NTB, dan sebagian besar NTT, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat Bagian Timur, Sulawesi Tengah Bagian Barat, Sulawesi Utara Bagian Selatan dan Papua Barat Bagian Utara.

Untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim hingga akhir tahun dan mengamankan produksi pangan kita, maka Kementerian Pertanian telah mempersiapkan kegiatan adaptif, adaptasi, dan mitigasi. Kegiatan adaptasi meliputi:

1. Pengembangan sumber air alternatif atau embung dan parit dan lain-lain;
2. Pengembangan irigasi hemat air;
3. Pemanfaatan asuransi;
4. Perbanyak bibit secara masif terutama varietas toleran kekeringan dan banjir;
5. Pengembangan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPO); dan
6. Diversifikasi pangan lokal.

Secara bersamaan yang juga telah disiapkan kegiatan mitigasinya yang terdiri dari:

1. Pengembangan kawasan perkebunan dalam rangka mengurangi pemanasan global;
2. Rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman pohon buah-buahan dan tanaman perkebunan;
3. Mengurangi *Food Losses*; dan
4. Melaksanakan bimbingan teknis atau Bimtek adaptasi dan mitigasi.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rapat kerja pada hari ini. Apa bisa yang diperlukan penjelasan lebih rinci, saya mohon perkenankan Pimpinan agar Pejabat Eselon I yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan memberi penjelasan tambahan. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Kami mohon arahan dan bimbingan seperti apa yang harus kita lakukan.

Atas segala perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Sekian.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Saudara Menteri atas penjelasannya.

Sebelum saya melanjutkan ke teman-teman, ini ada surat resmi dari Gubernur Jawa Timur. Besarin sedikit, terus naikin ke atas, terus, terus, terus, terus sampai keputusan. Ya.

Memutuskan: 1. Menetapkan: Kesatu: Status keadaan darurat bencana wabah penyakit mulut dan kuku pada seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Ini baru satu provinsi. Yang kedua, status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur dengan tidak ditemukan lagi penyakit mulut dan kuku atau tidak menjadi masalah kesehatan ternak pada wilayah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Adapun MUI dan NU sudah menetapkan hewan yang kena penyakit PMK tidak boleh untuk kurban.

Saya juga bingung ini Pak Menteri enggak tahu yang bikin yang bikin ini ini *copy paste* atau apa ini. Entah kalau Karonya enggak benar atau Sekjennya enggak benar ya. Saya bacakan, anggaran tahun 2021 ya produksi padi ditargetkan 55 juta ton. Itu anggarannya 16,3 triliun, 2022 turun menjadi 14,66, kemudian ada *Automatic Adjustment*. Anggaran turun, produksi meningkat jadi 57,5 juta ton untuk padi. Kemudian 2023 anggaran turun lagi jadi 13,7 masih produksi padi sebanyak 57,5 ton. Juga jagung tahun 2021 : 23 juta ton, tahun 2022 menjadi 26 juta ton. Jadi anggarannya turun, produksinya naik. Kalau begitu nanti kita buat saja kesimpulan rapat minta kepada Kementerian Keuangan, Bappenas supaya jangan 13,6, kalau perlu 10 triliun saya rasa nanti akan meningkat lagi produksinya. Juga daging kita lihat ini, kalau saya yakin ini semua *copy paste*. Naikin saja sekian persen naikin saja, sama juga dengan e-RDCK. Alih fungsi mungkin satu tahun bisa 100 ribu hektar tetapi permintaan buktinya selalu naik, ini selalu naik.

Nah, target 2023 produksi padi 57,5 jagung menjadi 26 juta ton. Saya bingung dari 16,3 menjadi 13,7, berarti 3 triliun produksinya naik. Naiknya enggak tanggung-tanggung lagi ya. Kemudian daging, saya yakin enggak cukup ini untuk Idul Kurban nanti. Idul Kurban kalau enggak salah bulan depan ya toh. Saya juga minta penjelasan dari Dirjen PKH sebelum teman-teman bertanya, apa hasil kunjungan ke Brazil kemarin. Coba silakan karena yang mengerti teknis adalah Anda.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV yang terhormat.

Izin menyampaikan bahwa fokus utama kemarin pembicaraan kita dengan pemerintah atau Kementerian Pertanian Brazil adalah ingin meminta kerja sama terkait dengan pengalaman penanggulangan PMK selama 50 tahun di sana dan sistem yang digunakan dalam penanggulangan dan pencegahan PMK, sehingga pada saat ini Brazil sudah bisa melakukan pembebasan *by zona* tanpa vaksinasi dan vaksinasi. Itu yang inti utama Pak Ketua, kami ke sana untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Pertanian Brazil.

KETUA RAPAT:

Hasilnya itu belajar sama orang yang enggak punya kemampuan. Brazil itu secara *country* kita tidak bisa *by zona* secara *country* ya itu masih PMK. Kenapa enggak belajar ke Australia yang lebih dekat yang sudah bebas PMK, iya kan. Sekarang mau impor vaksinnya dari mana?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Dari Prancis, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Dari Prancis.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Iya.

KETUA RAPAT:

Beli berapa juta?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Outstanding kita 3 juta, Pak.

KETUA RAPAT:

Outstanding uangnya dari mana 100 miliar lebih duitnya?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Untuk sementara kami menyediakan uang untuk satu juta yang ada di APBN kita dan..

KETUA RAPAT:

Di mana APBNP?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

APBN Pak, yang ada sekarang dengan apa namanya revisi yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada kita menyiapkan untuk satu juta.

KETUA RAPAT:

Setahu saya Perancis belum ada *deal* sama *you*, asal *you* jujur.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Bagaimana, Pak?

KETUA RAPAT:

Perancis belum ada *deal* sama *you*, *you* jangan bohongi saya. Saya barusan mengecek Perancis belum ada *deal* pembelian 3 juta vaksin ya.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Maaf Pak.

KETUA RAPAT:

Enggak jujur saja enggak, begini loh maksudnya kalau memang ini tidak bisa di Perancis, di Malaysia ada enggak vaksinya? Ada. Di Vietnam ada enggak? Ada. Di Australia, Australia siap membantu begitu loh maksud saya. Jangan Anda bilang 3 juta beli di Perancis, Perancis belum jual kok. Ini mantan, mantan Pimpinan OAE akan ketemu saya. Saya bilang nanti minggu depan setelah saya kembali dari Lampung. Ingin menjelaskan membantu Pemerintah Republik Indonesia bagaimana solusi jalan keluarnya. Saya pikir Anda ke sana kemarin mau cari vaksin. Kan saya bilang kalau memang anggarannya enggak ada mumpung lagi Raker, *refocusing*. Kalau Anda beli 3 juta kalau yang, yang populasinya 18 juta, coba berapa hitung deh, hitung berapa coba, jauh dari kecukupan.

Hari ini pun yang namanya Satgas, biasa namanya ya Satgas. Di foto saya ini saya sudah jelas Anda kalah dengan Biofarma, Biofarma sudah berangkat ke Brazil sebelum Anda ke Brazil, dia sudah berangkat duluan. Jangan sampai ini jadi, jadi komersial ini vaksin PMK ini, saya enggak mau kasihan. Kasihan rakyat kita sudah hidupnya susah masa harus dibuat susah lagi. Anda kalah bos, Anda mau saya tampilkan fotonya, dijemput dengan pesawat pribadi di Brazil. Kalah Anda bos. Mau kita jujur Pak, duitnya enggak ada Pak, bagaimana Pak kita bahas hari ini, kita realokasi, saya setuju kalau untuk kepentingan rakyat kan begitu saja. Jangan Anda bilang *deal* 3 juta baru mau beli satu juta, satu juta cukup apa bos se-Jawa saja se-Jawa Barat Timur

saja enggak cukup vaksin. Sudahlah kita bilang bencana nasional, lapor ke Presiden, lapor Bappenas, lapor Menteri Keuangan bagaimana yang sudah kena kita musnahkan. Setiap hari kena, bertambah. Yang namanya sapi perah itu sudah anjlok produksinya hampir 50%, kebayang enggak oleh kita. Masa saya setiap hari saya harus tegur keras bicara keras kan enggak perlulah, yang saya inginkan adalah ayo kita sama-sama. Sama-sama bagaimana sih solusinya. Oh ini saya butuh duit kurang lebih 120 miliar karena kemarin saya cek harganya saya, jadi jangan dianggap saya enggak mengerti apa-apa enggak, saya mengecek harganya satu vaksin berapa Euro sih, itu saja.

Saya persilakan, fraksi yang ingin bertanya.

INTERUPSI F-P. (.....) :

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu Pak, ini fraksi dulu Pak.

F- P. (.....) :

Ya, ini fraksi.

KETUA RAPAT:

Ini Gerindra dulu nomor satu.

Ya, Pak Azikin Solthan silakan.

F-P.GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Salam Indonesia Raya.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV, serta Menteri Pertanian beserta seluruh jajarannya yang sama kami hormati.

Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan dan pertanyaan sebagai berikut:

Yang pertama, kami meminta penjelasan dari Bapak Menteri Pertanian terkait kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan bagaimana keseriusan Kementan melakukan kegiatan ini, berapa target menurunnya emisinya, bagaimana sistem monitoring dan pelaporannya, sehingga kegiatan yang dilakukan bisa terukur dan tercatat sebagaimana

penurunan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada komitmen global Indonesia pada target pencapaian penurunan emisi.

Kedua, berdasarkan bahan rapat pada tanggal 22 bulan 5 tahun 2022 dipaparkan rancangan pagu indikatif per Eselon I Kementerian Pertanian. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pinjaman luar negeri, dimana pada sumber dana pinjaman luar negeri menunjukkan jumlah yang terbilang besar yakni sebesar Rp261.294.750.000,-. Dari semua Eselon I berdasarkan hal tersebut mengapa Kementerian Pertanian masih menggunakan dana pinjaman luar negeri yang terbilang besar mengingat pada laporan singkat rapat kerja pada tanggal 11 bulan 4/2022, Kementerian Pertanian menyetujui adanya penyelesaian penambahan pagu pinjaman hibah, pagu pinjaman hibah luar negeri sebesar Rp209.520.786.000,-. Apakah ada kemungkinan sumber dana BLN akan bertambah di tahun 2023? Bagaimana upaya Kementerian Pertanian untuk mengurangi hal tersebut?

Ketiga, Fraksi Gerindra mendukung usulan peningkatan anggaran Kementerian Pertanian yang turun dalam lima tahun terakhir sementara Kementerian Pertanian menyelesaikan berbagai permasalahan pertanian seperti ketersediaan budi pangan nasional, dukungan pakan berkualitas, penyediaan pupuk organik, pemilihan kesehatan tanah, pemulihan kesehatan tanah, antisipasi dan mitigasi iklim, mendukung pertanian, mendukung Alsintan pra dan pasca panen bagi petani, antisipasi jangka panen dan sebagainya.

Empat, bagaimana program kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat anggaran peningkatan produksi pakan ternak sebesar 111,2 miliar bersumber dari surat berharga syariah negara yang dialokasikan ke UPT Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan terkait alokasi pemanfaatan anggaran dan seperti apa rencana pengembangan UPT tersebut? Jenis pakan apa yang dikembangkan?

Lima, Program Pekarangan Pangan Lestari yang kini dikelola Direktorat Jenderal Hortikultura agar dapat dilaksanakan di tahun anggaran 2023 mengingat program ini amat diminati oleh banyak kelompok tani dalam memberikan pangan bergizi berbasis pekarangan dan meningkatkan ekonomi keluarga petani.

Tujuh dan yang terakhir, terkait dengan program pengembangan kawasan intensifikasi bawang merah dan bawang putih untuk Kalimantan Timur mengalami kesulitan. Petani tidak dapat menanam bawang disebabkan akses pemasaran yang sulit pada tahun 2022. Provinsi Kalimantan Timur masih belum bisa merealisasikan program ini, kami meminta program ini diganti dengan pengembangan kawasan obat.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Menteri Pertanian beserta seluruh jajarannya.

Demikian usulan dan masukan yang kami sampaikan dari Fraksi Partai Gerindra.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Billahi fi sabililhaq
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih pada juru bicara dari Fraksi Gerindra yang sudah membacakan secara lengkap, tidak ada titik dan koma yang dikurangi atau ditambah, itu paling penting.

Dan selanjutnya dari Fraksi Nasional Demokrat. Ibu Yessy, dipersilakan.

F-P. NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Baik.

Terima kasih.

Pimpinan,
Pak Menteri, beserta Eselon I yang hari ini hadir yang saya hormati,
Bapak/Ibu semua rekan-rekan Anggota Komisi IV.

Saya mewakili dari Fraksi Nasdem ingin memberikan masukan, saran, dan beberapa mungkin pertanyaan kepada Kementerian Pertanian. Yang pertama, mungkin kita mulai dari berbicara persoalan dan kompleksitas sektor pertanian di Indonesia memang tidak bisa lepas dari banyak variabel dan indikator. Beberapa diantaranya terkait payung hukum atau regulasi untuk petani itu sendiri, yang kedua mungkin ya dukungan saprodi dari pemerintah yang sifatnya hanya stimulan, kemudian yang ketiga saya pikir sumber daya manusianya termasuk si petaninya dan garda terdepan sebagai teman sebagai sahabat para petani ini di lapangan salah satunya penyuluh.

Berkaitan dengan ini kami, Fraksi Nasdem mendorong Kementerian Pertanian ini dalam rangka diterbitkannya Perpres 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian. Jadi kami mendorong Kementan untuk menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan semangat cita-cita dari Pak Presiden ini kedalam kebijakan-kebijakan atau program yang tepat sasaran dan kita tahu bahwa keberpihakannya kepada petani dan masyarakat Indonesia secara umum. Karena kalau bicara penyuluh ya kita tahu selama ini yang dihadapi penyuluh di lapangan ini seperti apa, keterbatasan baik jumlah penyuluhnya maupun tanda kutip "kehadiran negara" bagi mereka ya dukungan operasional dan lain sebagainya bagi penyuluh sebagai temannya para petani di lapangan.

Kemudian kami juga mengapresiasi Partai Nasdem yang terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional

terutama di tengah pandemi yang saat ini berubah mungkin statusnya sudah menjadi endemi. Nah, kehadiran sektor pertanian ini luar biasa, memberikan kontribusi positif dan menjadi salah satu sektor yang diminati sebagai sektor ya tanda kutip “pelarian” dari sektor-sektor lain yang tidak mampu untuk *survive*.

Kemudian yang berikutnya, Fraksi Partai Nasdem juga mendorong dan terus mengingatkan kepada Kementan untuk ada regenerasi atau kaderisasi pertanian. Ini memang didengar sekilas adalah hal yang tidak terlalu *Urgent* tetapi di lapangan ketika kita turun ke masyarakat, bahkan penyuluh juga menyampaikan hal yang sama, *Mindset* dari petani-petani yang sudah senior mungkin secara usia ya saya tidak mengatakan pengalaman dan lain sebagainya tetapi kemampuan SDM-nya itu mereka belum merasa bertani ketika belum menggunakan pestisida kimia misalnya, belum menggunakan pupuk-pupuk kimia. Nah, ini yang harus kita ubah mungkin dengan adanya kaderisasi atau regenerasi petani-petani milenial ke depannya, karena diharapkan yang bisa serius mengambil peran dan tanggung untuk kemajuan sektor pertanian teknologinya itu petani-petani muda dan kami, Fraksi Nasdem terus mendukung ini penguatan untuk petani milenial seperti yang pernah magang di Jepang, KUB dan lain sebagainya itu sangat sangat sangat punya pengaruh yang luar biasa walaupun ini sekali lagi sifatnya hanya stimulus. Tidak mungkin pemerintah mampu meng-*cover* semua permintaan petani-petani kita.

Kemudian yang terakhir, Fraksi Nasdem juga menyoroti pagu indikatif yang turun dari tahun ini di 2022 kurang lebih 1 triliun. Nah, mungkin bisa disampaikan ini apa penyebabnya. Kemudian kita juga mendorong sekiranya ini bisa ditambah karena mengingat sektor pertanian terutama sektor peternakan kita saat ini sedang banyak wabah. ASF belum selesai, ada hama belalang dan lain sebagainya, timbul lagi PMK. Jadi ini saya pikir perlu penguatan bukan cuma regulasi tapi anggaran untuk bisa Kementan dan para petani kita selesai dan ada upaya serius untuk mengantisipasi dari PMK ini terutama dan wabah ASF tapi pada intinya Fraksi Nasdem mendukung penuh kebijakan di 2023 terkait anggaran dan lain sebagainya, program-program kepada Dapil maupun peta wilayah yang potensial produktivitasnya sudah jelas dan sudah diketahui secara nasional.

Itu saja Pak Ketua dan Pak Menteri.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih Mbak Yessy.

Dan bidang pertanian itu adalah bidang yang masuk dalam tujuh keajaiban dunia. Apa itu ajaibnya, meski anggarannya terus mengalami pemotongan tapi produktivitas terus meningkat, artinya anggaran yang dibuat memang tidak punya pengaruh terhadap produksi. Nah, ini yang harus menjadi catatan kita. Ini menarik banget pertanian ini jadi anggarannya digergaji terus oleh pemerintah tapi produksi naik terus. Nanti pemerintah lihat, wah makin

kecil makin-makin naik, jangan-jangan nanti dihilangkan lagi anggarannya kan bahaya juga.

Ya silakan Pak, ini memang dipimpin oleh Pak Menteri ini jadi ajaib ini dunia pertanian itu banyak do'a ini dibanding dengan banyak uang ini. Terima kasih ya.

Pak Suhardi Duka silakan, Pak Suhardi Duka. Bapak ini melamun saja, kenapa punya sapi berapa ribu ekor.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, dan para pejabat Eselon I serta Pimpinan BUMN.

Dalam kerangka ekonomi makro APBN 2023 dipatok pertumbuhan sekitar 5,3 sampai dengan 5,9%. Total belanja diperkirakan sekitar 2.900 triliun, kenaikan ada kenaikan dari APBN pokok 2022 kemarin dan Pertanian diharapkan menyumbang pertumbuhan sekitar 4%. Saya kira ini harapan yang besar tapi di sisi lain pagu indikatif Kementerian Pertanian hanya 13,7 triliun, turun dibanding dengan 2022. APBN yang akan kita susun ini diharapkan berfungsi sebagai *Shock Absorber* atau dapat menyangga gejolak ekonomi global yang masih fluktuatif utamanya di sektor pangan dan energi. Sementara terjadi lonjakan harga akibat perang Ukraina dan Rusia.

Semua negara memitigasi pangannya dan bahkan melarang ekspor. Seperti India sudah melarang ekspor gandum dan akan banyak lagi negara lain akan melarang ekspor untuk memitigasi kecukupan pangan dalam negeri. Indonesia harus dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi pangan dalam negeri, utamanya pangan utama seperti: beras, jagung, kedelai, bawang merah, gula pasir, minyak goreng dan lain-lain tentunya. Ya, untuk itu menjaga kualitas belanja saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama antara Kementerian Pertanian dengan Komisi IV agar *Better Spending* ini menjadi strategi dalam menyusun anggaran Kementan yang menurut, yang menurun tahun 2023 ini.

Tadi banyak teman-teman yang mengomentari anggaran turun tapi produksi naik. Memang karena peran APBN ini tidak, tidak terlalu besar, enggak signifikan di dalam peningkatan produksi artinya petani kita sudah mulai *Autopilot* lah sudah mulai mandiri. Akan tetapi kita harus dorong, APBN harus mampu menjadi pendorong. Olehnya itu, beberapa catatan di dalam Raker ini ingin kami sampaikan Fraksi Partai Demokrat.

Yang pertama adalah alokasi pada Sekjen yang melebihi 10% anggaran, saya kira minta diefisienkan Pak ya.

Yang kedua, Dirjen Tanaman Pangan 2,5 triliun dengan target produksi 55,39 juta ton padi, jagung 23,21 juta ton, kedelai 0,55 juta ton, saya kira ini sangat optimis, target ini sangat optimis dibanding dengan alokasi anggaran yang kecil tapi ini bisa tercapai apabila belanjanya harus diarahkan pada kegiatan pokok seperti pengadaan benih. Saya kira ini penting Pak, Alsintan pasca panen, bantuan teknis serta pemilihan jenis benih yang berkualitas baik.

Yang ketiga, Dirjen Horti 1 triliun lebih diarahkan kepada bawang merah, cabai, bawang putih dan buah-buahan juga harus dapat mendukung sarana dan prasarana pertanian utamanya dalam bentuk kegiatan Demplot bantuan benih serta sarana prasarana petani.

Kemudian Dirjen BUN 1,1 triliun. Saya pikir Dirjen BUN ini perlu memilih tanaman-tanaman yang pokok, terlalu banyak saya lihat tanaman yang tidak strategis yang dialokasikan anggaran. Saya minta diefisienkan Pak cukup beberapa tanaman saya kira kopi, kakao, saya kira juga sawit pengadaan kecambah sawit ini bagi masyarakat perlu kita dukung, Pak. Jangan hanya dikuasai PKS-PKS semua atau perusahaan-perusahaan besar semua.

Kemudian Dirjen PKH, saya kira PMK menjadi prioritas karena tingkat kerugian petani sudah semakin besar sekali. Kalau PMK ini tidak bisa dikendalikan, saya kira ini adalah kegagalan kita semua dan menurut saya masuknya PMK kembali di Indonesia adalah suatu kegagalan. Kenapa? Karena, kita sudah bebas PMK kenapa masuk lagi. Yang kita mau tahu persis sebenarnya siapa yang memasukkan ini? Kalau RIPH itu masih di Kementerian Pertanian, masih Pak ya, di dalam RIPH itu Pak apakah ditentukan negara mana yang akan masuk? Apakah hanya dibuat RIPH, importir yang menentukan negaranya? Kalau memangnya RIPH itu dicantumkan negara mana sumber dagingnya itu, saya kira kenapa kita lalai kenapa kita tidak tegas bahwa negara yang bebas PMK yang boleh masuk dagingnya di Indonesia kecuali kok RIPH itu tidak menentukan negara sumbernya berarti pedagangnya importirnya yang mencari untung.

Yang selanjutnya Dirjen PSP 2,3 triliun 2,7 triliun, saya tidak menolak *Food Estate* akan tetapi terbukti *Food Estate* ini belum memberikan harapan dan hasil. Banyak tempat-tempat *Food Estate* yang menurut saya gagal di dalam menjalankan meningkatkan produksinya. Olehnya itu, saya berharap untuk sarana dan prasarana petani baik dalam bentuk alat penggarap, perbaikan saluran irigasi sebagai mitigasi menghadapi musim kemarau, jalan usaha tani, serta pengadaan pupuk organik berkualitas. Saya minta ini, Pak menjadi penekanan karena pupuk subsidi alokasinya kecil, kemudian sekarang ini pupuk melonjak jauh mahal sekali.

Nah, dengan demikian kita harus petani dengan pupuk organik yang berkualitas. Saya ingin garisbawahi pupuk organik yang berkualitas. Kenapa juga pupuk organik hanya air saja jadi kalau tidak, tidak diseleksi betul pupuk organiknya dan ini banyak petani yang sudah sukses untuk menggunakan pupuk organik ini. Saya minta supaya di PSP ini dialokasikan anggaran karena kita memang kemarin sepakat pupuk organik tidak lagi masuk disubsidi pupuk subsidi tapi kita ingin arahkan pupuk organik ini masuk di APBN.

Selanjutnya PT Pupuk Indonesia. Saya ingin bertanya, Pak sejauh mana kemampuan PT Pupuk Indonesia dalam memenuhi ketersediaan pupuk subsidi karena saya tahu bahwa bahan pupuk NPK ini lagi melonjak di pasar dunia global. Apakah masih mampu Pupuk PT Pupuk Indonesia untuk menyediakan pupuk subsidi? Ini karena alokasinya saya lihat cukup besar dengan harga yang tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang pupuk subsidi.

Yang terakhir Bulog. Ada Bulog ya? Ya. Ada alokasi subsidi minyak goreng 2022 APBNP 7,5 triliun. Saya ingin tanya apakah Bulog yang ditugaskan untuk penyediaan minyak goreng subsidi ini ataukah lembaga lain lagi atau swasta? Kalau swasta saya yakin gagal tapi kalau Bulog saya yakin bisa. Pertanyaan saya apakah Bulog yang dikasih atau ditugasi untuk menyediakan, menyalurkan minyak goreng subsidi dimana APBNP 2022 itu 7,5 triliun dan 2023 juga kita sudah alokasikan untuk penyediaan subsidi bagi minyak goreng bagi masyarakat kecil kita.

Selanjutnya kesimpulan bila belanja ini benar berkualitas di dalam penyusunan satuan 3 ya karena satuan 3-nya kami tidak ikut menyusun, saya yakin target tumbuh 4% bisa dicapai tapi kalau ternyata alokasinya lebih banyak ke dukungan manajemen saya tidak yakin akan bisa mendorong pertumbuhan 4% sektor pertanian. Saya kira saatnya kita mengurangi perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas negeri yang tidak jelas manfaatnya. Komisi IV sampai saat ini belum pernah melakukan kunjungan ke luar negeri Pak Ketua ya, ya karena kita memahami bahwa anggaran sangat terbatas.

Demikian.

Terima kasih, Pak Menteri.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ya, terima kasih ya karena Komisi IV banyak mengunjungi petani dan petani itu semuanya di dalam negeri dan ada pesan juga Pak Menteri itu sapi-sapi dulu yang dikirim itu tumbuhnya agak susah. Rata-rata kurus dan banyak yang sulit beranak, kasihan tuh petani itu ada yang hampir sudah setahun tidak mengalami produksi apa pun energinya habis untuknya nyabit rumput tapi sapinya enggak mengalami perkembangan, Pak. Hamil enggak tumbuh enggak sampai dia bingung, saya harus digimanain karena energi saya terkuras dalam setiap hari meninggalkan pekerjaan pokoknya untuk mengurus sapi. Ini harus menjadi bahan perhatian ke depan sehingga sapi itu kedepan tidak boleh yang lagi sakit cacangan tapi kirim yang gemuk-gemuk dan yang sudah hamil agar bila perlu yang hamil duluan lah ya.

Dan selanjutnya ini sekarang tokoh kritis kita dari tadi tangannya sudah begini-begini terus karena Bu Riezky ini kalau enggak ngomong kayaknya enggak bisa tidur nyenyak.

Silakan Riezky Aprilia.

Terima kasih.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.

Selamat datang kembali ke tanah air, berarti saya baru dengar kan dari Brazil ya. Saya ingin pertama ini terkait isu aktual dulu deh ya apalagi tadi disampaikan habis dari Brazil walaupun saya mencoba mencermati kata-kata Pak Dirjen yang kita tanya hasilnya apa ya. Tanggal 27 Mei 2022, saya mendapatkan data 18 Provinsi 110 Kabupaten/Kota grafik terus meningkat terkait PMK. Saya enggak tahu apakah negara ini serius dalam mengurus negara atau tidak ya. Pencegahannya bagaimana? Saya, Pak jujur saja kita gara-gara Covid saja enggak bisa tidur, apalagi itu sapi, Pak. Ayo solusinya apa? Tadi bicara Brazil tapi *result* enggak ada. Coba kan kita ini ada keterbatasan keuangan Pak Dirjen harus kita akui itu. Coba negara ASEAN ini ada enggak Vietnam Thailand yang terdekat saja dulu enggak usah jauh-jauh lah. Dari Perancis ke sini Brazil ke sini saya takutnya nanti vaksinnya juga akhirnya kadaluwarsa. Kalau bisa ada yang siap dan mau bantu ya terima. Kita harus mengakui bahwa hari ini kita membutuhkan itu ya.

Nah, kemudian karena ini juga pembahasan masalah RKA dan RKP 2023 tadi disinggung masalah PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri) kemudian PNBPN saya lihat di kesekjenan juga ada, seperti halnya saya meminta kepada mitra yang lain tolong di-*break down* PHLN dan PNBPN dan diserahkan sebelum rapat dengar pendapat nanti supaya kita tahu ya. Ini memang kita enggak bisa apa ya tapi ini fungsi pengawasan ya, supaya apa ini acuan untuk 2023. Mohon maaf Pimpinan agak panjang teman-teman ya.

Kemudian, saya ini baru baca jadi apa kalau tadi Pak Suhardi Duka bicara *Food Estate*, dia tidak menolak, saya dari awal konsisten menolak. Kenapa? Ini ada di dalam halaman 2 pidato Pak Menteri tadi kapasitas produksi melalui pengembangan *Food Estate* berkelanjutan. Saya minta di-*break down* dong seberapa tingkat keberhasilannya ya tolong serahkan saja datanya. Tenang saya baca kok Pak saya hobi baca ya karena dalam hal ini kok tidak ada dampak yang signifikan juga terkait *Food Estate*. Jadi saya rasa untuk 2023 mohon dimasukkan di kesimpulan rapat, sebelum ada evaluasi ulang terkait *Food Estate*, lebih baik semua anggaran terkait *Food Estate* yang ada di Kementerian Pertanian ditahan dulu. Harus dong masa kita gelontorkan duit kita enggak pernah tahu kasihan masyarakat ya. Kasihan pemerintah, kasihan Presiden lah jangan dibohongin terus juga.

Kemudian bicara halaman 5. Halaman 5 paparan Bapak-bapak, saya mulai dari hortikultura. Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ini saya tahu ini dari

BKP. Saya ingin tahu teknisnya karena sampai sekarang itu masih di-*lock*. Tolong penjelasannya ya. Kemudian masalah PKH Pak Nasrullah ya. Di halaman 5 itu ada pengembangan sarang burung walet terintegrasi. Saya butuh juga ini teknisnya bagaimana, integrasinya sama siapa karena kan burung walet ini bukan hewan piaraan sebenarnya bukan itu ya itu. Pak Darori lebih paham lah.

Kemudian ini kalau yang lambangnya traktor ini apa PSP ya, pakai lambang-lambang enggak ada namanya. Ini juga *Food Estate* ini dievaluasi ulang Pak Ali Jamil sebelum ada rinciannya jangan coba-coba inilah, kalau enggak berantem beneran kita.

Terus kemudian ini yang lambang sarjana ini apa PPSDMP, PRSDMP ya Pak Dedi? Pengembangan wirausaha muda. Coba saya pengen tahu kontribusinya buat negara ini sudah sampai mana sih yang *entrepreneur* ini? Di *break down*. Ini kayaknya mesti jeli ini karena 2023 kita kembali ke awal ya begitu.

Kemudian aduh ini dikasih gambar apa, ini yang terakhir ini apa karantina ya yang 2, penguatan wilayah perbatasan. Barantan Pak Bambang, apa yang mau pengawasan ketat apa? Orang antar daerah saja itu sapinya jebol semua PMK. Coba kasih penjelasan itu supaya rasionalisasi kita semua pada saat menyusun program kerja itu enak begitu loh ya. Jangan pakai ilmu akal-akalan terus. Kenapa saya bilang pakai ilmu akal-akalan, tadi disinggung juga e-RDCK tiap tahun, tahun kemarin 2022, 10 juta, ini keluar lagi 10 juta kayak enggak ada yang mati ini orang-orang. Tolonglah, saya sudah berapa kali tegur ya, mana ada hitungan konstan dalam kayak begini itu enggak ada Pak. Luas tanamnya saja berkurang atau bertambah di beberapa wilayah, masa bisa iya e-RDCK-nya konstan. Wajar saja PIHC ya ini teguran juga, pupuknya orang sudah siap beli tapi pupuknya enggak ada. Ini salahnya dimana begitu loh.

Itu mungkin catatan yang jangan dianggap “angin lalu” Bapak-bapak. Ini kita juga di sini turun ke Dapil juga dimaki orang terus, Bapak-bapak kan enggak ngadepin dimaki. kita di maki-maki, Pak.

RNI saya enggak tahu ini anggaran RNI ini dari mana sih. Sudah tahu tadi dibilang Brazil belum bebas PMK. Halaman 3, importasi daging asal negara Brazil. *Aje gile* Bos, sudah tahu PMK dimasukin? Halaman 3 ini. Masa iya PKH, pernah mengobrol enggak? Ditanya *dong* berarti bisa jadi *sourcing*-nya dari RNI. Ini makanya dibaca juga teman-teman, jangan mentang-mentang beda jurusan terus enggak dibaca.

Jadi Bapak-bapak sekalian, kalau saya fokusnya bicara tahun 2023 ya. Terus tadi Kang Haer juga ngomong katanya rapat lalu katanya ngomong ada enggak sih *spare budget* untuk penanggulangan bencana? Kayaknya mulai harus dipertimbangkan *deh*. Supaya apa? Anda bicara mitigasi, mitigasi terhadap perubahan iklim ya toh. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Perubahan iklim ini juga terkait wabah. Kenapa? Berubahnya iklim itu juga

berubah siklus, berubah siklus berubah siklus kehidupan, siklus makan, siklus udara, dan lain-lain ya.

Jadi itu mungkin saya harap betul dicatat Pak Ali Jamil, Pak Wandijangan pura-pura baca ya, baca benar begitu maksud saya ya. Jadi tolong ditindaklanjuti dan saya minta yang tadi data-data saya ingatkan lagi PHLN, PNBP, evaluasi terkait *Food Estate* ya hasilnya ya dan tadi kepada masing-masing Eselon I yang saya garis bawahi terkait program-programnya. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan sesuai arahan Ibu Ketua juga kami *concern* sekali terutama urusan pupuk hari ini karena berapa kali Ibu Ketua DPR kunjungan pupuknya *Alhamdulillah* enggak ada ya. Jadi sekali lagi saya mohon dengan segala rasa hormat ayolah sekali-sekali serius bernegaranya jangan bercanda terus, sudah selesai bercandanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih, Bu Kiki.

Memang selama ini enggak serius bernegara? Oh enggak. Serius loh ini kan rapat serius dari tadi tegang terus itu bukti keseriusan ini.

Silakan Pak Haerudin mau serius tidak nanyanya ini?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Mau santai tapi serius.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Oh iya silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Biar sambil senyum kita ngobatin diri sendiri.

Pimpinan, Anggota yang terhormat,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran dan mitra-mitra dari BUMN yang hadir pada hari ini yang saya tidak bisa sebut satu per satu, mohon maaf.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sampurasun.

Pak Menteri ingin kami sampai beberapa hal, kami dari Fraksi PAN. Pertama ingin sebetulnya pertanyaan kami minggu yang lalu adalah penegasan Pak Menteri Kementerian Pertanian terutama Dirjen PMK karena ini persoalan apa namanya kejadian yang luar biasa bencana untuk kita semua di luar prediksi kita semua. Makanya kita tidak memberikan ruang anggaran untuk apa *Post Major* yang seperti ini. Seharusnya memang di minggu kemarin

sudah ada proses pengusulan *Refocusing* agar ada anggaran untuk pembelian vaksin.

Begitu Pak Dirjen, mohon maaf tentu sangat paham tentang proses penganggaran. Pak Dirjen menggunakan anggaran ada proses realokasi, menggeser anggaran untuk sesuatu dan untuk sesuatu dan yang berbeda yang itu harus ada proses keputusan politik di kita. Harus ada keputusan politik dengan mitra dengan Komisi IV, dan kita berharap ada proses pendorongan mana *refocusing*-nya, berapa anggaran yang dibutuhkan, mana yang mau kita sisir? Kan kalau kita berpikir keluar cari duit kan susah, tidak sederhana. Mendingan yang ada dulu mana yang kira-kira ini penanganan darurat kita. Nah, kita berharap sempatkan ini tidak terlambat lah. Hari ini kita bisa lakukan ini, maka tadinya saya berharap kita semua membicarakannya ini secara fokus bagaimana ada *refocusing* dan diputuskan hari ini, besok bisa belanja maksud saya kira-kira begitu dan bisa diajukan ke Kemenkeu. Daripada kita terus setiap rapat ribut PMK-PMK solusinya tidak ada, korbannya di mana-mana sudah 16 kecamatan, sementara kita tidak berbuat dan berbuat pun seadanya. Karena Pak Menteri, saya sadari Pak Menteri tidak mungkin berbuat yang maksimal tanpa dukungan anggarannya. Sementara dukungan anggarannya ada dengan kita dengan Komisi IV harus dibicarakan. Nah, saya memohon ini apa bukan secepatnya memang kalau bisa hari ini ada proses pengusulan *refocusing*-nya karena ini kebutuhan kita semua.

Yang kedua, dari kami dari Fraksi PAN memang mohon yang RKA dan RKP ini kedepan kita akan *break down* mana yang kira-kira karena ini kan kita musim pemulihan setelah bencana dua tahun kita pemulihan tapi tambah bencana baru mana yang kira-kira karena ini *food* ini pangan ini adalah benteng kehidupan masyarakat kita dan kita akan *break down* mana yang terpenting yang hari ini jadi target-target kita semua. Jangan sampai anggaran apa namanya tanda petik "tidak fokus" pada satu bidang yang bidang itulah untuk benteng kehidupan masyarakat kita terutama di bidang pangan.

Yang ketiga, kita ini mendengar beberapa jeritan Pak Menteri, termasuk ini untuk Pimpinan dan seluruh Anggota. Pertama, jeritan penyuluh yang nasibnya tidak menentu. Di apa namanya di KP3K itu kita tuh, di P3K kita ini butuh *supporting*, butuh perjuangan dari Kementan. Makanya nanti di minggu yang depan penyuluh mungkin Jawa Barat yang mewakili se-Indonesia ini mau RDPU dengan Komisi IV. Yang kedua, jeritan para petani tebu. Saya ingin ingatkan kepada Ali Jamil dulu saya hadir di forum Panja dan Panja meminta Pak Ali Jamil beserta timnya untuk menghadirkan data spasial. Mana yang butuh ZA itu siapa? Perkebunan apa? Berapa luasnya dan di mana? Yang butuh organik granul untuk perbaikan lahan hara PH di mana dan berapa luasan? Dan saya pikir itu tidak terlambat untuk dalam proses evaluasi keputusan kita yang kemarin ke NPK dan urea kira-kira itu masih bisa di apa didorong oleh Komisi IV dan oleh Kementerian untuk dievaluasi kembali. Sebab, menjadi solusi bagi kita semua, semua bisa terbela walaupun memang berharap 100% terbela itu tidak mungkin. Negara itu konduktor, APBN itu konduktor, tidak mungkin bisa menghidupi 240 juta bangsa ini enggak mungkin dari APBN itu tapi kita itu konduktor bisa mendorong putaran titik ekonomi kita yang lebih baik kedepan.

Pimpinan, yang mungkin yang terakhir dari kami adalah dari sisi regenerasi kita di BPSDM ini. Memang butuh fokus anggaran BPSDM kedepan bagaimana melahirkan generasi-generasi petani kita. Kita malu sebagai bangsa agraris yang kita tidak punya para petani unggulan.

Yang paling terakhir untuk saya ingin mendengar ya atau laporan dari PI setelah keputusan NPK dan urea itu yang fokus sebetulnya dampak negatif dan positifnya apa? Karena memang apa yang telah disampaikan dari Bu Kiki tadi memang beberapa daerah ada kekosongan. Ini sudah fokus kedua saja masih kosong, ada apa sebetulnya masalahnya di kita ini. Kita butuh setelah keputusan sementara ya yang diputuskan oleh kita semua didorong pada dua bidang adanya dua varietas NPK dan urea, apa sih dampak negatif dan positif? Negatifnya jelaslah 100 juta minimal apa, apa 100 juta apa 100 ribu orang hari ini dari pekerjaan di situ sudah mulai mereka tidak bisa bekerja banyak yang terugikan ada negatif-negatif, sisi positifnya seperti apa kita ingin dengar juga.

Nah, kira-kira itu dari Fraksi PAN. Terima kasih Pimpinan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Pak Menteri, doa saya Pak Menteri bisa diberikan kekuatan untuk menyelesaikan problematika keamanan kita terutama di bencana yang sekarang dan saya ingin tetap saya dorong, dorong petani kita, dorong peternak kita, Pak Nasrullah berbuat berusaha, malah Pak Nasrullahnya malah enggak ada ini, enggak ada. Berbuat bagaimana kan obat itu tidak selamanya vaksin, vaksin itu bukan obat. Obat itu hadir di sekitar kita. Bagaimana para peternak kita juga kreatif untuk menguatkan imun ternak-ternak kita. Saya selalu mendorong dan selalu bersepakat dulu eucalyptus saya setuju dan saya dorong, tak peduli siapapun dan dari fraksi apapun tapi kami itulah realitas *real* kami dorong dan kami *support*. Hari ini juga kami akan seperti itu, *Insyallah* obat itu akan selalu ada jika kita kreatif untuk melakukan pencarian obat itu.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih Pak Haerudin yang telah menyampaikan pokok-pokok pikirannya menuju Indonesia *go green* dan kemudian paling utama menyoroti dari tadi bicara *Food Estate*. Kalau menurut saya *Food Estate* lebih baik dibanding *Real Estate*.

Silakan Pak Edward Tannur.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Pak Ketua, betul saya yang ditunjuk yang, oh terima kasih soalnya

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Nama di tempat saya Pak Edward Tannur dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dari Nusa Tenggara Timur yang baru dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka Hari Lahir Pancasila.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik, terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ada *Food Estate* enggak di tempat Bapak?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Ada cuma tadi saya mau ngomong ini buka *Real Estate* tapi *Food Estate*.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Iya silakan Pak. *Food Estate* bukan *Real Estate*.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Jadi terima kasih banyak.

Pimpinan Komisi IV beserta Anggota, baik yang hadir maupun, eh yang hadir fisik maupun virtual.

Pak Menteri beserta jajarannya, dari Pupuk Indonesia singkatnya kita semua yang hadir hari ini.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Memang kalau saya membaca materi yang sudah diberikan dan penyampaian teman-teman, kelihatannya saya agak pesimis ya mungkin tahun 2022 ini akan ada bencana kah atau tidak ya, ini saya lihat. Kekeringan sudah melanda, penyakit kuku sama mulut juga sudah ini, belalang hama belalang juga sudah menyerang Sumba, ini yang saya ya kita kuat saja Pak artinya kita berdoa saja supaya kita diberi kekuatan yang penting semangat, jangan putus asa.

Jadi memang lagi ngetren sekarang Pak Menteri yaitu penyakit kuku dan mulut terhadap ini ternak sapi tapi memang itu wabah, kita mau salahkan siapa ini. Ini kita mau salahkan peternak juga salah, mau salahkan importir juga salah, dia kan cari uang toh ya kita kontrolnya kurang bagus saja. Jadi mengenai penyakit atau kuku ini memang butuh dana cukup besar. Kami harapkan dari Komisi IV, saya secara pribadi agar kita melakukan persiapan dana dalam mengantisipasi penyakit kuku dan mulut ini karena dampaknya sangat berat, sangat berat dan sangat besar terhadap peternak-peternak kita

yang ada di kampung-kampung. Mereka itu bingung ini sudah kena apa penyakit kuku dan mulut ini hanya menunggu ajalnya saja ini sapi. Sekarang juga mau jual menjelang hari kurban Idul Adha, harganya juga anjlok sekarang. Iniantisipasi dari Kementerian Pertaniannya seperti apa, artinya yang realistis saja kita bicara supaya jangan membingungkan lagi orang di bawah di lapangan.

Mengenai pengadaan vaksin seperti tadi awal-awal sudah dibicarakan oleh Pak Ketua. Saya kira benar juga anjuran Pak Ketua tidak perlu kita cari terlalu jauh tidak ada kepastian, cari yang dekat-dekat yang betul-betul efektif dan efisien bisa dicoba kan daripada kita hanya memikirkan sesuatu yang belum terjadi atau yang akan terjadi masih dalam angan-angan, itu yang perlu. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa lebih banyak berbicara realistis karena kalau kita berbicara mengandai-andai ini kepastian iklim saja sudah tidak pasti, apalagi kita mau urus lagi tentang produk-produk yang ada ini. Jadi anomali iklim ini membuat kita semakin berat, semakin sulit memikirkan hasil produksi pertanian, peternakan dan lain-lain sebagainya.

Mari kita sama-sama bahu-membahu yang pintar memberikan masukan, yang kurang pintar *stop* omong, *stop* bicara sudah, dengar yang pintar. Jadi kalau semua berbicara, sebentar Pak Menteri juga bingung ini mau ikut yang mana ini. Dirjen lagi atau Ditjen juga lebih bingung lagi, ini mau ambil keputusan yang bagaimana dengan keterbatasan anggaran yang tahun ke tahun semakin menurun. Ini pagu indikasi hanya 13 miliar ya kita harapkan nanti pada waktu pembahasan bisa dinaikkan lagi. Tahun lalu masih 14 ini turun terus ini. Padahal, Covid sudah akan berlalu Covid tapi yang Covid bukan manusianya, sekarang yang Covid anggarannya yang kena Covid lagi ini. Jadi ini kita perlu jelaskan kepada ya Menteri Keuangan. Tolong pertanian ini diberikan apa apresiasi atau dukungan yang kuat karena Pertanian ini menghidupi hajat hidup banyak orang. Kalau orang enggak beli baju masih bisa hidup, kalau enggak makan mati. Jadi industri juga kita bekerja juga harus berimbang.

Mengenai target, target yang tadi sudah disampaikan ya memang kita semua boleh punya cita-cita, boleh punya harapan, boleh punya angan-angan tapi yang realistis. Ini targetnya semua naik semua boleh itu positif artinya *positive thinking*. Kita berharap supaya setiap tahun itu ada kenaikan ada perubahan. Tapi dengan adanya anomali iklim dengan adanya keterbatasan dana pupuk lagi sudah kita kurangi hanya fokus di urea dan NPK kosong juga di lapangan sebenarnya apa yang menyebabkan ini ya. Ini benang merah yang kita tidak bisa uraikan ini. Dulu kita berpikir waktu Panja pupuk ini disederhanakan saja 2 pupuk yang disubsidi tapi kenyataannya sama dengan juga jadi ini membuat dilema bagi petani juga. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa tolong agar data yang dari lapangan dan mekanisme atau sistem pendistribusian pupuk itu yang harus diperketat. Kalau tidak seperti apa pun kita, kita apa rubah mekanismenya akan tetap sama karena, ini kesalahan saya juga bicara juga kecewa juga jadi mengenai kebijakan pemerintah, mengenai larangan ekspor kelapa sawit, sekarang kan sudah dibuka krannya. Dibuka pun kesejahteraan atau nilai jual dari pada kelapa sawit tandan buah segar ini tetap kecil sekali naiknya hanya Rp50,- ya per kilogram.

Sebenarnya siapa yang mendapat keuntungan dari ini ya. Harga minyak gorengnya naik tapi bahan bakunya terpuruk harganya ini memang ajaib. Tadi Pak Ketua bilang ini, ini ajaib karena anggarannya turun tapi targetnya naik dan itulah fenomena dunia sekarang ini yang orang bilang sejalan dengan anomali iklim ini, jadi semuanya sulit diduga.

Dan mengenaiantisipasi musim kering ini kan kita sudah tahu banyak daerah yang sudah memasuki musim kering ya dan pasti akan terjadi kelangkaan bahan pangan karena musim tanamnya sangat terganggu karena ketersediaan airnya. Tadi saya lihat Pak Menteri di sini bilang mau buat embung dan lain-lain. Saya pikir sudah terlambat Pak, hujannya sudah tidak ada lagi kita buat embung mau tampung apa di situ. Sekarang mungkin perbanyak sumur-sumur bor, perbanyak untuk kalau mau tanam padi sudah sulit ya kita ya P2L itu. P2L dan sektor-sektor ini pertanian yang tidak membutuhkan air banyak yang kita bisa memanfaatkan air tanah. Ini juga perlu ada keseriusan dan kerja sama yang baik dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup karena dampak dari penggundulan hutan itu berakibat pada ketersediaan sumber air.

Mengenai *Food Estate*. *Food Estate* ini ya karena kebetulan saya minta maaf saya omong yang NTT, saja saya bicara yang NTT. Itu *Food Estate* yang di Sumba Tengah Pak Menteri, itu kami ingin tahu target yang sudah dicapai selama dua tahun ini sesungguhnya apa? Karena baru-baru ini kami kunjungan ke sana, sebenarnya programnya belum berjalan maksimal apalagi sekarang di daerah Sumba terkena hama belalang, Pak Menteri. Ini memang sangat ironi bagaimana petani di NTT khususnya di Pulau Sumba karena saya melihat bahwa *Food Estate* yang ada di Sumba Tengah itu sumber airnya bendungannya tidak ada bendungan. Ada satu sungai besar sesungguhnya kalau kita mau buat areal daerah pertanian, fokus daerah pertanian harus sumber airnya disiapkan betul-betul. Mungkin Pak Menteri bisa usul atau kerja sama dengan Komisi V PUPR untuk menyiapkan bendungan, bendungan agar bisa mengairi *Food Estate* yang ada di sana belum, sumber daya alam lahannya cukup luas tapi karena keterbatasan anggaran sehingga sarana dan prasarana masih kurang dan mungkin akan dibangun tapi belum sekarang saya lihat ini karena dananya sangat terbatas. Ini yang membuat saya selalu memberikan penjelasan bahwa sabar, Covid masih Covid alasan itu saja yang masuk akal. Kalau yang lain susah bagi masyarakat untuk menerima karena anggaran yang terbatas.

Dan juga mengenai kesiapan-kesiapan kita dalam dana-dana aspirasi ini kalau bisa dipercepat lah itu mengenai alat-alat pra panen, pra panen, pasca belum, belum, belum, belum, orang belum panen sekarang. Jadi Alsintan tolong dipercepat dan kalau bisa kepastiannya jelas sehingga kami dalam menyiapkan CPCL-nya juga pasti. Jangan mentah lagi, mentah lagi ini membuat kepercayaan masyarakat kepada kami Anggota DPR juga tergerus juga, terkikis.

Jadi dari kami, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, saya kira sedikit memberikan masukan itu. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kerja-kerja Kementerian Pertanian ke depan.

Terima kasih banyak.

Selamat siang.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih Pak Edward.

Pak Syafruddin sebentar ya, nanti Pak Panggih katanya mau ada rapat.

Kalau persoalan keanehan-keanehan Indonesia itu banyak loh. Kerjanya di Kementan tapi SK-nya di BRI . Ya pegawai Kementan kan kerjanya di Kementan tapi SK-nya di BRI.

Silakan Pak Panggah. Terima kasih.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Menteri beserta jajarannya,
Bapak/Ibu rekan-rekan legislatif.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama tentu dari tadi rekan-rekan juga menekankan termasuk Pak Ketua mengenai hal yang sangat serius tadi katanya kan dan mendesak, yaitu masalah PMK. Saya kira saya dari Fraksi Golkar juga ingin menekankan hal yang sama karena memang ini bencana menurut saya ini jadi sudah kategori bencana dan saya sendiri secara pribadi kalau makan daging itu sekarang agak ngeri-ngeri sedap begitu, jadi saya hindari. Nah, ini kan saya kira meluas dampaknya saya kira nanti ke restoran-restoran ya kalau ini tidak segera ada kejelasan bagaimana pemerintah akan menanggulangi wabah PMK ini, saya kira akan terus berlanjut terhadap dampak tidak hanya kepada peternak itu sendiri tapi kemudian merambah ke restoran-restoran yang menyajikan sajian makanan daging.

Saya secara pribadi juga mulai terdampak juga. Oleh karena itu, kami ingin pada kesempatan ini mendengarkan bagaimana penanggulangan secara nyata terhadap wabah PMK ini? Tadi disebutkan apakah yang sudah terdampak ini dimusnahkan, bagaimana cara pemusnahannya tentu saja juga ini perlu anggaran yang cukup besar untuk sebagai akibat dari pemusnahan itu tentu saja memberikan dampak kerugian yang besar bagi peternak. Nah, ini bagaimana pemusnahannya?

Kemudian yang kedua tentu saja yang masih sehat-sehat harus divaksin, baru kita bicara soal vaksin tadi seberapa yang masih tersisa dan datanya dan berapa vaksin yang harus tersediakan? Jangan asal comot saja angkanya satu juta, dua juta tapi tidak diteliti dulu sebenarnya masih tersisa berapa dari sapi populasi sapi kita ini yang masih tidak terdampak dan masih

diselamatkan soal dengan melalui vaksin. Ini saya kira harus harus jelas dan masyarakat perlu mendapatkan penjelasan soal ini agar tidak terjadi dugaan-dugaan atau kegamangan yang bisa merugikan secara luas secara masyarakat terutama kepada resto-resto, warung-warung, dan rumah makan itu, itu pertama.

Yang kedua, kami juga menyoroti hal yang sama terkait dengan *Food Estate*. Ya ini saya kira gagasan yang baik, gagasan yang terobosan menurut saya ada yang enggak setuju tapi kalau saya kok setuju asalkan kita sudah mendapatkan penjelasan yang gamblang mengenai konsep *Food Estate* ini sebenarnya apa. Jangan hanya untuk gagah-gagahan saja ya tapi juga tidak jelas ininya apa pelaksanaannya. Nah, ini mohon juga Pak Menteri dan jajarannya untuk memberikan penjelasan kepada kita konsep *Food Estate* itu seperti apa? Karena memang menurut saya memang sebagian besar usaha tani kita ini belum berbasis pada *Food Estate* ataupun agribis. Kita masih turun temurun tradisional bagaimana petani pedesaan ya menanam menurut kebiasaan dari nenek moyangnya tapi belum terkonsep secara agribisnis. Barangkali saya menduga *Food Estate* ini mirip-mirip dengan konsep agribis artinya itu penyelesaian dari hulu sampai ke hilir. Namun, terus terang kami belum mendapatkan penjelasan yang pasti dan bagaimana nasib dari *Food Estate* yang sudah dilaksanakan termasuk di Dapil saya di Temanggung itu Pak Presiden dengan Pak Menteri meskipun saya tidak diundang tapi sudah dilaksanakan. Itu saya juga tidak dengar kabarnya saya tiap hari ada di Dapil Pak tidak pernah dengar itu. Nah, ini tolong juga dijelaskan sejelasa-jelasnya kepada kita mengenai *konsep Food Estate*. Kalau memang ini bisa memberikan suatu program terobosan, sepatutnya kita untuk mendukung program ini termasuk dengan anggaran yang mencukupi. Itu untuk *Food Estate*.

Yang kedua, mengenai konsep Tanjung Mas sebagai Pelabuhan Hortikultura. Ini saya kira juga suatu terobosan konsep yang baik Pak tapi jangan juga menjadikan pelabuhan ini *entry-point* masuk barang impor hortikultura. Ini harus dicermati Pak karena dari data BPS ini dari April itu meningkat cukup tajam ya produk-produk hortikultura, Pak Anton ya. Jadi seperti beras ya ini dari 10 ribu menjadi 8,8 ribu, cabai dari 4,5 di April menjadi 2,3 ribu ton, bawang putih dari 64,9 ribu naik 307,66% kenaikan impornya, ini dasar data BPS, sehingga kalau nanti dijadikan program Tanjung Mas sebagai Pelabuhan jangan kemudian malah impornya meningkat. Kalau bisa malah ekspornya yang meningkat. Jadi keseimbangan antar ekspor impor harus diatur melalui pelabuhan yang diprogramkan untuk menjadi pelabuhan hortikultura itu. Misalnya impor bawang putih harus ditukar menjadi ekspor pisang misalnya dari sana kan kontainer kosong diisi oleh hasil produk-produk hortikultura kita untuk ekspor keluar. Misalnya seperti konsep itu jadi ini harus program untuk konsep Tanjung Mas sebagai pelabuhan hortikultura harus betul-betul memberikan dampak positif bagi keseimbangan ekspor impor kita.

Itu dan sekali lagi ini tembakau, Pak. Tembakau ini impornya terus meningkat. Jadi di April 11 ribu, 11,5 ribu ton meningkat dari Maret 8,5 ribu. Saya sudah mencermati lama ini Pak mengenai tembakau ini. saya selalu mengatakan, masa untuk merokok saja harus menghabiskan devisa banyak?

Ini dengan Pak Bambang itu waktu itu ya Pak Bambang. Ini kalau diteruskan kan kasihan ini negara ini ya untuk bidang rokok yang katanya mengganggu kesehatan tapi justru kita menghabiskan devisa, ini enggak lucu banget, Pak. Sehingga saya kira saya dulu dengan Pak Bambang sudah mencoba ya di NTT, NTT ya untuk bagaimana membuat *roadmap* tembakau ini Pak sehingga tidak terus meningkat Pak Bambang. Ini bagaimana ini ya kenyataannya kok terus meningkat? Lama-lama juga tembakau lokal bisa habis kalau caranya demikian sejalan dengan bagaimana preferensi rokok juga berubah makin lama produk tembakau lokal justru makin tidak dipakai khususnya di kampung saya itu di Temanggung itu sudah mulai menurun produksinya dan harganya juga bersaing dengan impor tembakau. Ini dari pabrik rokok sebenarnya mau kalau diatur. Saya pernah sama Pak Bambang ini bikin *Roadmap*, mau asal diatur jangan tiba-tiba dilarang impor wah itu kasihan kalau barang impor bisa produksi terganggu produksi rokok. Jadi diatur bersama-sama pabrik rokok, itu saya kira kami minta supaya ini diatur betul. Jangan sampai ini rokok apa tembakau terus mengalami peningkatan impornya.

Yang berikutnya sama dengan yang lain, bagaimana ini progres dari setelah diputuskan untuk pupuk fokus ke NPK dan urea. Ya, Pak Nugroho jadi bagaimana ini sekarang jadi kan sudah agak lebih sempit ya ininya ya persoalannya jadi lebih fokus ke dua dua jenis pupuk itu dan juga yang sedang dikembangkan soal e-RDKK. e-RDKK ini juga untuk bisa mengurangi apa distorsi dari data ya. Nah, ini tentu saja ini juga harus paling pokok karena dari e-RDKK ini persoalan semua muncul. Kalau ada terobosan mengenai e-RDKK tentu saja kita dukung tapi juga jangan hanya sebagai gagah-gagahan saja e-RDKK, memang sungguh-sungguh menjadi basis data yang valid untuk bagaimana kebutuhan dari pupuk di tingkat petani.

Itu saja saya kira, saya satu lagi Bulog karena saya juga pernah di dalam dulu ya. Bulog ini sebenarnya bingung, kalau tidak diberikan suatu kebijakan dari pemerintah sebenarnya tergantung pemerintah saja Bulog itu mau diapakan. Kalau digantung seperti sekarang siapapun yang di situ pasti juga pusing Pak. Ini Pak Dirut Bulog saya kira ada itu, itu dari dulu kita sebenarnya ditugaskan apa. Ini akhirnya memang enggak jelas ini Bulog ini mau dikasih misi, visi apa hanya disuruh mengamankan dengan mengurangi risiko tapi risiko itu tidak mau dibayar. Itu saya kira kita juga ingin mungkin tidak dari Pak Dirut tapi dari pemerintah ini untuk bisa memberikan ketegasan terhadap visi, misi Bulog ini. Ini karena Bulog ini menjadi lembaga yang sangat penting ya setelah kemudian sekarang berubah menjadi Badan Pangan ya barangkali ya, Badan Pangan dan Bulog saya kira “setali tiga uang” tidak bisa dipisahkan sebagai lembaga yang melahirkan suatu kebijakan dan lembaga yang melaksanakan kebijakan atau sebagai operator dari pengamanan kebijakan tersebut.

Saya kira itu hal-hal yang menjadi catatan kami dari Fraksi Partai Golkar.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Wa'alaikumsalam.

Pak Syafrudin *mangga* silakan berikan pernyataan dari menyambung dari Pak Haerudin.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M):

Terima kasih Ketua dan Pak Wakil Ketua.

Pak Menteri dan Pak Dirjen

Saya fokus yang PMK. Masalah PMK ini saya justru dari daerah pemilihan saya..

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak Ketua, PKS belum.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Belum Pak, memang belum, habis ini Bapak. Dia tadi, tadi usul ke saya ini menyambung ke Pak Haerudin katanya. Di-*Ridho*-kan kan?

Siap. Ya.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M):

Saya *concern* masalah PMK ini karena Pak Menteri dan Pak Kabadan Pak Bambang, saya justru dari Nusa Tenggara Barat dari Pulau Sumbawa berterima kasih ya saya tidak melihat kenapa tidak bisa diantisipasi tetapi buat saya mewakili petani atau peternak yang mengirim sapi karena rencana mereka dalam rangka Idul Kurban ini sekitar 12.500 ekor yang akan diberangkatkan dari Pulau Sumbawa. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian ketika itu dari Pulau Sumbawa sampai dengan ke Jakarta tidak ada masalah Pak Menteri dan Pak Dirjen, dan di tengah jalan ketika itu di Lombok Tengah dan Lombok Timur ada masalah. Tadinya itu dari Bima sampai ke Jakarta dengan jalan tiga hari tiga malam naik tronton itu sampai ke Jakarta tapi di tengah jalan ada terjankit dengan PMK akhirnya dibatalkan keberangkatannya. Pun demikian, pemerintah mengambil kebijakan dari Bima ke Lombok, Lombok dari Lembar Pelabuhan Lembar sampai ke Tanjung Mas. Tanjung Mas baru sampai ke Jakarta. Nah, akhirnya berjalan belum, belum berjalan apa namanya belum sempat pengirimannya tapi ditunda lagi. Nah, pemerintah saya melihat ini antisipasinya bagus sekali ya, saya harus berbicara apa adanya khusus dari Pulau Sumbawa dan akhirnya sekarang ini karena di Pulau Sumbawa tidak terjankit dengan PMK mudah-mudahan panjang umur karena memang sapinya bagus juga untuk kurban ini Pak Menteri dari sana karena menurut orang Jakarta lemaknya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang ini sudah diizinkan keberangkatan dengan menggunakan

tronton. Tadinya itu dari pelabuhan Bima sampai dengan Tanjung Perak menggunakan kapal kemudian dari Tanjung Perak sampai dengan Jakarta menggunakan tronton. Nah, sekarang diizinkan oleh pemerintah langsung dari Kabupaten Bima atau dari Bima dari Pulau Sumbawa sampai ke Jakarta dengan perjalanan tiga hari tiga malam. Ini sangat bagus sekali sementara satu kapal itu Pak Menteri hanya 550 ekor. Saya sempat membantu para petani masukin hewan ternaknya ke dalam kapal itu karena kebetulan saya ada di lokasi.

Nah, hari ini saya minta bantuan kepada pemerintah baik Pak Menteri maupun Kepala Badan Karantina untuk melakukan pendekatan dengan pihak Perhubungan untuk menambah armada, armada keberangkatan karena kan 9 Juli ya Idul Adha dan ini keinginan mereka itu ada sekitar 12.500. Mohon bantuannya kepada pemerintah melakukan pendekatan kepada pihak Perhubungan sehingga keberangkatan ini bisa diatasi dengan secepatnya.

Kemudian yang kedua, itu masalah PMK. Yang kedua, saya berterima kasih juga kepada pemerintah dalam hal ini ada beberapa kali di daerah pemilihan saya ada kebakaran dan kebakaran itu melanda hampir 90 sekian persen itu adalah petani dan petani bawang merah. Saya sudah menyampaikan kepada Pak Dirjen Pak Anton, Bapak sekalian dan Pak Ali Jamil dan bawang merah mereka, Pak Menteri belum sempat dijual masih digantung di atas rumah panggung mereka dan kebakaran. Saya meminta kepada pemerintah pada saat itu untuk penundaan pengembalian KUR karena mereka menggunakan KUR seperti yang kita inginkan kepada petani dan oleh karenanya melalui pemerintah disampaikan ada penundaan. Dan yang kedua Pak Dirjen Horti juga sampaikan ada bantuan walaupun tidak banyak bibit bawang merah. Nah, hal-hal seperti ini saya terus terang berterima kasih dan sangat bagus sekali walaupun sangat terbatas.

Pak Ketua, Pak Wakil Ketua dan teman-teman sekalian, Pak Menteri,

Saya menyampaikan ini penting dan apresiasi terima kasih. Mudah-mudahan masalah PMK ini saya menunggu penambahan armada karena masih tanggal 9 Juli. Saya sampaikan bahwa tiga hari tiga malam dari Pulau Sumbawa untuk sampai ke Jakarta supaya ada kemudahan mereka mereka mencari lokasi untuk penyimpanan hewan.

Terima kasih.

*Billahi fi sabililhaq fastabiqul,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih.

Ini yang politisi tapi pakarnya, dokter, dokter hewan.

Silakan Pak Slamet. *Insha Allah* kalau Pak Slamet sudah ngomong, seluruh sapi di Indonesia selamat.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Aamiin.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi IV yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu sehat.

Pak Menteri beserta seluruh jajaran dan seluruh Direktur dari beberapa BUMN yang hadir yang saya hormati dan mudah-mudahan juga dalam kondisi sehat.

Terkait dengan Raker hari ini, pertama kalau apa terkait dengan jumlah anggaran harusnya ya kita mau tidak menyetujui bagaimana seolah-olah ini *given* tetapi saya ingin mendapatkan gambaran begini Pak Menteri, bahwa Undang-Undang Pangan kita apa mengamankan tidak hanya masalah ketahanan pangan saja tetapi filosofi yang lain adalah terkait dengan kemandirian sekaligus juga kedaulatan pangan dari negara kita. Sehingga, saya dari sisi anggaran sekarang pagu yang ada saja sudah tidak mencerminkan bagaimana kemudian apa keberpihakan pemerintah atau kepedulian pemerintah terhadap ketahanan pangan. Apalagi kemudian kita bicara tentang kemandirian sekaligus juga kedaulatan pangan dari negara kita hanya 13 triliun ya sehingga sangat-sangat tidak menunjukkan keberpihakan di saat yang sama bagaimana kemudian dua tahun ke belakang bahwa PDB yang positif adalah dari sektor pertanian.

Jadi fakta-fakta ini kemudian tidak diakui oleh pemerintah bahwa ini adalah menjadi sumber yang, sehingga saya ingin mendapat gambaran dari Pak Menteri, di luar dari konteks yang sekarang ada, berapa sih kebutuhan begitu, berapa sih kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh Kementan untuk mewujudkan atau menuju *grand* strategi kita menuju kedaulatan pangan sekaligus juga ketahanan pangan atau kemandirian pangan yang diamankan undang-undang? Karena saya belum melihat tiga tahun bersama kita duduk di sini, kita hanya terpacu ketika dikasih 16, 16 yang diolah, tapi coba kami ingin mendapatkan gambaran berapa sih kalau untuk menuju sampai kepada kita kedaulatan pangan itu. Minimal kemudian kita mendapatkan gambaran "oh Pak Menteri itu punya tujuan besar, anggarannya sebenarnya segini." Paling tidak ke rakyat juga bisa ngomong Pak, "saya sebetulnya sekian ratus triliun, hanya dikasih sekian", ya saya pikir ini menjadi satu hal yang perlu disampaikan kepada kami untuk kemudian menuju jelas amanah undang-undang ini bisa dijalankan

Kemudian saya juga mengomentari sisi lain terkait dengan beberapa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, selalu kebijakannya adalah peningkatan kapasitas produksi. Sebenarnya petani kita tidak sulit untuk melakukan peningkatan produksi. Ada masalah besar yang kemudian harus

disandingkan oleh negara, oleh pemerintah dalam hal ini bagaimana kemudian petani kita bisa melakukan swasembada atau produksi tercapai yaitu masalah kesejahteraan, Pak. Jadi bagaimana kemudian petani kita untuk memproduksi secara tenang kalau kemudian pas panen ini menjadi penyakit tahunan, penyakit yang selalu berulang tahun saat panen harganya murah. Setiap mau bercocok tanam banyak kendala mulai dari pupuk dan lain-lain. Sehingga tolong dalam kebijakannya tidak hanya berpikir kepada peningkatan masalah produktivitas tapi bagaimana kemudian peningkatan kesejahteraan. Makanya usulan-usulan ini kemudian perlu diramu dibuat menjadi formulasi programnya sehingga ada sisi-sisi kesejahteraan, sehingga bagi petani kalau saat panen harganya mahal tidak disuruh tidak di pasti dia sudah punya inisiatif untuk menanam komoditas yang dimaksud. Nah, sehingga perlu disandingkan antara kesejahteraan diawalkan sehingga produktivitas akan tercapai. Ini catatan saya terkait ini.

Saya juga menyinggung lagi Pak Menteri terkait dengan disinggung beberapa pidato di awal tadi lagi-lagi terkait dengan *Food Estate* yang masih dianggarkan di 2013. Ini menjadi *concern* kita sehingga, 2023 mohon maaf jadi ini ingin balik lagi ini Pak, mohon maaf. Sehingga saya mengulangi dari awal Pak Ketua dan juga Pimpinan yang lain serta seluruh Anggota. Menurut pengamatan dari teman-teman kita yang Dapilnya ada *Food Estate*, kemudian hasil kunjungan kita sekaligus juga ada informasi dari Satgas pangan bahwa *Food Estate* ini tidak memberikan korelasi yang positif antara anggaran yang keluar dengan target-target yang ditentukan Pak Ketua, sehingga sebelum diluncurkan 2023, kami Fraksi PKS mendorong untuk dibentuk Panja supaya *clear* masalahnya ini. Tidak ada masalah kalau hasil Panja mengatakan bahwa ini perlu di-*support* untuk dilakukan di 2023 kenapa kemudian tidak ini kalau kemudian untuk kepentingan rakyat kita tapi berdasarkan analisa sementara kami bahwa ini ada tidak keberhasilan untuk kemudian kita perlu telusuri sehingga perlu tahun ini dipikirkan usulan kami kepada Pimpinan dan seluruh Anggota untuk kemudian dibentuk Panja agar masalah ini menjadi *clear* itu.

Yang berikutnya, kami juga menyoroti beberapa target-target yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi mudah-mudahan kita tidak latah terkait juga pengembangan *Smart Farming* dan juga digitalisasi. Saya ingin mendapatkan gambaran sih bagaimana digitalisasi yang dimaksud dari Kementan untuk kemudian menuju pertanian kita ya. Jadi jangan sampai kita latah tetapi sebenarnya digitalisasi dengan SDM petani-petani kita yang tidak menyambung sehingga program pemerintah ke kanan kemudian juga petani kita ke kiri, sehingga tidak akan ada hal yang berkorelasi positif, itu.

Kemudian juga terkait beberapa hal, saya ingin mendapatkan gambaran dari PMK ini PMK, Pak Menteri. Saya khawatir kegagalan atau kebocoran atau ya bahasa saya sebelum ke sana saya juga ingin mendapatkan data Pak, mohon programnya kita fokuslah ya. Ini dari Badan Pusat Statistik mencatat impor sayuran melonjak dan menjadi komoditas impor terbesar pada periode April 2022, besarnya 63,6 juta Dolar Amerika atau meningkat 111,78% dan data ini dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Mohon program-program kita, kita arahkan ke sana ya jadi untuk bisa kan ini yang diimpor adalah bawang putih kemudian bawang bombay, wortel, brokoli, dan paprika dan semuanya ini

kan bisa tumbuh di negara kita ya sehingga tolong program-program nanti 2023 bagaimana kemudian bisa mengurangi ini. Ini data dari BPS ya saya tidak mengarang.

Nah terkait dengan PMK, saya khawatir Pak Ketua ini juga jangan-jangan ini juga memang kesalahan atau saya ingin mendapatkan gambaran. Saya lihat dari indikator kinerja target Kementerian Pertanian 2020/2024 ya. Dari fokus ke apa terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategi nasional kemudian dijabarkan dalam prosentase kasus pelanggaran perkarantinaan, yang diselesaikan itu persentasenya sangat kecil Pak Ketua. Tahun 2020, 41% enggak tahu ini persen apa kasus ya, 2021/42, 2022/43, 2023/75, dan 2024 targetnya, mohon maaf 2023/44, 2024/45. Saya akhirnya mengaitkan dengan kebobolan PMK hari ini. Kalau target penelitian apa penyelesaian kasus yang terkait dengan kekarantinaan saja hanya sekian tidak sampai 50 di saat dengan target-target yang lain itu semuanya di atas 80%, jangan-jangan ini ada kesengajaan sehingga wajar kalau kemudian prestasi pemerintah hari ini adalah memasukkan PMK atau kembali Indonesia menjadi negara yang tidak bebas dari PMK. Mohon penjelasan Pak Menteri terkait dengan kenapa targetnya di bawah 50% untuk masalah karantina ini untuk penanganan kasusnya.

Itu mungkin beberapa hal. Dan yang terakhir saya terkait dengan ID Food ini. ID Food Pak Direktur ya, ya sekarang direktornya sudah jadi Kepala Badan Pangan ya. Jadi ini catatan kita juga Pak seluruh anggota sampai semalam saya mengikuti dialog, jadi sekarang sampai sudah berapa bulan dibentuk masih *staffing* saja sementara pangan kita masih sudah sedemikian rakyat kita menggeliat apa kedodoran kemudian dianomali harga yang luar biasa, Badan Pangan masih sibuk dengan *staffing*-nya yang perlu apa belum selesai sehingga ini bagaimana ketidak sensitivitasnya kemudian tidak segera menyelesaikan hanya masalah *staffing*.

Nah terkait dengan ID Food, saya dulu pernah bertanya terkait dengan Program Makmur dijanjikan oleh waktu itu siapa yang jawab apa Pak Sekjen apa siapa terkait dengan realisasi atau target 49.663 hektar dari Program Makmur kemudian petaninya sekitar 42 ribu orang, betul Pak ya? Itu koordinasinya bagaimana? Apakah ini juga pendataannya terkait dengan apa target-target Kementan? Jadi saya memang melihat ini agak tumpang tindih. Saya kira-kira tiga minggu yang lalu diundang oleh Kementerian Menko Perekonomian, Pak Ketua ya Bu Musdalifah untuk panen perdana cabai dengan Program Plosluf. Saya jadi bingung kalau kemudian Kemenko saja punya program di lapangan, ini koordinasinya bagaimana? Saya juga karena saya diundang saya hadir saja hanya kemudian apa mendalami saja ini koordinasinya dimana kemudian kalau kemudian mengambil langkah masing-masing sehingga saya ingin mendapatkan gambaran Program Makmur yang lahan yang diambil itu spesifikasinya bagaimana, petaninya siapa ya sehingga nanti bisa apa saya juga ingin mendapatkan gambaran dari apa pertanian bagaimana terkait ini. Juga ini ada beberapa saya tidak mengerti ada realisasi tanam KPKS ya karena tidak ada penjelasannya di awal itu ya saya inginkan kaitannya dengan ini, tumpang tindih enggak dengan pertanian kita? Termasuk juga ada program *replanting* Lahan Laskar. Apa Lahan Laskar ini? Ini supaya

nanti kita bisa sinergis dan kita bisa akurkan dengan program-program yang dari Kementerian Pertanian.

Demikian Pak Ketua yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada perwakilan fraksi.

Jadi mau Program Makmur, program apa, kok tiga tahun lalu enggak ada?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Sedikit lagi Pak Ketua satu cukup Pak mohon maaf, ini titipan dari para pedagang apa pedagang Idul Kurban, tadi menyambut yang disampaikan Pak Rudi. Pak Bambang, Pak Menteri hari ini yang dialami kesulitan itu adalah karantina tidak mau mengeluarkan surat sehat dimana hewan ini berasal dari daerah hijau. Jadi ini yang menyulitkan bagi para pedagang untuk kemudian bisa mengirim sapiunya.

Demikian, Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Jadi saya jelaskan Program Makmur, program apa yang tadi bilang dari Kemenko apa, kenapa tiga tahun lalu enggak ada? Kenapa begitu mau ada pencapresan semua cari muka? Turun ke rakyat. Ya, apalagi Menteri BUMN mungkin dalam setahun bisa 10 kali ke Lampung. Saya tanyakan, "Selama ini ke mana *lu*? Jelas saya ngomong begitu. Ini didukung juga oleh Pupuk, oleh Bulog, oleh ID Food, ini apa-apaan ini? Harusnya tahulah Anda itu pembantu Presiden, kerja dulu membangun menyelesaikan masalah-masalah ini bukan cari cari-cari program untuk menghabiskan uang saja.

Sekarang kalau ditanya, terjadi enggak tubrukan? Pasti terjadi, "Oh ini binaan saya." Nanti juga di Provinsi juga ada orang mau nyalon Gubernur, di Kabupaten juga ada orang mau nyalon Bupati, "Oh ini program saya." Jadi nanti semua kalau dikali itu produksinya luar biasa. Ini sekian ini sekian ini sekian ini sekian, BPS-nya saja sampai bingung nanti. Iya karena dari Makmur sekian, dari tadi yang apa Menko sekian, dari Pertanian sekian, dari Gubernur sekian, Bupati sekian. Jadi nanti *overload* nanti tahun depan beda lagi tambah banyak

lagi. Jadi kalau satu Kabupaten itu misalnya 50 50 Anggota Fraksi dikali 10, 500 yang 'cuap-cuap', "saya pembela petani," wah "akan saya perbaiki jalan yang rusak, kalau perlu saya keramik." Nah kurang lebih seperti itu nanti tapi setelah jadi ya *Wassalam* lah.

Silakan dijawab pertanyaan fraksi, setelah itu baru pendalaman dari Anggota yang terhormat. Silakan.

MENTERI PERTANIAN RI:

Bismillahirrahmanirrahim.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV, Bapak, Ibu sekalian yang sangat saya hormati.

Yang pertama izinkan kami menyampaikan hormat kami terima kasih kami kepada sembilan fraksi yang telah menyampaikan Pak Arifin, Bu Yessy, Pak Suhardi, Pak Bu Rizki, Pak Haerudin, Pak Edward, Pak Panggah, Pak Syafruddin, dan Pak Slamet.

Pimpinan dan segenap Anggota yang kami hormati,

Kami mencatat apa yang telah disampaikan dan pada intinya kami akan mengolah dan akan menjawab secara tertulis masukan-masukan dan tanggapan serta koreksi-koreksi ini sangat penting untuk kami dan kami akan sampaikan data. Kami mohon untuk dibukakan konsultasi seperti apa data yang sebenarnya yang ada dan kami siap kerja Ketua.

Bapak, Ibu sekalian yang sama saya hormati,

Sedikit saya merasa terbela sebenarnya dalam forum ini karena anggaran turun tapi produksi naik. Barangkali bukan ber-*apology* tetapi seperti itulah kondisinya. Saya coba bayangkan kalau kemudian anggaran turun kemudian produktivitas turun, matilah aku di sini. Oleh karena itu, Pimpinan, saya kira ini bagian dari caranya Pimpinan dan Komisi IV membela pertanian. Sekali lagi ini caranya Pimpinan dan membela pertanian bahwa ada hatinya kepada kami yang sudah kerja siang malam menghadapi tantangan ini.

Izin kami tidak bermain-main dengan itu Pak Ketua, saya jamin itu, saya janji itu dan kalau lah kemudian produktivitas kita dalam dua tahun ini dalam kondisi Covid semua sektor menurun hanya pertanian yang naik Bapak. Boleh itu dibuka data itu, dan kita menyanggah ribuan triliun bagi republik ini, inflasi terendah dalam dunia yang ada ini juga di Indonesia karena pertanian *survive*. Kenapa anggarannya seperti ini, saya kira pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan saja menjadi bagian-bagian yang kita bisa diskusikan, juga kepada Anggota-anggota dari Komisi IV yang terlibat dalam anggaran di DPR karena biar bagaimana anggaran global DPR juga ditentukan.

Bapak dan hadirin sekalian yang sama saya hormati,

Oleh karena itu, saya ingin mempersiapkan KUR Bapak. Kami memang salah satu yang kami 'lari' untuk menentukan itu KUR-nya. Ini Bapak kami pakai 50 triliun kemarin KUR kira-kira semua ke OJK, ke semua bank datang untuk bisa mendapatkan 50 triliun dan ini tidak pernah kita capai seperti ini, Pak tanaman pangan 14, Horti dapat paket 6 triliun, 20 triliun dari Perkebunan kira-kira begitu Pak, dan berapakah yang macet? 0,03%. Ini saya kira yang lepas dari Ketua segala kekurangan yang saya miliki bersama teman-teman cara 'lari' dari anggaran yang terbatas itu seperti inilah. Kemudian di 2021 Bapak, saya kita pakai dana minta tambahan penggunaan KUR 70 triliun yang kami pakai 85,62 triliun ga ada jaminan Kementan di setiap itu, maafkan saya dan yang macet 0,6. Jadi kalau Pak Slamet berapa anggaran yang kita butuhkan anggaran? Lebih dari 90 triliun lah harusnya, bukan 13,7. Pangan menjadi penting pangan akan menjadi ancaman pangan menjadi makanan pangan menjadi, pangan menjadi lapangan kerja, pangan menjadi farmasi untuk kebutuhan, pangan menggerakkan industri, pangan akan menjadi pakan bagi semua yang lain tetapi itulah kenyataan yang ada.

INTERUPSI F-PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi, Pimpinan.

MENTERI PERTANIAN RI:

Saya ingin lanjut dulu Bapak supaya jangan terpotong-potong kalau menjelaskan. Saya minta maaf Ketua. Bapak cukup membuat saya tertantang tadi bahwa saya akan kerja kerja luar biasa. Oleh karena itu, memang tidak ada jalannya kita pakai KUR dan tidak gampang mengeluarkan triliunan Bapak. Dan saya kira yang lain adalah NPL-nya 0,6 sangat layak. Sekarang saya berharap memang hari ini saya makin yakin dan ini juga saya kemukakan di semua tempat Bapak, bahwa kita disuruh berperang tapi peluru memang sangat terbatas. Oleh karena itu, yang mana yang akan dipakai hanya terfokus pada masalah dasar mengatasi masalah *Urgent* masalah yang terkait dengan semua kepentingan-kepentingan yang dalam menjabarkan itu.

Maaf Pimpinan saya kira ini yang pertama yang ingin sampaikan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pimpinan mohon maaf, Kapoksi saya itu interupsi dan mekanisme sidang ini interupsi diperbolehkan.

KETUA RAPAT :

Sebentar dijelaskan dulu, nanti baru..

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Eggak, saya hanya meluruskan saja. Kita sendiri yang buat mekanisme, kita harus juga konsisten, Pak Ketua. Ini Kapoksi saya interupsi loh bukan sekedar mau ngomong.

KETUA RAPAT :

Ya saya paham. Sebentar tunggu, tunggu dijelaskan dulu.

MENTERI PERTANIAN RI:

Saya kembalikan Ketua. Saya sudah selesai, selesai dengan KUR.

KETUA RAPAT :

Jadi mekanismenya adalah tidak boleh dijawab secara tertulis, dijawab langsung nanti setelah itu akan dijawab secara tertulis ya. Jadi ketentuannya sudah kami rumuskan seperti itu.

Ya silakan Mbak Kiki yang tadi mau interupsi.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Terima kasih buat Kakak Ansi, untung masih ada yang pegang aturan begitu kan.

Begini saya bicara KUR tadi 70 T, sekarang 90 T. Coba *Slide* sebelumnya, 70 T ini seperti tadi Pak Menteri membicarakan data, Mereka mengizinkan kita membuka data. Saya juga minta data ini sekalian 70 T ini sebarannya kelompok mana saja sih? Tepat sasaran atau enggak KUR ini karena saya dapat laporan KUR ini juga tidak tepat sasaran. Jadi saya mohon Pak Sekjen tolong turunan dari ini.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya mungkin dijawab dulu.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Ketua, sedikit.

KETUA RAPAT :

Ya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Kalau saya justru begini Pak Menteri artinya dengan hitung-hitungan Kementerian Pertanian dengan 70 triliun itu akan bisa menuju kepada kedaulatan pangan. Saya ini ingin mendapatkan gambaran nanti uraian 70 triliun untuk menuju kepada kedaulatan pangan kita yang dicita-citakan

bersama itu di-*breakdown* dalam bentuk apa strategi kayak apa nanti sehingga kita bisa memberikan dukungan.

Terima kasih Pimpinan dan Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Ya lanjutkan Menteri jawabannya.

MENTERI PERTANIAN RI:

Ya kami catat kami akan siapkan semua. Kami mohon juga dalam persiapan itu mungkin sekaligus dikonsultasikan langsung. Kita lihat sehingga hasilnya sama-sama.

Bapak dan hadirin sekalian,

Yang kedua yang ingin saya mau jawab tentang PPL. PPL dalam undang-undang itu memang di bawah Bupati, Bapak, sehingga memang itulah bagaimana caranya padahal sebenarnya itu Kopassus kita di lapangan. Saya sependapat kalau ini menjadi bagian-bagian yang kita jadikan kesimpulan sehingga kami tidak menghadapi dengan aturan-aturan yang sangat rigid di bawah terhadap PPL yang ada. Oleh karena itu, PPL tidak bisa langsung kita berikan dukungan seperti operasional yang bukan program karena ini akan berkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang pembinaan status kepemimpinan kepegawaian mereka, organik mereka ada di itu pemerintah daerah. Nanti walaupun demikian, tentu saja berbagai upaya-upaya untuk terus mengembangkan PPL ini baik dalam pelatihan-pelatihan tetap kita lakukan. Yang kedua, penambahan jumlah PPL yang kemarin itu Bapak, *Alhamdulillah* kita bahkan dapat karena kita yang mem-*backup* sepenuhnya ke Menteri Menpan Pak Tjahjo Kumolo dan kemudian membenarkan apa yang menjadi kepentingan Kementan sehingga mendapat alokasi tambahan dan kita terus berjuang untuk itu.

Bapak dan Ibu sekalian,

Yang hal lain terhadap perjalanan ke luar negeri, ingin saya sampaikan saya cuma 4 hari Pak, hari kelima sudah sampai di sini perjalanannya 24 jam. Maaf ke Brazil dan ke Austria intinya ada rapat pupuk di Austria selama satu hari di sana bertemu dengan Jordan dalam rangka konsistensi pupuk kita agar fosfatnya tetap bisa tersalurkan ke kita dan tentu saja KCL-nya juga seperti itu K-nya D dan Potasiumnya seperti itu Pak jadi itu yang kita capai di sana.

Yang kedua, dengan Brazil sebenarnya bukan hanya PMK yang kita mau capai di sana tetapi kepastian-kepastian terhadap kedelai karena kita takut bahwa kemarin ini serapan kedelai dari negara lain dalam menghadapi seperti itu Pak. Satu hari, satu hari saja jadi seperti itu dan kemudian hasilnya ada komitmen-komitmen. Yang pertama ya ada vaksin tentu saja diambil dari mana dan lain-lain nanti Dirjen saya akan jawab itu. Yang kedua konsistensinya terhadap kalau ada tantangan-tantangan yang terkait dengan kelangkaan-

kelangkaan pasokan dari Australia terhadap daging kita bisa tetap ter-*backup* tentu dengan protokol yang telah ditetapkan itu kira-kira begitu Bapak.

Dan ketiga tadi di Austria itu bersama pertemuan pupuk sedunia Bapak dan kita mem-*backup* Pupuk Indonesia untuk membicarakan dengan Jordan yang akan menjadi pemasok importasi terhadap potasium dan fosfat, Bapak karena ini tidak ada di tempat kita. Kita berharap tidak terganggu sama sekali.

Bahwa ada tawaran vaksin dan lain-lain dari Australia, *Alhamdulillah* kita sudah dia sudah menawarkan bicara keringanan tapi sampai hari ini saya, Pak Sekjen belum lihat suratnya Pak begitu. Jadi semua menekan kami untuk vaksin. Kami tetap berkomitmen seperti pada Raker yang lalu, kita akan membuat sendiri vaksinnya, Pak. Membutuhkan 2, 3 bulan di Pusat Veteriner Farma kita di Surabaya dan sekarang berproses ya kan Pak Dirjen dan kemudian langkah daruratnya adalah kita dapatkan dulu vaksin dari baik dari Australia dari siapa pun termasuk komunikasi kita dengan Thailand jalan Bapak, dengan Vietnam jalan, dengan Malaysia kita jalan, bahwa itu tidak hanya tidak bukan jualan vaksin, Bapak. Untuk bantuan darurat menghadapi dalam rangka sebelum Idul Adha, Idul Kurban, vaksin ini *Insyallah* sudah masuk. Bahwa dari mana diambil dan lain-lain yang paling pasti kepastian-kepastian vaksin itu *Insyallah* mudah-mudahan bisa terproses. Saya kira kami akan jawab tertulis itu juga.

Oleh karena itu, memang saya kira perjalanan ke sana itu 24 jam Bapak bolak-balik jadi ini kan perjalanan yang ringan sekali dan saya yakin saya akan jawab tertulis apa-apa yang telah dicapai sana dan untuk bisa dilihat oleh semua, bahwa tidak ada perjalanan kami yang hanya jalan saja tanpa dipertimbangkan dengan baik.

Kalau bisa saya kemukakan jujur juga saya ingin katakan Pak Ketua, Pak Ansi dan lain-lain. ini juga untuk memberikan *warning* kepada Australia bahwa, "kalau kau tidak mau jual dagingmu kemari," karena saya sudah ketemu Menteri Pertaniannya Bapak minta MoU untuk kepastian karena kita butuh daging, sampai sekarang enggak. Setelah kita kelihatannya walaupun penentuan terhadap dari mana importasi bukan dari Kementerian Pertanian saja, dari berbagai pihak tentu, setelah ke sana sekarang baru dia mau. Saya pikir oke saja Bapak bahwa kita panggil atau tidak nanti kita pikirkan lagi seperti itu tapi kita harus membuka diri bahwa kita tidak tersandera. Dan yang paling getol untuk bicara PMK sekarang itu ya lebih banyak dari unsur-unsur yang terkait dari situ. Oleh karena itu, kita tidak boleh juga bertahan seperti tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali.

Menurut data yang kami miliki mungkin saja salah. PMK memang sebarannya bertambah tapi jumlah kesembuhan juga sangat naik, jumlah kematian juga turun. Kami akan sajikan datanya Bapak, kami akan sajikan datanya bahwa ada provinsi tapi sangat kecil Pak, *totally* sekarang itu kurang lebih cuman 50 ribu ya, berapa, 40 ribu saja dibandingkan dengan jumlah populasi dari 18 atau 17 Provinsi itu 30 juta, Bapak dan kita sudah isolasi. Langkahnya jelas Bapak dan kalau sekarang ini kami tidak jor-joran dengan publik, kami takut ini akan menjadi konsumsi yang negatif bagi peternak kita

yang sebenarnya masih sangat-sangat oke, semuanya masih bisa jalan. Yang agak naik sekarang ini intensitas kita menanganinya adalah di Jawa Pak tapi di luar Jawa kelihatannya makin surut, makin surut. Kami takut nanti semua menghadapi, menghadapi Idul Adha kemarin kebiasaan orang di NTT, NTB mengeluarkan ini akan terganggu dan kami jamin itu bahwa di daerah-daerah hijau ini tetap bisa keluar dengan baik, kira-kira itu proses-proses tidak sempurna tapi ada langkah darurat yang kami ambil. Langkah darurat itu antara lain ya memperketat lalu lintas dan jaminan-jaminan terhadap produksi itu termasuk dari beberapa penyampaian dari yang ada, Pak. Jadi saya kira itu yang terkait dengan masalah PMK.

Kemudian yang terakhir e-RDKK nanti dijawab oleh Dirjen-dirjen saya Pak, tapi e-RDKK itu kalau kan jumlah lahan Pak, enggak boleh berakhir, orangnya bisa mati namanya bisa berganti tetapi lahan tetap ada seperti itu sehingga tetap lahan itu yang harus membutuhkan pupuk begitu. Jadi orangnya bisa mati kadang-kadang menjadi 2, 3 dibandingkan dengan lahan yang berkembang. Jadi memang ada yang mati tapi seperti tapi Pak Dirjen nanti akan jawab seperti apa teknisnya dan kami siap menyesuaikan.

Sangat kami butuh tangan Pimpinan dan Anggota DPR untuk mempersiapkan kami *refocusing* anggaran. Sebenarnya ini yang memang kita mau sampaikan anggaran terhadap vaksin yang pasti kita butuhkan agenda darurat. Kami sudah lakukan sekarang termasuk mempersiapkan vaksin secepat-cepatnya walaupun belum vaksin yang kita buat sendiri, *Temporary* agenda semua wilayah akan kita vaksin seperti juga Covid dan *Recovery* agenda semua yang mati itu mudah-mudahan ada anggaran dari Komisi IV untuk kita alihkan untuk mengganti semua yang terkena dan kemudian kita hanguskan yang sudah ada kira-kira itu dari saya.

Pimpinan kalau masih ada dari Pak Sekjen silakan ditambahkan Dirjen yang dibutuhkan Pak izin Ketua. Saya kira dari saya itu. Mohon terus bimbingan dan saya kembalikan dulu untuk selanjutnya kami persilakan.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi jumlah yang kena PMK baru 50 ribu kata Dirjen PKH. Coba hitung di Jawa Timur sudah berapa, di Aceh sudah berapa? Orang Anda cuma ke lapangan datang foto foto foto pulang. Ada enggak tindak lanjutnya? Enggak ada. Jujur saya katakan. Saya kan setiap hari saya pantau.

Yang kedua, tadi Menteri mengatakan ke sana bicara masalah kedelai. Katanya ada 600 ribu pakai KUR, sudah berjalan berapa? Saya mau tahu berapa KUR-nya, bibitnya dari mana? Coba dijawab sekarang.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Izin lapor terkait perkembangan Pak Menteri, izin Pak Menteri.

Kedelai yang APBN 52 ribu hektar sudah kontrak semua 49 ribu dan ditanam sekarang..

KETUA RAPAT:

Yang saya tanya yang pakai KUR yang katanya 600 ribu hektar.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Pakai KUR 600 masih proses terus baru realisasi sedikit di daerah Kuningan.

KETUA RAPAT:

Ini sudah bulan Juni baru realisasi sedikit karena apa, bibitnya memang kagak ada di Indonesia, Bos. Kan sudah dari awal saya bilang membutuhkan 30 juta kilo untuk 600 ribu hektar. Maka tadi benar apa yang dikatakan Kiki, apa yang dikatakan Pak Slamet, di *Breakdown* dulu. Orang saya tahu *kok*, Pak Menteri bicara tadi yang ke Brazil bukan hanya masalah itu *kok* ya Dirjen ya. Anda jangan bohong, saya itu tahulah. Nanti kalau saya buka semua enggak enak di sini, ngomong tadi sudah bicara sama Perancis masalah vaksin. Hari ini peternak susu saja di Jawa Timur sudah menangis, yang sudah kena saja sudah 6 ribu peternak sapi susu dan kemungkinan akan terkena dalam waktu dekat kurang lebih jumlahnya 24 ribu. Kebayang enggak, ini enggak main-main loh. *Kok* tampaknya Dirjen PKH gampang bisa ditangani vaksin dalam negeri. Vaksin dalam negeri itu mesinnya itu beroperasi stop tahun 90. Teknologinya sekarang sudah 32 tahun. Terus pakai mesin apa? *Hah*, saya mau tahu. Mau pakai itu, mau pakai apa namanya orang bikin kue begitu? Coba saya mau tahu bikinnya bagaimana vaksinnya?

Harusnya Kementerian segera buat surat termasuk kepada peternak-peternak besar. Kalian boleh beli vaksin, beli langsung dengan ketentuan membantu wilayah sekitarnya untuk vaksin. Itu yang diperlukan. Segera suruh mereka beli, beli mandiri masing-masing. Minimal satu Kabupaten Anda bantu vaksinnya, kalau tidak, tidak saya rekomendasikan. Ini kan lebih baik jadi uang negara tidak terbuang sia-sia. Tadi pun kalau enggak saya usul kan untuk *refocusing*, tidak ada ini Dirjen PKH ngomong *refocusing* 3 juta vaksin. Beli dulu 1 juta, enggak ada artinya Bos dari jumlah 18 juta. Tadi Menteri mengatakan nanti ada tambahan anggaran dari Komisi IV untuk yang kena PMK mati diganti, saya enggak mau. Itu berarti wabah bencana nasional harus minta usulan tambahan karena uang kita sudah tidak cukup. Mau dipotong begitu lagi saya tidak menyetujuinya, tapi kalau untuk membeli pembelian vaksin *refocusing*, saya mungkin saya bersama teman-teman lain akan setuju karena untuk penyelamatan dulu tapi itu yang paling penting saya katakan tadi. Swasta disuruh beli dulu swasta beli.

Contoh yang kemarin ikut katanya ke Brazil, *Great Giant Livestock*. Nah, ya kan adanya di Lampung Tengah. Kamu beli vaksin minimal se-Lampung Tengah kamu bantu Pak vaksin apa peternakannya. Ini loh yang penting. Ini kan Dirjen nampaknya manggut, manggut, manggut seolah-olah enggak ada

apa-apa ini, ini akan bencana nasional loh. Yang saya pikirkan adalah Lampung Timur contohnya, Pak Hanan enggak ada ya. Lampung Timur itu ada badak, ada gajah, bisa enggak PMK-nya sampaikan, bisa. Coba termasuk harimau di kebun binatang misal di Surabaya bisa enggak tertular PMK? Bisa. Orang Covid saja dia bisa kena apalagi PMK. Ini bukan Tupoksinya Kementerian Pertanian tetapi kan kita harus menjaga semuanya, menjaga. Jadi Dirjen PKH ini cuma bisa manggut-manggut iya, iya, iya tetapi enggak punya solusi yang terbaik. Kalau saya tidak mengusulkan tadi ayo realokasi anggaran kita sisir butuhnya berapa, 3 juta, 3 juta kurang lebih berapa, satunya sekian euro kurang lebih 120 miliar. Ayo kita sisir sama-sama, kita fokuskan ke sana untuk, untuk pencegahan. Saya setuju, saya setuju ini loh.

Jadi silakan anggota yang mau bertanya.

F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Pimpinan, menambahkan saja sedikit.

KETUA RAPAT:

Tumben kamu ngomong.

Silakan.

F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Setengah menit saja, Ketua.

Melanjutkan terkait dengan wabah PMK itu kan.

F-P (.....):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar. Tunggu ini dulu.

F-P (.....):

Tunggu.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu dia duluan daftar.

F-P (.....):

Ya diatur dulu waktunya.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan setengah menit kata dia.

F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Jadi masih fokus kepada terkait dengan wabah PMK ini. Kemarin kan kita habis rapat juga sebelumnya dengan Komisi IV yang kemudian dari hasil rapat kita memberikan rekomendasi agar ditetapkan sebagai wabah PMK ini, sehingga dalam penanggulangannya dapat diusulkan ke kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk menggunakan anggaran tanggap darurat, Ketua. Untuk itu, kami juga mempertanyakan bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi yang kami berikan pada saat rapat sebelumnya. Kemudian apakah memang sudah komunikasi dengan Kementerian Keuangan atau bagaimana.

Terima kasih, Pimpinan itu saja Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya sekarang waktunya pendalaman. Pak Hermanto tolong dimatikan mic-nya Bapak, nanti saya kasih waktu.

Pak Sutrisno silakan. Setelah Pak Sutrisno baru Anda hidupkan mic-nya Pak Dr. Hermanto.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan,
Pak Menteri beserta jajaran,
para Dirut BUMN Pangan.

Apa yang tadi Pak Menteri jawab, saya belum mendapat jawaban apa yang saya dapat, apa yang saya pahami. Jadi apa yang saya dapat di masyarakat, apa yang saya pahami terkait dengan ruang lingkup membangun pangan di negeri. Yang pertama terkait masalah RKA, RKP Tahun 2023. Pak Menteri, dasarnya adalah itu kan dari indikator ekonomi dan juga angka fiskal kita yang juga disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Artinya apa? Setiap Komisi harus mengamankan itu. Pada dasarnya 2023 adalah 2023 itu antara untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, begitu. Kemudian target pertumbuhan 4 sampai 4 koma sekian. Nah, sektor pertanian akan tumbuh ini persoalannya ini, itu didorong dengan *Food Estate*. Ini makanya tadi dipersoalkan oleh Kapoksi saya. Targetnya tidak ubah berubah dengan apa yang ditargetkan di tahun 2022. Artinya apa? Dari situ saja kita mencerminkan bahwa target capaian ya *copy paste*. Mestinya kan target capaian itu evaluasi yang dicapai pada tahun kemarin berapa dan kedepan seperti apa.

Nah, oleh karena itu saya ingin mencermati daripada aplikasi dari sisi anggaran. Pak Menteri, bahwa apa yang dirancang oleh pemerintah itu kan diungkit dalam program anggaran dan program kegiatan. Pelaksanaannya Pak Sekjen ya sampai hari ini ya rencana anggaran tahun 2022 ini itu belum terealisasi. Alsintan belum terbagikan itu, benih-benih juga belum terbagikan begitu, dan persoalannya adalah di lapangan tidak sesuai program itu dijalankan tapi ternyata tetap dijalankan oleh Kementerian. Jawaban di daerah ini karena tetap pusatnya memaksakan untuk diteruskan. Mestinya itu kan diubah. Sebut saja di Majalengka begitu ya bawang bombay enggak bisa ditanam, 10 tahun jadi Bupati enggak bisa ditanam tapi anggaran itu tetap jalan. Nah, persoalannya anggaran-anggarnya dialirkan lewat Kementerian hanya terjadi tahun itu tidak berkesinambungan. Jadi bagaimana mungkin bisa memenuhi kebutuhan pangan.

Nah, oleh karena itu saya akan mencoba dari realisasi. Dari realisasi Pak Menteri, mestinya dari anggaran 2022 itu kan bisa memenuhi kebutuhan pangan kita. Yang terjadi adalah, yang terjadi adalah justru memenuhi kebutuhan pangan mayoritas dari impor mulai dari impor lembu ya bulan April 15.632 ton, uangnya 63,5 juta. Kemudian cabai, April cabai impornya itu 4.523 ton, uangnya 11,3 juta; jagung April 81.130 ton uangnya 27,5 juta; tembakau April 11.543,8 ton uangnya 53,4 juta. Ini Pak Pimpinan menjawab keraguan kami pada saat waktu evaluasi kesediaan pangan menghadapi bulan Ramadhan. Saat itu hanya disebutkan impor hanya 4 impor kedelai, bawang putih, gula pasir kemudian juga daging. Ternyata jagung, ternyata cabai itu juga impor. Saat itu kami dengan Pak Slamet mencurigakan ini jangan-jangan impor itu cabai karena tidak dihitung berapa, berapa saldo akhir apa stok cabai itu.

Pak Menteri, impor itu tidak mungkin dadakan berarti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sehingga walaupun kebutuhan di daerah mungkin bisa terpenuhi tetap impor dijalankan. Artinya apa? Ini bagaimana pemerintah mengedepankan kepentingan dalam negeri begitu ya. Nah, oleh karena itu, oleh karena itu Pak Menteri ya kalau kita memang ingin mempercepat menghapuskan pemiskinan esktrim itu adanya di Kementerian Pertanian ya, adanya di Kementerian Pertanian karena Kementerian Pertanian pada umumnya padat karya menyedot banyak orang ya. Jadi kalau impor dan impor ya pasti Pak Menteri ya produksi pangan kita tidak akan bisa bersaing dengan produksi luar karena mereka diproduksi dengan teknologi itu, kita dengan apa namanya dengan padat karya, harga pasti mahal itu.

Nah, oleh kemudian yang berikutnya Pak Menteri, impor ini menurut KPK Pak Menteri itu ya, kenapa terjadi impor, banyak penyalahgunaan itu menurut, menurut KPK, menurut KPK bahwa datanya tidak transparan dan tidak terintegrasi bahwa impor itu banyak celah-celah terjadinya korupsi. Untuk mengatasinya, untuk mengatasinya itu perlu dibuatkan sistem. Sistem yang bisa menampilkan data berapa kebutuhan pangan kita, berapa yang bisa dihasilkan oleh kita dan berapa impor kita. Nah, oleh karena itu pemerintah sudah merintis ke sana, mohon kalau Kementerian Pertanian sudah membuat tolong dilaporkan karena itulah yang akan bisa kita kontrol itu.

Selama ini uang-uang yang begitu banyak, mohon maaf Pak Pimpinan, saya tidak mempermasalahakan besar kecilnya uang, yang dipermasalahakan adalah bagaimana efektivitas penggunaan uang itu. Tidak ada korelasinya anggaran yang ada dengan peningkatan produksi pangan kalau dengan kondisi seperti itu. Apa yang sudah didasari pada birokrasi walaupun di lapangan tidak sesuai tetap dijalankan ini. Ini mohon dikontrol benar Pak Sekjen sebagai ketua tim anggaran Kementerian Pertanian, tanggung jawabnya ada di Sekjen.

Kemudian..

KETUA RAPAT:

Cukup? Pak Sutrisno, cukup?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ada satu lagi PMK ini Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan karena Bapak kemarin sama Pak Menteri lihat PMK kan soalnya.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ya PMK.

Pak Menteri dari awal saya minta, saya minta untuk dari mana penyebab terjadinya apa namanya virus itu. Tujuannya agar mempercepat penanganan dan tepat sasaran ya. Sampai hari ini ya kepada Komisi IV, Pak Pimpinan belum disampaikan sebabnya ini. Kemarin saya bicara di apa namanya TV Parlemen, dari Ketua umum DPP Pemotongan dan Pedagang Daging dengan gamblang menyampaikan kepada publik menurut Kementerian Pertanian bahwa sebab apa namanya hadirnya virus PMK ke negeri kita ini katanya, katanya karena impor ilegal domba, kambing dari Thailand dan Malaysia. Kami sendiri menanyakan tidak pernah dijawab ini ya tapi ternyata mereka dengan gamblang menyampaikan itu tapi saya menduga..

KETUA RAPAT:

Pak Sutrisno saya mau tanya, yang mengatakan siapa?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ketua Umum, Pak Asnawi, Ketua Umum..

KETUA RAPAT:

Dapatnya dari mana?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Dari Kementerian, dari..

KETUA RAPAT:

Siapa kementeriannya? Tunjuk saja.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KETUA RAPAT:

Ya kita nanti minta pertanggungjawaban dia.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Berarti ada yang lolos dari karantina.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Ya lanjut, sudah cukup?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Masih ada lagi.

KETUA RAPAT:

Ya sedikit lagi.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Tadi kan ada impor daging yang meningkat di bulan April ya. Nah, ini juga sebab, sebabnya kenapa ya jadi saya lagi mencurigai bukan hanya ilegal karena aliran itu kan Aceh pertama kali itu kena, Jawa Timur juga pertama kali kena karena pengiriman barang impor pada umumnya adalah ke Jawa Timur. Artinya apa? Peningkatan impor daging itu punya korelasi dengan hadirnya apa namanya virus itu.

Pak Pimpinan, saya buka surat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 itu tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 36c ayat (1) bunyinya begitu kan :”*pengaturan ternak rumentensial apa namanya indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dapat dari suatu negara atau zona dalam satu negara yang telah memenuhi syarat dan juga telah diatur pemasukannya*”. Artinya apa? Penyebab terjadinya virus ini karena memang kita membuka ruang menghadirkan daging, menghadirkan juga apa namanya ternak dari negara-negara yang tidak bebas PMK. Usul saya Pimpinan, undang-undang itu perlu ditinjau kembali.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya.

Terima kasih.

Nanti dijawab sama PKH karena katanya tadi dari domba dari Thailand dan Malaysia tapi jauh banget kalau tiba-tiba dombanya dari Thailand dan Malaysia langsung lari ke Jawa Timur.

Pak Hermanto Doktor ayo ngomong.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pak Ketua, salam selalu.

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pak Menteri, Pimpinan dan Anggota Komisi IV,

Pertama saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri jawaban terkait dengan pertumbuhan sektor pertanian. Saya ingin memberikan catatan pertama bahwa anggaran kita di tahun 2021 itu adalah 15,5 triliun. Pertumbuhan sektor pertanian adalah kisaran 2,5% di tengah, yang lain juga memang negatif. Kemudian, itu dalam suasana pandemik. Nah, sekarang ini di 22 ini anggaran kita adalah turun dari 4 dari 15 ke 14,4 triliun. Pertumbuhannya sekarang hanya baru kisaran 2%-an itu anggarannya tinggi Pak Menteri pertumbuhannya adalah sekian pada masa pandemi, tapi pada saat sekarang ini anggaran kita turun 13,37 triliun. Kemudian target pertumbuhan adalah 4 sampai 4,2%. Pertanyaan saya di tengah anggaran pertanian itu sedang turun, apakah pertumbuhan pertanian akan naik? Ini pertanyaan mendasar, Pak Menteri.

Saya pikir data yang disampaikan oleh Pak Menteri ini adalah tidak lain dari apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menargetkan sebesar itu tapi Pak Menteri harus berhitung secara realistis anggaran ini ada korelasinya dengan pertumbuhan itu. Jadi bila Pak Menteri misalnya anggarannya turun selalu didesak untuk naik 4%, saya pikir nanti ini

adalah akan terganggu kinerja Pak Menteri sendiri. Jadi pertarungan Pak Menteri di hadapan kolega menteri yang lain dan juga di hadapan petani. Nah, saya minta ini supaya ini Pak Menteri diminta harus serius untuk bekerja keras dengan anggaran terbatas kemudian pertumbuhan yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, saya minta supaya Pak Menteri harus memilih program-program yang memiliki dampak langsung atau memiliki *leverage* atau daya dongkrak yang tinggi terhadap untuk mencapai pertumbuhan itu. Bila tidak saya meyakini ya memprediksi program kementerian ini akan gagal total.

Nah, oleh karena itu saya minta supaya apa yang menjadi program utama kita sekarang ini itu adalah bagaimana kita mengatasi pupuk. Ini pupuk ini adalah faktor pendongkrak. Yang kedua itu adalah Pak Menteri harus mengatasi masalah infrastruktur pertanian. Yang ketiga bagaimana mengurangi *Food Estate* ini anggarannya karena dia tidak berdampak kepada pertumbuhan, sangat kecil sekali ini dampaknya. Nah, kemudian saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan program Kementan ini yang terkait dengan program pertama, program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Kemudian saya melihat relasinya dengan apa yang disampaikan oleh ID Food. Saya melihat ini programnya sudah salah fokus ya. Kita basis kita itu adalah kedaulatan pangan tetapi yang terjadi sekarang ini adalah ketersediaan pangan. Ini dua *mindset* yang berbeda Pak Menteri. Pak Menteri boleh melihat lagi Undang-Undang Pangan kita ya. Ini dua hal yang sangat berbeda.

Nah, saya melihat relasi apa yang disampaikan oleh ID Food ini semuanya importasi ini. Saya melihat di sini ada importasi gandum, ada importasi *low sugar*, ada importasi daging, ada importasi sapi bakalan. Jadi ini programnya adalah program pengadaan bukan program kedaulatan, ini beda Pak Menteri. Jadi kalau cuman hanya ketersediaan memang benar bahwa kementerian atau program pertanian kita ini adalah dasarnya semuanya impor. Inilah yang menyebabkan petani kita kecewa berat. Kenapa kecewa berat? Karena pada saat petani itu panen ya harga itu turun, karena apa, karena faktor masuknya barang impor ke sektor pertanian kita sampai kepada sektor-sektor pasar yang biasanya tradisional ini dipenuhi oleh produk-produk pertanian petani domestik tapi sekarang diisi oleh produk-produk pertanian dari impor. Inilah yang menyulitkan dan tidak semangatnya petani kita untuk bertani. Oleh karena itu, saya minta ya Pak Menteri mohon sekali lagi untuk bisa meningkatkan daya serap produk pertanian domestik. Saya minta ada teknologi dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas produk-produk pertanian kita ini sehingga bisa diterima oleh sektor industri.

Saya meyakini program Pak Menteri Pertanian ini yang terkait dengan peningkatan pangan berkualitas ini, ini orientasinya saya minta supaya ada penekanan terhadap peningkatan produk pertanian yang berkualitas sehingga dia bisa diserap oleh sektor industri dan ini adalah upaya kita untuk mengurangi ketergantungan impor.

Oleh karena itu, saya minta Pak Menteri ini mohon perhatiannya, yaitu terkait dengan soal-soal ini terutama soal PMK ini segera diselesaikan ini PMK ini juga kalau kita gagal ini juga mengabaikan nanti capaian pertumbuhan kita

juga gagal. Oleh karena itu, pada saat menjelang Idul Adha ini saya minta juga Pak Menteri ini berkoordinasi dengan MUI. Bagaimana meminta fatwa supaya dengan kondisi PMK seperti ini apakah sapi kita bisa menjadi bisa di menjadi hewan kurban atau tidak karena ini yang sangat penting. Bila tidak ini nanti akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan sektor pertanian kita.

Kemudian saya melihat ada beberapa program yang di sini, saya tidak melihat lagi ada perkembangan anggaran berkaitan dengan Penas. Beberapa tahun yang lalu sebelum Covid, Penas ini sudah dianggarkan tetapi saat sekarang ini sudah tidak ada saya lihat karena Penas ini sangat penting karena ini berkaitan dengan soal konsolidasi dan koordinasi teknologi dan kemampuan sumber daya manusia sektor pertanian kita untuk bisa ber kompetisi di sana. Saya pikir ini sangat penting saya minta supaya ada muncul lagi anggaran Penas di sini.

Demikian, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya Pak Daniel Johan.

Saya berharap setelah pertanyaan ini kita *break* ishoma, setelah ishoma setelah itu balik lagi.

Ya silakan.

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Ya terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, segenap Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri dan seluruh jajaran.

Yang pertama adalah sejauh mana rencana darurat antisipasi yang sudah dirumuskan dan akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk menghadapi kemungkinan krisis pangan dunia yang semakin nyata saat ini? Sehingga pada saat itu terjadi Indonesia enggak kelabakan, Pak karena faktanya adalah kemandirian kedaulatan pangan kita kan masih belum terwujud. Kita masih baru pada ketahanan pangan tetapi pada saat dunia kekurangan pangan, nah itu harus kita antisipasi dengan baik.

Usul saya ada dua hal yang mungkin bisa kita lakukan, yang pertama adalah program memanfaatkan pekarangan lahan-lahan kosong itu menjadi sangat penting. Yang kedua, Kementerian Pertanian harus benar-benar

mengkoordinasikan seluruh pemerintah daerah di Provinsi hingga Kabupaten Kota bagaimana mereka memiliki anggaran mengantisipasi dengan cadangan pangan di tingkat bawah ya. Jadi dua hal ini menjadi sangat penting, mudah-mudahan Pak Menteri juga bisa membawa ke dalam rapat kabinet, apalagi kalau suasana dunia semakin lama berlarut-larut.

Nah yang kedua, ini menyangkut yang pertama tetapi paradoksnya adalah anggaran Kementerian Pertanian bukan bertambah makin berkurang, Pak. Ini kita benar-benar timnya Pak Menteri ya Eselon itu bagaimana komunikasinya dengan Bappenas dengan Kementerian Keuangan. Saya rasa itu harus diperkuat dari tahun ke tahun. Kemarin KKP saja meskipun turun tapi kan mereka ada peningkatan dan ada usulan penambahan. Jadi mudah-mudahan antisipasi dalam konteks pangan apa bencana pangan dunia itu menjadi jalan pintu efektif ya untuk peningkatan anggaran.

Yang ketiga, saya mohon ini sebenarnya program yang sudah *continue* yaitu jeruk di Dapil saya Pak, karena itu menjadi salah satu prestasi Kementerian Pertanian yang kita harapkan Kementerian Pak Menteri bisa melanjutkan tetapi menjadi sulit karena apa ada surat dari Direktur Pupuk dan Pestisida kepada PI itu yang membatasi. Nah, jeruk itu enggak termasuk, Pak. Saya mohon jangan sampai ada pembatasan sehingga berdampak terhadap nasib sejumlah petani termasuk petani jeruk.

Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi catatan penting bagi kementerian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Ansi Lema silakan, terakhir nanti Ibu Alien. Setelah itu kita *break*.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua.

Rekan-rekan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen dan jajarannya,
Para Direktur BUMN ya yang terkait dengan pertanian, peternakan dan seterusnya.

Yang pertama dalam kegiatan utama Kementan tahun 2023 di bidang tanaman pangan Pak, disitu dinyatakan bahwa Kementerian Pertanian akan

membangun kawasan jagung hibrida untuk mendukung *integrated farming export*. Ya terus terang Pak, saya beberapa kali bicara bahwa kita perlu juga punya fokus untuk mengembangkan benih-benih lokal. Jagung hibrida kita tahu ini kan benih pabrikan, tentu kalau dari aspek kuantitas masifnya ya bisa terpenuhi. Dari ketersediaan bisa menjawab, tapi terus terang, Pak dalam jangka panjang ini kalau terus-menerus kita bergantung pada benih-benih pabrikan seperti ini, petani kita ini akan terus *dependent*, tergantung dan menjadi tidak mandiri. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan yang dikatakan oleh Pak Daniel Johan atau juga Doktor Hermanto. Paradigma kita ini sekadar ketahanan pangan orientasinya pada ketersediaan atautkah pada kemandirian dan bahkan kedaulatan.

Konkret saya laporkan, kemarin saya WA sama Pak Dirjen Tanaman Pangan Pak Suwandi, "Pak, tolong dong saya butuh benih jagung komposit (jagung pulut) dari NTT karena sudah mau nyaris punah." Pak Dirjen jawab, "Silakan hubungi Pak Yayat". Staf saya hubungi Pak Yayat, Pak Yayat jawab dengan santai "Tidak ada". Saya membaca jawaban "tidak ada" itu berarti tidak ada keseriusan kita untuk berpihak kepada pengembangan benih-benih lokal kita. Nah, kita jangan terus-menerus bergantung. Mungkin sederhana ini tetapi terus-menerus saya sekarang sudah mulai mikir, saya sudah enggak mau terima lagi ini hibrida, hibrida terus menerus. Tolong dikembangkan benih-benih lokal ini ya. Kalau di, sekarang kita cek di daerah itu sudah tidak ada benih lokal lagi ya. Poin saya adalah silakanlah hibrida itu, Pak karena soal ketersediaan masih dan sebagainya tetapi tolong jangan dilupakan benih lokal kita ini identitas kita. Pangan-pangan lokal kita ini harus kita bangkitkan Pak, satu.

Yang kedua pada paparan halaman 3 ditulis sektor pertanian akan tumbuh positif dengan berlanjutnya kebijakan pengembangan *Food Estate* serta program gerakan tiga kali ekspor dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor produk sektor pertanian. Konkret, ya kita ingin mintalah *success story* Pak, data-data keberhasilan dari *Food Estate* ini. Saya, Sumba Tengah sudah saya datangi, Belu pun sudah saya datangi Pak. Saya juga punya data soal ini. Nah, jadi kalau di mau diteruskan mengenai Program *Food Estate* kan kita perlu lihat prestasi capaiannya apa sehingga layak. Kali lalu saya sudah omong soal yang di Belu itu, Pak. Saya sudah cerita juga di sini dan terus terang saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai kita hanya melakukan repetisi program dari tahun ke tahun tetapi evaluasinya itu mungkin agak *loss* kita lakukan. Saya secara pribadi mendukung tentu Kementerian Pertanian, sejauh program-program ini memang punya manfaat bagi daerah dan masyarakat Pak, tetapi tolong ini juga harus dievaluasi kalau memang tidak berjalan secara optimal. Jadi data *before*, *progress*, dan *after*-nya itu, itu kita butuhkan betul-betul.

Yang berikut soal PMK, Pak. Saya meyakini kepergian Pak Menteri dan jajarannya ke Brazil pasti ada alasan mendasar. Pasti ada alasan mendasar. Hanya saya kemudian coba mencerna Brazil ini bagi saya kan negara yang belum bebas PMK. Kalau mau orientasi belajar studi banding berarti kita harus studi banding ke mereka yang punya *success story*. Saya kalau mau belajar kan belajar ke orang yang lebih pintar dari saya, orang yang sudah berhasil

yang bisa menjadi teladan dan model buat saya. Pertanyaan saya, apa urgensi kita mengunjungi Brazil kalau di Brazil sendiri belum bebas PMK. Mengapa misalnya tidak ke negara lain Australia dalam hal ini Pak yang sudah terbukti bisa bebas. Nah, lalu apa hasil pembelajaran beberapa hari dari sana Pak? Tolong kami di-*share* soal ini sehingga pada saat kami juga ditanyakan oleh media massa atau publik kami juga bisa menjelaskannya secara baik.

Yang berikut Pak Menteri, halaman 5 di sini dari kegiatan program para Dirjen, di Dirjen PKH itu Pak Nasrulloh memang saya tidak melihat ada program prioritas terkait dengan PMK ini. Lalu mendengar penjelasan Pak Menteri juga Pak Menteri katakan baru 40 ribu, sementara ternak kita 18 juta. Saya simpulkan bagi Kementerian Pertanian, PMK ini tidak pentinglah atau sederhana. Saya ingat betul kemarin saya sudah kembangkan satu wacana paradigma. Melihat PMK tidak semata dari aspek mortalitasnya, melihat PMK itu harus melihat dalam dampak multidimensionalnya termasuk *image* internasional terhadap negara-negara yang tidak bebas PMK.

Saya ingin tambahkan, PMK ini masuk dalam *airborne disease*. Kecil, cepat, ratusan kilometer, dan penularannya ini bisa mengkhawatirkan, Pak. Jadi 40 ribu menurut Pak Menteri itu kecil, menurut saya itu besar karena sifat dari *airborne disease*. Yang kedua, kalau tidak besar kenapa Gubernur Jawa Timur itu mengumumkan Jawa Timur itu dengan status yang betul-betul harus siaga, begitu loh Pak. Lalu kalau ini tidak penting, Pak Ketua, kenapa harus ada pikiran untuk melakukan *refocusing* atau realokasi anggaran untuk mendukung hal ini. Kalau saya sendiri sih menganggap ini penting. Belum lagi kalau kita bicara pada aspek fenomena gunung es. Kita tahu lah negara kita ini lemah dari segi data. Kita yakin cuma 40 ribu? Dan 40 ribu menurut saya besar karena sifat penularannya yang sangat cepat, masif, meluas, apalagi bicara vaksin itu setelah kita bisa mengidentifikasi dari mana asal muasalnya. Ini saya ulang lagi pembicaraan saya ini, saya ulang lagi. Kalau belum bisa mendeteksi asal muasalnya akar soalnya bagaimana bisa kita menghasilkan vaksin? Apalagi mutasinya ini sangat cepat. Saya mohon maaf karena ya terkesan ini kita dari diskusi yang kali lalu Raker dan hari ini, mohon maaf Pak Menteri saya lihat tidak ada hal yang baru, tidak ada hal yang baru.

Yang terakhir informasi saja, mohon informasi dari Pak Dirjen PKH. Pak Dirjen ini kebetulan Pak Presiden lagi ke Sumba Timur ini. Saya ingin tahu itu Sapi Sumba Ongole nasibnya sudah kayak gimana ini sudah lebih dari setahun ini ya kan. Semoga Pak Presiden pulang dari sana ada sesuatu yang konkretnya buat rakyat saya di NTT lah. Jangan datang melulu ke NTT, datang melulu 13 kali, 15 kali, pulang juga enggak jelas-jelas juga kan begitu. Nah, ini saya terus terang omong ya apa adanya lah.

Yang terakhir, Pak Ketua terakhir soal importasi. Ya tadi saya menyambung yang Pak Sutrisno katakan. Dalam pikiran saya impor itu baru dilakukan kalau produksi dalam negerinya tidak mencukupi, yang kedua kita tidak bisa memproduksi. Tetapi pertanyaannya kemudian kenapa produk-produk pangan ataupun hortikultura yang bisa kita produksi pun ternyata angka impornya juga cukup besar Pak Menteri? Saya tahu bahwa urusan impor ini tidak melulu ada di Kementerian Pertanian, saya tahu, tetapi mungkin kita juga

perlu pasang badan untuk kadang-kadang juga lebih tegas untuk mengatakan ya kalau kita mampu produksi dalam negeri dan kuantitasnya ada jangan lagi dong diimpor. Kalau impor ini kan membuat akhirnya petani kita juga rugi dan seterusnya tinggal bagaimana kita menjamin dari segi distribusi dan juga dari segi harga.

Saya kira demikian.

Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.

KETUA RAPAT:

Saya maafkan. Selanjutnya Ibu Alien Mus.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Biasanya kita kalau dikasih di saat-saat mau ishoma itu enggak bisa banyak bicara tapi karena diberikan kesempatan diberikan jadi sudahlah.

Yang saya hormati Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Komisi IV, Pak Menteri beserta jajarannya, Dirut ID Food, Pupuk Indonesia (PIHC) dan ada Bulog juga Bu Febi dan yang lainnya enggak bisa sebut satu per satu.

Saya ingin mempertegaskan saja karena memang kita dalam keadaan tahun 2022 pandemi Covid juga belum jelas kapan selesainya tapi *Alhamdulillah* setelah mendapatkan vaksin tiga kali sudah dibolehkan memakai, tidak memakai masker di luar.

Pak Menteri PMK ini tentunya harus menjadi atensi yang luar biasa dari Kementerian Pertanian dimana memang yang sudah disampaikan Pak Menteri dan tidak perlu lagi saya mengulangi vaksin dan juga desinfektan untuk peternakan sapi maupun kambing dan domba ini sangat penting. Kenapa tidak? Bagaimana kita mau berbicara tentang ketahanan pangan sementara daging yang kita konsumsi saja tidak bisa kita pastikan kesehatannya.

Kedua, tahun 2023 sebentar lagi tentunya di sini enam bulan sisa penyerapan anggaran tahun 2022 Pak Menteri. Sering kita sampaikan bahwa beberapa kegiatan yang ada di Eselon 1 yang tidak bisa diserap pada akhir tahun tolong dievaluasi dan mungkin dialihkan untuk penganggaran vaksinasi penanganan kasus PMK.

Kemudian tadi sudah disinggung soal kedelai. Kedelai ini selalu menjadi masalah setiap kali rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat. Tentunya ini menjadi kendala bagi kita dari tahun ke tahun. Pak Dirjen sudah menyampaikan buku ke saya tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan kedelai, tapi sampai saat ini saya yakin dan percaya kejadiannya akan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pak Ketua, kalau saya lihat dari pemaparan dari Kementerian Pertanian dan juga dari Dirjen PKH untuk PMK ini kayaknya bisa ditangani Pak Ketua tapi kemarin tiga daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat melakukan satu *warning* bahwa PMK ini untuk mereka darurat. Pak Nasrullah ini jangan dianggap enteng. Saya enggak tahu bagaimana kemarin saya membaca berita bahwa ada negara-negara tertentu melarang warganya untuk masuk di Indonesia. Jangan-jangan salah satunya karena PMK juga ini, bisa jadi, bisa jadi. Ini jangan menjadi satu masalah yang dianggap sepele. Maka dari itu Pak Menteri, lewat rapat kerja ini saya harapkan, saya harapkan atensi yang luar biasa untuk penanganan PMK ini harus dimulai dari sekarang. Kalau memang tadi kata Pak Menteri kita butuh vaksin untuk dibuat dalam negeri tapi setidaknya penanganan sejak awal ini apa langkah konkretnya. Tadi sudah disampaikan Ketua bahwa mungkin bisa diberikan surat atensi kepada seluruh peternak yang ada di Indonesia untuk menyiapkan desinfektan dan vaksinasinya. Kan nanti bisa didata, Pak pengusaha-pengusaha peternak yang besar. Ini jangan dianggap enteng.

Kemudian tentang importasi yang tadi dibicarakan disinggung. Cabai yang diimpor itu sesuai data berapa sih Pak? Jagung yang diimpor itu berapa? Sesuai data riil BPS dan juga yang hasil pertanian yang kita punya juga di Komisi IV. Ini dengar-dengar lagi Pak Ketua, selain impor, impor cabai, bawang merah yang berbentuk bawang bombay berbentuk bawang merah apakah itu namanya saya juga bingung, kemarin masuk lagi di Indonesia. Ini bagaimana nih karantainya ini? Anda itu pintu daripada importasi setiap barang-barang yang masuk di Indonesia. Jangan santai-santai saja.

Kemarin saya baca berita lagi ada ekspor cicak dari Sumatera Barat. Itu dijelaskan langsung oleh Badan Karantina. Saya kemarin *sharing* di Komisi IV itu Sumatera Barat. Tidak apa-apa kalau menguntungkan bagi warga negara Indonesia tapi apa aturannya ada? begitu. Jangan sampai kita ekspor ke sana ada lagi masalah dari Indonesia entar nanti semuanya dari Indonesia semua ditolak barang-barangnya. Kita impor-impor saja semua, sampai orang-orangnya pun kita impor.

KETUA RAPAT:

Termasuk dari Perancis begitu?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Bapak jangan tambah-tambah Bapak. Saya serius ini apalagi tadi sempat disinggung oleh Mas Slamet bahwa di Kementerian Perekonomian ada melakukan satu kegiatan tentang pertanian untuk ketahanan pangan. Ya jelas, semua yang ada di Indonesia dan pemerintahan ini punya wajib dan sama-sama untuk menyiapkan ketahanan pangan *wong* kita juga dari 100%, 60% ketahanan pangan kita impor *kok*. Tugas dan tanggung jawab kita sekarang apa di Indonesia ini. Kita ini sebenarnya bangsa yang besar yang luas dan subur tapi dalam hal mempersiapkan kebutuhan perut kita saja kita enggak sanggup. Kalau melawan kita enggak perlu pakai bom, cukup untuk menyetop impor kita semua yang ada di Indonesia ini mati. Makanya kalau Pak Menteri

berbicara tentang kita harus mempersiapkan ketahanan pangan memang betul Pak Menteri, memang betul tugas Bapak di pundak Bapak ini sangat besar Bapak. 267 juta jiwa yang bergantung di pundak Bapak sekarang ini. Orang bisa sakit tapi pasti bisa sembuh, tapi kalau perut sudah lapar semuanya bisa terjadi perang pun bisa terjadi. Makanya..

KETUA RAPAT:

Masih panjang Bu Alien?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Enggak ini jangan Bapak potong-potong, Golkar baru dua orang yang bicara.

KETUA RAPAT:

Saya tanya masih panjang apa enggak?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Makanya tadi saya bilang kalau saya yang bicara di akhir-akhir begini pusing saya.

KETUA RAPAT:

Ya sudah lanjutkan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Kalau begitu setelah..

KETUA RAPAT:

Kan saya tanya, masih panjang atau enggak?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Setelah *break* saja Pak, saya lanjut.

KETUA RAPAT :

Ya sudah oke.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Dhevy Bijak. Silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Wah begini Bapak enggak-enggak adil ini Pak.

KETUA RAPAT:

Bukan tadi ini terselip.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Aduh Pak Ketua lain kali jangan begini lah Pak, saya tersinggung ini.

KETUA RAPAT:

Ya kalau tersinggung ya pulang saja sana. Masih ditunggu di Perancis *kok*.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Tempat vaksin Pak?

F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati dan yang saya banggakan, Kemudian dari Kementerian Pertanian Pak Menteri, Pak Sekjen beserta seluruh jajaran Eselon I Eselon II. Kemudian dari beberapa Dirut dari BUMN yang hadir tentu yang saya hormati dan yang saya banggakan pula.

Seperti yang disampaikan teman-teman tadi sebenarnya secara ini sudah, sudah tersampaikan tapi ada beberapa yang ingin terus kami perjelas. Yang pertama, waktu kita rapat sebelumnya juga pun kita di Komisi IV bersama dengan Kementerian Pertanian meminta kejelasan terkait dengan virus PMK ini masuknya sebenarnya seperti apa, karena jawaban dari Kementerian Pertanian yang pada saat kita tanyakan ini kejelasan terkait dengan PMK ini dari Kementan sendiri menjawab bahwa sementara ditelusuri. Oleh karena itu, kami pun sekarang juga menagih langsung kembali sebenarnya virus PMK ini berasal dari mana? Itu yang pertama.

Yang kedua, menarik yang disampaikan oleh Kakak Alien tadi dan beberapa pendahulu terkait dengan kedelai ini. Jadi pada tahun 2023 kembali Kementan menargetkan kembali produksi kedelai sebanyak 0,555 juta atau 550 ribu ton yang meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya sementara dukungan anggaran yang menurun. Ini yang menjadi pertanyaan kami seperti

apa strategi di Kementan untuk meningkatkan produksi kedelai ini. Sementara tiga tahun sebelumnya seperti 2020, 2020 yang ditargetkan produksi itu 420 ribu ton dan hanya tercapai 290 ribu ton. Kemudian 2021 pun juga yang terealisasi jauh, 2021 mengurangi target produksi kedelai menjadi 290 ribu ton, dan pada tahun 2022 target produksi lagi menjadi 2 ribu ton. Sementara ini hampir tiga kali lipat meningkat target produksinya. Ini menjadi pertanyaan kami, bagaimana Kementan strateginya Kementan untuk mencapai target tersebut?

Kemudian selanjutnya pada penyampaian Bapak tadi, Pak Mentan tadi terkait dengan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terkait kegiatan mitigasi, ini poin kedua, rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman pohon, buah-buahan dan tanaman perkebunan. Yang menjadi pertanyaan kami, daerah mana saja yang kira-kira nanti menjadi tempat dan kemudian kita harus mengetahui kami dari Komisi IV ini, Komisi IV ingin mengetahui daerah mana saja kemudian masyarakat tentu ingin mengetahuinya dan kemudian kalau bisa nanti kami usulkan untuk kami Anggota Komisi IV untuk kunjungan ke sana tempat-tempat yang di dilaksanakan program tersebut.

Kemudian melanjutkan apa yang disampaikan tadi Kakak Yessy terkait dengan penyuluh petani. Saya pun beberapa kali disampaikan oleh beberapa teman-teman penyuluh terkait dengan BOP mereka, Pak yang sampai sekarang ini masih memprihatinkan, sementara di kegiatan utama Kementan 2023 ini enggak ada sama sekali untuk penganggaran penyuluh ini. Kami mohon untuk lebih diperhatikan karena kita tahu bersama penyuluh pertanian ini masih di sekitar 400 ribuan untuk per bulan mereka gajinya. Itu sangat memprihatinkan buat kami, apalagi mereka sudah jarak tempuh mereka untuk penyuluhan dan kemudian berbagai macam kebutuhan di lapangan mereka butuhkan tapi biaya operasionalnya yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, kami memohon kepada Kementan untuk lebih memperhatikan teman-teman penyuluh ini.

Mungkin itu saja Pimpinan yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.

*Fastabiqul khairat,
Hadanallah wa iyyakum ajma'in,
Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Cukup? Cukup ya kita *break* dulu.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Sedikit saja Pak Ketua, sedikit saja, boleh tidak? Terakhir saja Ketua, terakhir.

KETUA RAPAT:

Setengah menit.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Oh, siap.

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi IV,
Yang saya hormati Pak Menteri beserta Eselon I,
Yang saya hormati Direktur BUMN,
Yang ..

KETUA RAPAT:

Kalau bisa langsung saja ke pertanyaan.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Oh, siap Pak.

Ini tadi saya mencermati apa yang dalam pidato Pak Menteri di sini ya prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Nah, mencermati untuk kegiatan utama Kementerian Pertanian tahun anggaran 2023 di sini saya melihat dalam Direktorat Tanaman Pangan di sini halaman nomor 5 ya pengembangan kawasan Porang ini apa kabar Bapak ya kan. Nah, ini sejauh mana ini pengembangan kawasan Porang yang untuk ekspor ini. Nah, hasilnya sejauh mana?

Yang kedua, di sini tadi saya juga ini dalam peternakan juga pengembangan desa korporasi sapi itu seperti apa? Ini tidak dijelaskan. Nah, untuk pengembangan taksu Alsintan itu seperti apa juga? Ini banyak sekali program-program yang belum kita ketahui dan kita tidak paham.

Nah yang keempat, nah ini dia program irigasi pertanian sebagai upaya adaptasi dan mitigasi. Nah, di sini saya melihat Pak Ketua serta Anggota dalam halaman 12 ya dalam halaman 12 ini jaringan irigasi tersier sebanyak 300, 3.600 unit nah sementara pada halaman 25 persentasenya sama ditulis bahwa Kementan akan membangun 3.212 unit jaringan irigasi tersier. Saya jadi agak bingung nih Pak, kira-kira ini bedanya apa ini? Di sini 3.600 tetapi di sini tertulis 3.212, nah ini tolong, tolong dijelaskan. Nah, ini anggaran juga semua harus dijelaskan ini, anggaran ini 240 miliar. Jadi tolong minta penjelasannya.

Demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Jadi nanti tolong para Eselon I siapkan jawabannya. Jawabannya terserah mau benar mau enggak, mau mengarang bebas ya silakan ya. Saya hanya mengingatkan kami ini semua punya data pegang data ya.

Sementara kita skors dulu. Kita kembali ke tempat ini.

F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Pak satu menit boleh Pak.

KETUA RAPAT:

Ya Bu silakan Bu. Jangan masalah Perancis lagi Bu.

F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Enggak. Saya singkat saja Pak Ketua.

Tadi dikemukakan oleh Pak Menteri tentang dan juga diantisipasi oleh Pak Lema bahwa potensi lokal, Pak yang diutamakan untuk kedaulatan pangan kita. Nah, belum disebut tentang prioritas untuk Picung Pak, padahal saya sudah kembangkan dan dari Direktorat Jenderal PSP sudah melihat nah tapi tidak ada perkembangan selanjutnya. Padahal, Picung itu cukup diminati oleh peneliti-peneliti asing. Nah, ini saya harus antisipasi supaya plasma nutfahnya terdeteksi dengan baik. Bojongpicung Pak sampai kecamatannya namanya Bojongpicung. Picung itu kluwak Pak. Nah, ini kan sangat disayangkan kalau di Kementerian Pertanian tidak dikenal.

Nah, yang kedua tentang gerakan nasional ini dari ibu-ibu ini Pak yang gelisah dengan adanya minyak yang mahal. Gerakan nasional kelapa kita ini Pak belum diprioritaskan. Jadi ibu-ibu sudah siap terutama di Agrabinta yang banyak kelapanya tapi gerakannya belum tersosialisasikan dengan baik.

Hanya itu, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saya skors. Kembali ke ruang selambat-lambatnya pukul 14.30 WIB.

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.30 WIB)

(SKORS RAPAT DICABUT)

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Siapa duluan, Sekjen atur.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Terima kasih Pimpinan.
Pak Menteri, mohon izin.

Ya nanti berurut dari Dirjen Peternakan, Tanaman Pangan, PSP, ada beberapa pertanyaan tadi.

Tapi sebelumnya mohon izin Pak, ada beberapa yang berkaitan dengan Kesekjenan. Yang pertama kaitannya dengan PHLN tadi dari Bu Kiki. Kami sudah siapkan nanti kami sampaikan pada Bu Kiki berkaitan dengan pinjaman luar negeri ini, Pak. Pak Menteri, Pak Pimpinan, itu ada di 4 Eselon I Badan SDM, PSP, Litbang dan Hortikultura. Nanti detailnya kami sampaikan datanya kepada Bu Kiki.

Kemudian mohon, mohon waktu untuk nanti menyampaikan yang berkaitan dengan PNBPN juga tadi menjadi pertanyaan Bu Kiki.

Ya, saya kira itu yang dari Kesekjenan.

Kami persilakan dari Pak Dirjen PKH. Silakan Pak.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Terima kasih, Pak Sekjen.

Izin, Pak Menteri.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,

Mohon izin menyampaikan beberapa hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam pendalaman tadi. Yang pertama seperti yang disampaikan Pak Menteri bahwa PMK ini kita sangat serius menangani Bapak/Ibu sekalian dan kita telah menetapkan beberapa langkah mulai dari keadaan darurat sementara atau *temporary* dan *recovery*. Untuk langkah darurat saja kita sudah membuat 6 langkah-langkah yang pertama adalah penetapan gugus tugas dan posko di setiap Provinsi dan Kabupaten, ini dalam rangka untuk memonitor secara langsung dan memvalidasi data yang ada sampai ke posko nasional. Kemudian pembatasan dan pengaturan lalu lintas keluar masuknya ternak dan itu sudah merupakan surat edaran juga dari Badan Karantina sehingga pengaturan baik darat, laut maupun udara dapat kita kendalikan sehingga khususnya untuk wilayah-wilayah darat kita bisa meminimalkan penyebarannya.

Kemudian untuk penanggulangan awal, distribusi obat dan desinfektan serta vitamin juga dilakukan dan saat ini telah kita salurkan sekitar 31 ribu dosis

obat-obatan, vitamin, dan desinfektan. Kemudian *Insyah Allah* mudah-mudahan dalam...

KETUA RAPAT:

Loh tadi yang kena katanya 50 ribu, yang baru dikasih obat baru 31 ribu, besok dari 50 ribu jadi 500 ribu ini kalau cara begini. Saya tanya lagi, posko-posko pencegahan itu yang biayain siapa? Apakah kementerian atau Provinsi atau Kabupaten apa karantina? Misal karantina, karantina punya uang untuk menjaga 24 jam? Contoh sapi akan dibawa ke Jakarta melalui Pelabuhan Bakauheni, mereka tidak jalan biasa, di jalan tol tidak ada yang menjaga. Keluar tol langsung masuk beli tiket masuk kapal. Cegatnya di mana? Kalau dulu waktu Covid-19 pencegatannya jelas di *rest area*. Seluruh mobil penumpang bis dan lain-lain masuk ke *rest area* itu pun sekarang sampai sekarang masih menyisakan masalah. Biaya operasionalnya ini siapa yang menanggung? Apakah karantina punya duit? Okelah kalau unit mobil mungkin keliling-keliling mencegat yang bawa sapi ya bisa tapi operasionalnya cukup tidak? itu saja. Anda bacalah di media bahwa sapi dari Jawa Timur ke Jakarta jangan jalan biasa ada pos, jalan tol enggak ada pos itu saja. Paling enggak ada pengetatan misalnya Jawa Timur dicegat di Jawa Tengah sama jalan tol. "Oh bawa sapi", cekat dulu, tanyakan surat menyuratnya. Apa sudah ada bebas PMK, apa ada surat dari karantina ini kan enggak ada. Cobalah pikirkan itu.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Baik, kami jadikan saran-saran Pak Ketua akan menjadi pertimbangan kami untuk memperketat lalu lintas ini.

Kemudian tentunya antisipasi untuk kurban telah kita lakukan setiap tiga hari. *Update-update* informasi dari seluruh dinas potensi-potensi ketersediaan dan jalur-jalur yang bisa dimasuki atau dilalui oleh ternak-ternak tersebut untuk sampai ke tempat tujuan dengan mengkoordinasikan dengan pihak teman-teman karantina yang ada di masing-masing wilayah.

Dan memang Brazil, Pak Ketua dan Bapak/Ibu Anggota memang belum daerah *country* bebas PMK tetapi dengan pengalaman 50 tahun karena ini sama-sama berstatus saat ini tidak belum bebas dan saat ini kemarin dari pertemuan telah di-*declare* oleh mereka akhir 2023 akan menjadi *country based* eh *country free* PMK secara negara dan saat ini telah enam wilayah yang sudah bebas PMK tanpa vaksinasi.

KETUA RAPAT:

OIE, *you* percaya sama dia? *You* percaya sama negara Brazil? Enggak, saya tanya kalau enggak nanti saya, saya ada beberapa kasus ini.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Izin Pak Ketua yang saya sebutkan untuk wilayah bebas tanpa vaksinasi itu berdasarkan data dari OIE yang kami terima.

KETUA RAPAT:

Sekarang saya tanya misalnya daging dari sana, apa *you* lihat motongnya, masuk dari wilayah mana, zona mana? Ini loh pertanyaannya, maka saya juga bingung kalau *you* bilang *you* percaya sama Brazil, saya bingung.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Baik, kami lanjutkan Pak.

Dan saat ini memang hasil dari pada analisa kita untuk vaksin telah kita lakukan mulai dari serotipenya sampai dengan subtype yang ada dan sumber-sumber ini telah kita cek melalui OIE. Potensi-potensi untuk vaksin yang serupa dengan serotipe dan di Asia Tenggara ini yang bebas negara bebas PMK itu baru satu Filipina. Dan tentunya juga termasuk Australia, kita akan belajar bersama untuk tahu bagaimana pengendalian-pengendalian, sehingga kita beberapa, negara-negara yang memiliki pengalaman yang sama dan kasus yang sama kita akan *share knowledge* dan transfer *knowledge* bersama untuk penanggulangan PMK di tanah air.

Dan yang banyak tadi ditanyakan juga terkait dengan kemungkinan masuknya tentunya ini berbagai kemungkinan bisa terjadi baik itu hewan hidup yang masuk maupun produk-produk peternakan. Dan mohon izin beri kesempatan kami tim yang saat ini lagi bekerja untuk memastikan karena ini selain *evidence* lapangan juga *evidence* laboratorium atau *scientific* harus dibuktikan benar-benar agar kita bisa melakukan langkah-langkah terkait dengan penanggulangan di masa yang akan datang.

Saya kira itu tambahan dari kami, Pak Ketua.

Terima kasih.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya satu menit Pak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ya.

Terima kasih, Pimpinan.

Apa yang tadi disampaikan sama Pak Dirjen, normatif memang sudah dijalankan baik Pusat maupun Provinsi, tapi aplikasinya itu justru ini otonomi daerah ini Pak ya. Jadi secara normatif jalankan tapi tindakan di lapangan itu tidak dilaksanakan. Contoh kasus yang kemarin terjadi di Majalengka itu narik satu bakalan dari Grobogan langsung menularkan 6 ekor di tempat itu. Kalau itu dijalankan kan mestinya kan dicegah, ini kan antar Provinsi.

Kemudian yang kedua, apa yang tadi disampaikan itu Provinsi menyampaikannya kepada kepala dinas. Kalau dengan Muspida dengan apa APK, APD dipakai tapi pada saat petugas menangani yang sakit itu tanpa pakai apa-apa menyuntik begitu saja. Artinya apa? Ini dijalankan karena tidak punya uang mestinya surat itu disampaikan kepada kepala daerah supaya dinasnya minta uang begitu. Jadi karena tidak punya duit akhirnya semuanya lolos. Jadi mohon ini, ini otonomi daerah tidak akan kuat tidak akan mampu Pusat, Provinsi itu hanya hubungannya dengan dinas, hubungannya dengan pemerintah daerahnya sehingga anggaran yang ada anggaran, anggaran tak terduga bisa dimanfaatkan itu ya. Ini mohon untuk diperhatikan karena di lapangan tidak bisa dijalankan, tidak punya duit.

Itu saja, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya lanjutkan Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Terima kasih Pak.

Mohon izin Pak Menteri.

Pak Dirjen Tanaman Pangan silakan.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Terima kasih.

Izin Bapak Menteri, izin Pak Ketua.

Pak Ansi Lema, yang pertama terkait jagung lokal saran Pak Menteri dan tadi arahan Pak Ketua tidak hanya fokus untuk pakan, jadi untuk pangan sehingga siap, Pak melaksanakan penangkaran di NTT untuk jagung lokal itu.

KETUA RAPAT:

Ya gini loh Pak Wandu, kamu jangan pikirkan NTT. Jangan-jangan nanti yang untuk *food, import* lagi jagungnya. Kalau bisa seluruh Indonesia kamu kembangkan jagung yang seperti jagung apa pulen yang dari Gorontalo atau

jagung yang spesies dikembangkan saja di wilayah-wilayah kan ada BPTP. Kasih dia bibit, suruh dia perbanyak dibagikan. Jangan, jangan-jangan nanti *you* cuman mengejar *feed* nanti *food*-nya impor. Kan saya lihat, saya juga pernah beli bibit yang jagung warna ungu, ada yang jagung ketan, jagung apa begitu loh. Tinggal bagikan saja bibit unggul yang pertama kasih ke BPTP, BPTP-nya suruh mengembangkan, bagikan. Minimal begini loh, rakyat mau makan jagung, jagung yang enak enggak usah beli lah. Tadi mentang-mentang cuma Ansi saja ngomong, cuma Ansi, nanti Kiki ngomong, Kiki lagi yang lain enggak. Harus adil, jelas?

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Siap jelas, Pak.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Ketua sedikit saja, sedikit, sedikit.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Enggak walaupun saya dari Dapil NTT, poin saya itu bukan cuma sekedar NTT. NTT itu hanya contoh kasus tetapi poinnya adalah benih lokal dari seluruh Indonesia itu karena kata kuncinya kemandirian dan kedaulatan.

Terima kasih.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Jelas Pak Ketua, izin.

Yang berikutnya terkait dengan Bu Maria. Porang sekarang sudah 60 ribu hektar sebelumnya 19 ribu dan nanti data-data sentra termasuk hilirnya kami sampaikan tertulis.

Kemudian Pak Edward Tannur mengenai Sumba Tengah memang daerah kering tadah hujan, sumber air terbatas, sehingga kita mengoptimalkan air yang ada dan membangun sumur 23 unit hasil mekanisasi, hasilnya 5 ribu hektar yang ditanam padi dan jagung produktivitas naik, Bapak. Kemudian 2021 ini 10 ribu hektar padi dan jagung juga naik ada sekitar 4 ton per hektar posisi sekarang sampai hampir 5 ini ada peningkatan.

Izin Pak Menteri itu yang dapat saya sampaikan lainnya tertulis Bapak Ketua.

Terima kasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau kedelai enggak perlu Anda jawab?

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Oh ya siap, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pasti jawab pasti karangannya mengarang bebas nanti.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Oh ya siap Pak Ketua. Untuk kedelai..

KETUA RAPAT:

Sudah enggak perlu dijawab. Sudah enggak perlu dijawab, pasti Anda mengarang bebas.

Ya lanjutkan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Siap Pak. Izin Pak Menteri.

Pak, beberapa pertanyaan tentang taksi Alsintan, *Food Estate*, kami persilakan Pak Dirjen PSP.

Baik, Pak Dirjen Horti silakan tadi ada beberapa..

KETUA RAPAT:

Dirjen Horti masalah tadi impor cabai yang Pak Sutrisno katakan sama impor apalagi tadi. Ya dijawab.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Siap. Mohon izin Pak Menteri, Pak Ketua.

Jadi kami sampaikan terkait dengan importasi cabai memang ada importasi cabai tapi ini cabai kering, Pak Ketua. Jadi cabai kering untuk keperluan industri, jadi bukan cabai segar dalam hal ini dan yang banyak memang dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung itu adalah cabai segar. Jadi kita tidak mengimpor cabai segar tapi yang masuk adalah cabai kering untuk keperluan industri. Hanya saja perlu kami sampaikan sebelum adanya

Permenpan pengawasan memang banyak perusahaan-perusahaan yang memasukkan tanpa RIPH.

Mohon izin Pak Ketua. Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Berarti kalau tanpa RIPH menyelundup atau dikeluarkan SPI-nya oleh Kemendag?

DIRJEN HORTIKULTURA:

Begitu Pak, betul Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi yang bisa menangkap siapa?

DIRJEN HORTIKULTURA:

Setelah adanya Permenpan pengawasan kami konsolidasi di internal bersama badan..

KETUA RAPAT:

Jadi fungsi karantina apa?

DIRJEN HORTIKULTURA:

Ikut mengawasi dalam proses pengawasan RIPH tersebut.

KETUA RAPAT:

Kemudian tadi ada pertanyaan Mbak Kiki atau siapa tadi mengenai bawang merah kecil bagaimana?

DIRJEN HORTIKULTURA:

Bawang merah kecil mungkin dari Kepala Badan Karantina mungkin bisa menyampaikan terkait dengan bawang bombay ini. Kita sudah ada Kepmentan 105 yang tidak mengizinkan untuk memasukkan bawang bombay, istilahnya bawang bombay mini Pak. Bawang bombay yang ukurannya sama dengan bawang merah Pak.

KETUA RAPAT:

Coba dijawab Karantina, supaya jelas mumpung nyambung.

KEPALA BADAN KARANTINA:

Izin, Pak Menteri.

INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET):

Ya, interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Itu tadi yang tanya saya dari BPS data BPS itu saja.

KETUA RAPAT:

Ya.

KEPALA BADAN KARANTINA:

Izin, Pak Menteri.

Pak Ketua, kami sampaikan bahwa sekarang ini sedang diterbitkan untuk impor bawang merah yang termasuk yang kecil. Jadi setelah aturan semuanya sudah final nanti Badan Karantina mendapatkan tugas untuk ikut mengawal, tetapi saat ini ketika itu belum menjadi Tupoksi Karantina, Karantina masih membebaskan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Loh gimana? Yang bawang bombay kecil itu, itu nyelundup, SPI-nya pun enggak ada, saya yakin. Dan itu umumnya paling besar penyelundupan terjadi di mana? Di wilayah kerja Belawan. Ini untuk dievaluasi itu kepala karantina di sana ya. Nanti kalau enggak percaya kita buktikan, pemainnya juga teman-temannya Pak Wandu tuh, teman dia itu yang main itu ya, ya toh? Iya. Itu loh, bukannya Anda bilang "baru akan", tidak, ini sudah lama betul-betul sudah lama berlanjut ini. Bawang bombay kecil itu loh, ini kan menghancurkan petani bawang merah kita bagaimana bicara kalau saya tanam bawang tiba-tiba dihantam begitu yang kasihan wilayah mana? Wilayah Sumatera Utara, ya. Jadi kalau ada itu tangkap saja. Saya enggak mau bicara nanti besok, enggak ada. Kalau ada penyelundupan bawang bombay kecil, tangkap dan ini masih terjadi di Belawan, saya ingatkan ya.

Selanjutnya Sekjen.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terkait masalah cabai, Pak Dirjen Horti ya. Jadi kami berharap apa itu cabai apa namanya basah, cabai kering, itu bisa diproduksi oleh kita. Yang penting petani jangan hanya didorong memproduksi fasilitasi pasarnya ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyejahterakan petani manakala hanya cabai kering saja mesti impor ya. Wilayah saya pusat cabai sampai busuk-busuk kering di lahan. Tolong pertemukan siapa yang mau impor, bisa mengambil produk dalam negeri.

Saya kira itu, Pak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, lanjut Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Terima kasih Pak.

Izin Pak Menteri.

Terakhir Pak Dedi, silakan Prof. Dedi tadi ada pendanaan penyuluh.

KEPALA BPPSDMP:

Baik.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Menteri, mohon izin ya.

Pak Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV yang saya hormati,

INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

Sebelum Pak Dedi.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Tadi saya tanya tapi belum dijawab. Ini nanti Pak Dirjen Horti, Pak Sekjen yang kita tanya itu P2L tadi juga yang sudah pindah ke Horti itu mekanismenya kayak gimana, ini semua pada menunggu itu, itu yang belum dijawab-jawab begitu loh. Bagaimana *platform* yang mau ditarik seperti apa?, begitu.

KETUA RAPAT:

Kita enggak usah pusing, enggak usah ditanyakan, yang penting tidak boleh ada kurang satu pun itu masalah anggaran karena anggaran induknya dipindahkan, operasionalnya tidak. Sekjen sudah bicara dengan Dirjen bahwa itu urusan mereka, yang penting kita punya tidak boleh berkurang untuk ke masyarakat.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Mohon maaf Pimpinan, sampai detik ini belum jalan sama sekali. Ini sudah jalan, belum jalan.

KETUA RAPAT:

Sekjen betul belum jalan, Dirjen Horti belum jalan?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Ini Pak, mulai dibahas di Direktorat Jenderal Anggaran Pak, minggu ini baru dibahas, Bapak.

KETUA RAPAT:

Karantina waktu itu saya Sekjen ketemu saya, saya yang tanyakan tidak boleh ada kurang satu pun program ini. Sampai kemarin pun mungkin teman-teman sudah terima, saya suruh tulis tangan. Pak Slamet sudah terima kan? Tulis tangan pernyataan Sekjen untuk program tersebut. Ada Pak Sutrisno mau ngomong apa lagi?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Kan tadi Pak Ketua sampaikan para TA sudah berkomunikasi dengan para birokrasi, malah justru mereka memutuskan tidak bisa. Dirjennya ngomong begitu tapi di bawahnya bilang tidak bisa tetap sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan.

KETUA RAPAT:

Nah Dirjen jawab Horti sama Sekjen jawab. Jangan berbelit-belit ini masalah ini.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Izin, Pak Ketua.

Terkait dengan P2L memang sekarang sedang dibahas di Direktorat Jenderal Anggaran, Pak. Jadi proses revisinya lagi dibahas di Direktorat Jenderal Anggaran.

KETUA RAPAT:

Kapan selesainya? Di sini ini sudah bulan Juni.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Sesegera mungkin, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya enggak mau kata sesegera mungkin, saya mau ada jawaban konkret.

DIRJEN HORTIKULTURA:

Siap.

KETUA RAPAT:

Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Insy Allah minggu depan selesai, Bapak.

KETUA RAPAT:

Minggu depan selesai?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Ya.

KETUA RAPAT:

Ya. Tidak ada orang kurang satu pun seperti yang Anda tanda tangan?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Siap.

KETUA RAPAT:

Itu saja, ada lagi? SDM belum selesai. Lanjutkan.

KEPALA BPPSDMP:

Baik.

terima kasih.

Terkait dengan penyuluh, ada 68.521 penyuluh sebetulnya termasuk penyuluh swadaya. Namun demikian, yang mendapatkan BOP itu hanya penyuluh PNS, P3K dan penyuluh THL TBPP. BOP setiap tahun dan ada sedikit honor untuk THL yang berjumlah 2 ribu orang totalnya 212 miliar, Bapak. Untuk meningkatkan honor BOP, kita tingkatkan 100 ribu saja Pak itu hampir 50 miliar, jadi kalau untuk meningkatkan menurut saya wajarnya rata-rata 400 ribu menjadi 800 ribu berarti ada peningkatan rata-rata 400 ribu itu berarti perlu sekitar 200 miliar. Nah, sekarang 2022 saja, Pak di Pusat Penyuluhan Pertanian ya 1 Eselon II di Badan SDM anggarannya ya tinggal BOP penyuluhan. Kegiatan lain sudah lama di *refocusing*, Pak dan kegiatan lain juga sebetulnya tidak terlalu besar. Ada sekolah lapang kurang lebih 10 miliar, kemudian juga kelembagaan ekonomi petani kurang lebih 1,5 miliar. Kemudian ada juga untuk 2022 ini anggaran untuk biaya operasional BPP itu juga kurang lebih sekitar 2,5 miliar. Itu sekarang semuanya sudah di *refocusing*, yang belum di *refocusing* tinggal BOP itu. Jadi kalau untuk ditingkatkan BOP memang kelihatannya sampai saat ini alokasi anggarannya belum memungkinkan Pak, itu pertama terkait BOP.

Kemudian yang kedua terkait dengan pelatihan perubahan iklim, *climate change*. Nah, tentu saja ini kita lakukan secara terus-menerus, Pak. Kita punya dua kegiatan, pertama kegiatan secara virtual, Pak. Jadi dalam satu minggu kami lakukan pelatihan secara virtual itu 5 kali. Nah, di dalam salah satunya itu kita fokus kepada perubahan iklim ya. Bahkan, sebelum puasa kemarin, kami lakukan pelatihan sejuta petani dan penyuluh itu mengenai *climate change* ya, mengenai perubahan iklim. Nah, antara lain tentu kita sosialisasi *climate change* itu apa. Kemudian yang paling penting sebetulnya adalah aksi, adaptasi, dan aksi mitigasi yang bisa dilakukan secara langsung oleh penyuluh dan petani. Misalnya bagaimana caranya pemupukan berimbang yang baik dan benar itu adalah aksi mitigasi terhadap perubahan iklim sebenarnya yang luar biasa bisa dilakukan oleh petani sendiri tanpa menunggu program dari pemerintah. Kemudian yang kedua juga misalkan bagaimana caranya kita membuat kompos. Nah, ini juga salah satu aksi mitigasi kita yang kami latihkan kepada para penyuluh dan para petani ya.

Kegiatan yang kedua, kami juga ada beberapa kegiatan memang di beberapa tempat ya terkait dengan kegiatan *Climate Smart Agriculture*. Nah,

Climate Smart Agriculture itu kami latih teknologi-teknologi yang bisa memitigasi gas rumah kaca ya yang bisa mengurangi mitigasi gas rumah kaca. Ya, antara lain misalnya teknologi pengelolaan air ya *intermittent irrigation* misalnya seperti itu. Kemudian pemilihan varietas yang rendah emisi misalnya gunakan Ciherang emisinya enggak terlalu tinggi misalnya seperti itu begitu. Nah, jadi yang demikian, Pak yang kita lakukan Bimtek-bimtek baik kepada penyuluh maupun kepada petani.

Terima kasih.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pimpinan, Pak Kepala Badan mumpung ada Pak Menteri ini bahwa Komisi IV sudah mengagendakan akan menerima tanggal 5 itu dari Asosiasi Penyuluh yang oleh per Provinsi THL-nya sudah tidak lagi dipakai oleh Provinsi. Sedangkan mereka sudah sekian lama dan mereka ingin mendapat bantuan dorongan dari dewan. Nah, kembali lagi otonomi daerah, jadi seyogyanya ada bantuan atau langkah dari kementerian, mereka-mereka masih diperlukan enggak? Karena, permintaan Provinsi melepaskan begitu saja tenaga penyuluh kepada Kabupaten sehingga mereka terkatung-katung ya. Mohon dorongan ya dari kementerian kalau memang dan informasinya kan masih sangat kurang jadi nasib mereka tidak dilepas begitu saja itu. Kalau memang harus diterimakan Provinsi ada perintah ya toh mungkin dari DAU atau juga ada tambahan dari DAU nanti ke depannya. Itu yang menjadi persoalan. Tanggal 5 nanti akan hadir ke sini akan diterima oleh Komisi IV nasib THL Provinsi yang oleh Provinsi dengan ada aturan baru Eselon IV saja difungsikan sehingga mereka tidak lagi menjadi bagian dari pada THL Provinsi.

Itu saja, Pak Menteri, Pak Sekjen.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada lagi? Berarti nanti yang menerima Pak Sutrisno karena tanggal 5 tuh hari Minggu.

Tadi ada pertanyaan untuk ID Food silakan dijawab dulu.

DIRUT RNI (PERSERO)/HOLDING PANGAN ID FOOD:

Baik.

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk kita semuanya.

Terkait beberapa pertanyaan dari ID Food yang di catatan kami, pertama dari Bu Kiki terkait importasi daging sapi Brazil. Mohon maaf sedikit koreksi Bu

jadi yang kami impor daging sapi beku, bukan ekor seperti di situ, mohon maaf koreksi, terima kasih koreksinya. Dan terkait itu kami mengikuti aturan yang memang masih memperbolehkan importasi berdasarkan bebas PMK berdasarkan zonasi. Kalaupun nanti misalnya ada peraturan yang baru tentunya kami selaku BUMN ikut aturan yang baru Bu.

KETUA RAPAT:

Enggak saya tanya tadi impornya dari wilayah yang bebas PMK?

DIRUT RNI (PERSERO)/HOLDING PANGAN ID FOOD:

Ya betul Pak berdasarkan zonasi.

KETUA RAPAT:

You lihat potongnya? *You* lihat?

DIRUT RNI (PERSERO)/HOLDING PANGAN ID FOOD:

Enggak. Pak.

KETUA RAPAT:

You lihat misalnya yang bebasnya di Lampung ya kan, potongnya di Banten lihat enggak, enggak kan?

DIRUT RNI (PERSERO)/HOLDING PANGAN ID FOOD:

Enggak, yang kita pegang sertifikatnya.

KETUA RAPAT:

You baru tahu Brazil atau saya mau kasih tahu supaya jelas? Saran saya *stop* saja dulu wilayah masih PMK *stop* dulu untuk masuk daginglah, itu yang konkret. Dengan India bicara “oh wilayah bagian provinsi ini bebas, ini sudah masih”, siapa yang melihat siapa yang tahu, begitu loh. Kalau saran saya *stop* saja dulu.

Lanjutkan pertanyaan yang lain dijawab.

DIRUT RNI (PERSERO)/HOLDING PANGAN ID FOOD:

Baik.

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Saya lanjutkan tadi pertanyaan dari dr. Slamet tentang Program Makmur Pak. Jadi saat kita bicara Program Makmur ini adalah lanjutan dari program yang tadinya ada di Pak Nugroho dan sekarang pun masih ada yang dulunya

namanya Agro Solution. Jadi bukan baru tapi memang tahun lalu berubah nama menjadi Makmur. Dan di Makmur, yang kami sinergikan pun ada dua, pertama Makmur yang kelompok besarnya PIHC sekarang masih ada targetnya kalau enggak salah 250 ribu hektar ya Pak Nugroho ya dan kemudian yang disinergikan dengan kami, BUMN, Perhutani, Bulog ini hanya untuk tanaman yang memang secara reguler ini menjadi *core business* kami, Pak. Jadi Makmur yang kami sinergikan dengan PIHC, Bulog, Perhutani hanya fokus ke tanaman padi, jagung, tebu yang selama ini memang menjadi memang bisnis kita di tiga produk itu totalnya 180 hektar dengan padi 47.000 hektar. Kemudian jagung 20.000, tebu 112 ribu hektar yang hampir 100% memang lahan milik RNI dan PTPN.

Nah, kenapa kita harus melakukan ini, karena selama ini untuk mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan kita baik untuk KUR, Pupuk, Asuransi *offtaker* selama ini mereka lakukan sendiri-sendiri. Jadi dengan program ini kita membuat program *closed loop* ekosistem kita Bapak/Ibu. Dan kalau saat ditanyakan ada lembaga lain yang melakukan *closed loop*, saya pikir Pak semakin banyak yang buat *closed loop* semakin bagus buat kita karena Makmur ini kan hanya salah satu dari nama dari ekosistem dari program sendiri Pak. Di swasta pun ini sudah *common*, di beberapa BUMD juga sudah *common* Pak. Jadi ini kita hanya sebagian kecil dari total lahan yang bisa kita *cover* dengan program ini.

Kemudian realisasinya masih 49 ribu karena memang yang paling besar ada di tanaman tebu 112 ribu hektar. Ini baru musim tanamnya jatuh biasanya di semester 2 setelah musim giling musim panen tebu itu selesai. Jadi targetnya dari 180 ribu hektar ini, ini nanti akan terpenuhi di akhir tahun. Sedangkan di PIHC nanti Pak Nugroho mungkin bisa menambahkan. Mereka ada tambahan beberapa produk seperti hortikultura sawit mereka tapi masih menjalankan.

Kemudian pertanyaan berikutnya tentang *Replanting* di Laskar. Perlu kami jelaskan kami punya dua anak perusahaan yang bergerak di bidang sawit walaupun tidak besar yang lokasinya itu di Sumatera Selatan. Nah, *Replanting* yang kami sebutkan dalam laporan kami *Replanting* di salah satu anak perusahaan yang kurang lebih luasnya 500 hektar dan ini karena ada di lahan kami murni menggunakan anggaran kami Pak. Jadi ini memang karena dia anak perusahaan di lahan sendiri kita pakai anggaran kita sendiri Pak karena beberapa tempat cukup banyak tanaman yang sudah tua yang lebih dari 25 tahun.

Kemudian pertanyaan dari Dr. Hermanto, kenapa dalam laporan kita ini banyak sekali masalah importasi. Ya, memang Pak yang kami sampaikan itu kalau kita lihat semua memang untuk produk-produk yang kita secara ketercukupan ketersediaan pangannya masih defisit yang hampir sebagian besar itu memang penugasan yang kami terima untuk melakukan stabilisasi terutama di harga dan ketersediaan. Sedangkan untuk program bagaimana menuju kedaulatan pangan ini kita salah satunya tadi Makmur tadi Pak. Kemudian ada beberapa program misalnya saat lagi musim giling tebu, ini saya sudah kami jalankan tahun kedua jadi sejak tahun lalu kami bersama PTPN juga menjaga supaya harga pembelian gula petani ini tidak di bawah HPP yang

diberikan oleh pemerintah. Jadi tahun lalu kami beli minimum 10.500 dan kalau gagal lelang mereka kita yang beli dan tahun ini sesuai dengan aturan yang baru HPP gula ada di posisi 11.500 nah itu juga yang akan kami jalan tahun ini untuk menjaga kestabilan harga di tingkat petani.

Mungkin itu Bapak/Ibu yang dari pertanyaan yang kami terima. Nanti mungkin kalau ada yang kurang kami sampaikan tambahan secara tertulis.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya dilanjutkan PIHC.

WAKIL DIRUT PT PIHC:

Baik.

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang saya hormati Pak Ketua dan seluruh Pimpinan dari Komisi IV dan seluruh Anggota.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Menjawab beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Pupuk Indonesia yang pertama adalah ..

INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi, Pimpinan.

Maaf ya Pak Nugroho ya. Pertanyaan saya itu ID Food dan PI. Data di sini kan ada tanam ya betul ya? Oke. Data tanam ini *ter-listed* enggak di Kementerian Pertanian?

WAKIL DIRUT PT PIHC:

Kalau itu saya tidak tahu Bu karena memang ini program di ekosistem kita, Bu.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Betul. Saya izin Pimpinan ya maaf ya. Betul memang tidak tahu, saya juga bingung kalau dijawabnya enggak tahu. Masalahnya ekspektasinya harusnya Kementerian Pertanian itu *manage* semua luas yang ada baik itu dari swasta ataupun petani rakyat atau pun apa, kan begitu. Kalau Anda semua dalam satu ruangan ini tidak pernah menyinkronisasi data, sampai kapan pun enggak akan beres kita mengurus urusan begini. *Sorry*, Pimpinan ya.

Iya jadi maksudnya itu, ini yang sekarang saya melihat kan di sini ada tanam Pimpinan, tanam anggaph yang paling *core*-nya, *core*-nya itu adalah padi, tebu, jagung ya. Ini kan walaupun mungkin menurut Anda tadi kecil tapi ini kan ber-*impact*, Pimpinan maksudnya yang harusnya ini juga nanti hulunya pupuk ini juga berpengaruh. Jangan sampai maaf ngomong pupuk yang hilang ternyata dipakai sama RNI semua. Saya mohon maaf ini jadi *su'udzon* dong ya kan. Ini mohon maaf loh Pak iya. Kenapa, ini ternyata saya enggak tahu ini Pak Wandu ini harusnya urusan Bapak ini juga padinya ada enggak, terdaftar enggak itu.

Terima kasih, Pimpinan.

WAKIL DIRUT PT PIHC:

Izin, merespons ke Bu Kiki dulu.

Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Frans dari RNI karena Makmur ini adalah ekosistem di internal BUMN dan *Insha Allah* kami bisa pastikan bahwa yang ikut Program Makmur ini tidak menerima pupuk bersubsidi. Jadi ini menggunakan pupuk komersial. Mengenai urusan apakah luasan lahan seperti tahun ini di Pupuk Indonesia ditargetkan 250 ribu hektar itu bagian dari total itu semuanya, kami juga perlu, perlu cek lagi Bu.

Demikian, Bu.

Terima kasih.

INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi lagi Pimpinan, *sorry* ini.

Ini agak panjang ini ya gara-gara apa saya tidak bicara pupuk subsidi Pak, yang komersil saja susah didapat kok sekarang orang mau beli ya. Jadi aneh saya, ini yang saya bilang selalu ego, egonya Kementerian Pertanian, egonya BUMN kapan beresnya. Capek-capek kita rapat dari pagi sampai malam kalau kayak begini toh Anda juga enggak pernah mengobrol kok. Di sini ada OP, kita menghargai Anda punya keinginan untuk membuat ekosistem sendiri tapi kan harus ter-*report* Pak. Wajar saja kalau enggak Bulog kan ngapain capek-capek menunggu, dari RNI saja ambil orang dia menanam kok.

Ini saya mohon maaf Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi judulnya begini, judulnya jalan masing-masing, mimpi mimpinya masing-masing. Yang satu mimpinya mau jadi Presiden. Jadi kalau ke Lampung itu kalau saya hitung ke Lampung itu yang ditanam seratus hektar, sama ongkos pejabat yang datang mahal ongkos pejabat yang datang. Iya karena kalau sudah datangnya pakai *private* jet kalau dihitung, berapa ongkosnya, belum yang menyambutnya. *Wah* agen pupuk menyambut, PI

menyambut, ID Food menyambut, semuanya menyambut, yang ditanam cuman 50 hektar di dekat Bandara Lampung Selatan hanya itu *tok*, 2, 3 kali datang ya itu *tok* kalau untuk di Lampung. Jadi wajar kalau ditanyakan kenapa enggak *integrated*? Otomatis tadi dikatakan enggak pakai pupuk subsidi. Kita kan enggak tahu. Jangan-jangan bisa saja Program Makmur di petaninya dikasih pupuk gratis kan kita enggak tahu. CSR kepada pihak ketiga kan bisa saja. Itu saja saya enggak *su'udzon* saya ngomong apa adanya. Ini *loh* yang terjadi ya.

Wandi kamu jangan senyum-senyum, harusnya jadi Tupoksi Anda juga seperti yang Mbak Kiki katakan tadi. Bagaimana pun harus ada integrasi, ada pelaporan bahwa ini program saya *loh*. Ya kalau nanti masing-masing menteri punya program masing-masing mau jadi calon Presiden calon Wakil Presiden habis APBN nanti hanya untuk program kepentingan masing-masing saja. Untung Pak SYL enggak nyalon jadi Presiden apa Wakil Presiden. Kalau enggak juga bikin program sendiri dia itu ya.

Sebentar Pak Sutrisno. Bulog silakan tadi ada pertanyaan untuk Bulog.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Sebentar Pak Ketua sedikit saja terkait dengan ID Food tadi terkait dengan koordinasi, boleh Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Jadi waktu itu sudah dijanjikan, Pak. Saya sudah lama itu sebelum lebaran jadi sudah dimaafkan lebaran kemarin berarti tapi saya tagih lagi sekarang begitu, akan dikoordinasikan terkait dengan pertanyaan saya yang lahan ID Food sejauh mana koordinasinya dengan Kementan. Waktu itu enggak tahu Sekjen apa Dirjen yang menjawab mau dikoordinasikan. Saya sekarang menagih jawaban walaupun sudah dimaafkan lebaran lalu.

KETUA RAPAT:

Mau dikoordinasikan nanti 2024.

Ya, Pak Sutrisno sekalian habis ini Bulog yang jawab.

F-P (.....):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, Pak Sutrisno dulu.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Tadi saya menyampaikan masukan dari KPA, KPK, KPK. Banyak penyalahgunaan kebocoran dalam membangun lumbung pangan kita karena tidak transparan dan tidak terintegrasi itu. Ya ini nah oleh karena itu tadi dengan hortikultura mestinya perannya adalah ID Food bagaimana mendorong apa namanya pembuatan cabai kering ini perannya adalah ID Food. Jadi mengintegrasikan bagaimana program-program kegiatan yang di pertanian bisa diakses oleh apa namanya ID Food ya. Kesulitan kemarin pada persoalan masalah minyak goreng pada saat kebijakan Presiden karena kita tidak punya itu ya. Mestinya ID Food lah yang memang sebagai tangan-tangannya kementerian untuk mengembangkan itu bisa menyesuaikan dengan perusahaan swasta.

Saya kira itu, Pak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Suhardi Duka satu menit.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ya Pupuk. Tadi saya ada tanyakan harga pupuk subsidi kan tetap, Pak dengan jumlah tetap tapi harga bahan bakunya itu melonjak tinggi. Nah, apakah kemampuan Pupuk PT Pupuk masih bisa karena tingkat kerugiannya akan besar ya. Kapasitasnya Pupuk Indonesia masih bisa dan berapa tingkat kerugiannya kira-kira?

Terima kasih, Pak.

WAKIL DIRUT PT PIHC:

Izin menjawab, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya dijawab dulu Pupuk setelah itu Bulog.

WAKIL DIRUT PT PIHC:

Mengenai kemampuan Pak Suhardi Duka, kalau kita memproduksi untuk pupuk yang saat ini baik subsidi maupun non subsidi, harga bahan bakunya memang semua sama-sama naik tapi mengenai kemampuan produksi tentunya memang sangat tergantung dengan bagaimana kita bisa mengamankan pasokan dari bahan baku. Untuk itulah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri di awal atas apa fasilitasi beliau kemarin kami Pupuk Indonesia Grup melakukan perjanjian kerja sama lah atau MoU begitu untuk mendapatkan jaminan pasokan ini. Hal yang sama juga kita lakukan

untuk beberapa bahan baku yang lain termasuk potass yang saat ini kita impor. Kalau kemudian ditanyakan apakah ini kalau untuk pupuk non subsidi, harganya kan kita bisa sesuaikan. Nah, untuk yang non subsidi ini tentunya ini nanti kan kita di setiap akhir tahun anggaran akan dievaluasi HPP kita Pak ya. Jadi apakah itu nanti atas biaya yang sudah kita keluarkan akibat kenaikan harga bahan baku, ini nanti akan di-konsiderasi untuk bisa ditagihkan sebagai apa tambahan atas biaya subsidi kalau jumlah yang di ingin disalurkan akan tetap jumlahnya.

Demikian, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi jauh-jauh ke Wina cuman MoU saja? *Memorandum of Understanding*, nota kesepahaman, kalau enggak sepaham kita bubar begitu? Begitu kan? tadi yang Anda katakan MoU maka saya bilang..

WAKIL DIRUT PT PIHC:

Ya komitmen yang lain itu juga apa terkait dengan pasokan..

KETUA RAPAT:

Harus dijelaskan dong komitmennya kontrak misalnya lima tahun, harga fluktuatif atau harga tidak mengikat itu baru. Kalau MoU kan..

WAKIL DIRUT PT PIHC:

Salah.. mohon maaf Pak Ketua, salah satu poin yang ada di MOU itu adalah dalam waktu dekat itu adalah jaminan terkait dengan pasokannya.

KETUA RAPAT:

MoU loh.

WAKIL DIRUT PT PIHC:

Iya di dalam itu dan poin-poin yang ada di MoU.

KETUA RAPAT:

MoU itu kalau Bahasa Indonesianya apa?

WAKIL DIRUT PT PIHC:

Nota kesepahaman.

KETUA RAPAT:

Kalau dia enggak sepaham kan enggak jadi toh, hanya di atas kertas toh? Ya enggak? Kita ngomong harus jelas ini. Saya mau ke Bandung sama Pak Dedi berdua, tiba-tiba Pak Dedi ada cewek telepon katanya, “Ayo balik ke Purwakarta ke rumah ditungguin sama istrinya,” kan enggak jadi dia ke Bandung sama saya. Dia pulang ke Purwakarta beliau karena tadi istrinya telepon, ya toh. Itu namanya kesepahaman, betul kan? Ya, mungkin tingkat pengetahuan saya rendah sekali jadi saya enggak tahu.

Silakan Bulog.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ketua sedikit dulu. Saya minta jaminan dari Pupuk Indonesia ini.

KETUA RAPAT:

Ya jawab dulu jaminannya apa.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ya apakah Anda betul menjamin bahwa pupuk subsidi itu akan tersedia sampai dengan 2023 ini?

WAKIL DIRUT PT PIHC:

Kalau berdasarkan kontrak *Supply Demand Agreement*, ya kami harus memenuhi itu Pak Suhardi.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Terpenuhi?

WAKIL DIRUT PT PIHC:

Insya Allah Pak, Insya Allah. Pengamanan sampai di tahun 2022 bahan bakunya sudah tersedia Pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ya, nanti kita tuntutan kalau tidak terpenuhi.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Suhardi Duka ini kan tergantung kontraknya ini 19 koma sekian triliun. Ya, kalau Oktober habis ya habislah enggak ada lagi pupuk subsidi betul kan, betul kan? Nah, ya begitu. Sesuai kontraknya kalau kontraknya cuma 19,3 triliun duitnya habis di Oktober ya habis sudah stop berarti November Desember enggak ada lagi.

Ya Bulog silakan, jangan dipotong dulu supaya cepat selesai.

DIREKTUR KEUANGAN PERUM BULOG:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,

Tadi ada pertanyaan dari Pak Suhardi Duga terkait mengenai penugasan minyak goreng. Jadi sampai saat ini Bulog belum, belum mendapatkan penugasan untuk minyak goreng. Kami sampai hari kemarin menyalur, tahun ini menyalurkan minyak goreng kepada masyarakat sudah 8 ekuivalen 8,9..

KETUA RAPAT:

Minyak curah apa jelaskan, kemasan atau curah.

DIREKTUR KEUANGAN PERUM BULOG:

Ini campuran Pak kemasan sama curah. Yang curah tetap kita kemas pakai plastik sederhana demikian.

Kami melaksanakan dengan regulasi yang ada menggunakan mekanisme *business to business*, Pak. Jadi penugasan yang khusus minyak goreng belum, belum ada sampai saat ini.

Terima kasih, Pak.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya minta perlu dukungan ini Komisi IV kepada Bulog untuk bisa yang menangani subsidi 7,5 triliun itu 2022 untuk penanganan minyak goreng karena menurut saya kalau swasta yang diberikan itu tidak akan bisa menurunkan harga minyak goreng dan subsidi kita akan sia-sia. Dengan demikian kalau bukan BUMN seperti Bulog ini yang menangani, saya tidak, olehnya itu mungkin bisa kita berikan dukungan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi saya mungkin saya salah. Subsidi pupuk eh subsidi minyak goreng sudah dicabut yang curah, maka saat ini di pasaran harganya mencapai 20 ribu 20, 20 ribu itu pun susah didapat, betul ID Food?

DIRUT RNI (PERSERO)/HOLDING PANGAN ID FOOD:

Mohon maaf Pak, yang dicabut adalah subsidi dari produsen ke BPDPKS.

KETUA RAPAT:

Dari produsen ke BPDPKS, terus subsidinya?

DIRUT RNI (PERSERO)/HOLDING PANGAN ID FOOD:

Sedangkan HET-nya masih sama 14 ribu.

KETUA RAPAT:

Di pasar ada 14 ribu harganya?

DIRUT RNI (PERSERO)/HOLDING PANGAN ID FOOD:

Saat ini.

KETUA RAPAT:

Tolong tunjukkan saya.

DIRUT RNI (PERSERO)/HOLDING PANGAN ID FOOD:

Ya Pak. Ini saat ini kita lagi memang baru mulainya 1 Juni, Pak jadi memang kita diminta sekarang membuat aplikasi yang nanti bisa memastikan itu sampai ke konsumen 14 ribu, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya itu enggak mungkin lah, omong kosong lah. Jadi yang dicabut tadi dari, dari produsen ke BPDPKS, jadi tidak ada subsidi lagi?

DIRUT RNI (PERSERO)/HOLDING PANGAN ID FOOD:

Tidak ada, Pak.

KETUA RAPAT:

Kenapa?

DIRUT RNI (PERSERO)/HOLDING PANGAN ID FOOD:

Yang menanggung itu produsen sebagai kompensasinya jadi BMO DPO diberlakukan lagi Pak.

KETUA RAPAT:

Oh begitu, *you* salah jawab karena produsennya banyak yang belum dibayar selisih harga Rp4.000,- Bos.

DIRUT RNI (PERSERO)/HOLDING PANGAN ID FOOD:

Betul Pak, betul Pak.

KETUA RAPAT:

Jawab saja begitu belum bayar.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ini mengenai minyak goreng ini. karena terima kasih juga kemarin saya berkoordinasi dengan ID Food. Walaupun sungguh sangat luar biasa perjuangannya untuk mendapatkan minyak goreng di Provinsi Maluku, Maluku Utara apalagi dari Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Utara semua ini. Kalau seandainya 1 Juni itu masa berlaku saat eceran HET harga tinggi ecerannya itu 14 ribu kebetulan kita kemarin baru dari Sulawesi Tenggara di mana harga satu liternya itu hampir 25 ribu sampai 30 ribu karena..

KETUA RAPAT:

Mbak Alien ada perbedaan antara 1 liter sama 1 kilo loh harus jelas, 1 kilo atau 1 liter ya nol koma berapa.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ya pokoknya, ya pokoknya kalau liter dan kilogram itu mereka kemarin perbedaan hampir seribu lah. Intinya Ketua, minyak goreng yang diambil untuk didistribusikan ke Kabupaten dan per Provinsi ini dibebankan ke APBD dan APBD tersebut tidak sanggup untuk dibebankan..

KETUA RAPAT:

Dibebankan subsidi atau ongkos angkut?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ongkos angkut, ongkos angkut transportasinya. Bayangkan saja dari Sulawesi Tengah ke Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara misalkan anggaran untuk distribusi minyak goreng, Ketua, dibebankan hampir 5,4 miliar. Kalau tidak disiapkan oleh daerah tersebut bagaimana masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng tersebut. Mohon maaf saya pikir orang Indonesia mau 25 ribu *kek* 30 ribu *kek* namanya orang Indonesia pasti menggoreng tiap hari. Jadi mau tinggi mau rendah pasti dibeli tapi masalahnya adalah kesediaan minyak goreng tersebut.

Ini minyak goreng, Ketua, belum lagi gula, belum lagi terigu. Jadi ini masalah yang besar dan saya pikir ID Food sudah harus fokus kalau memang anggarannya harga tinggi harga eceran tertingginya 14 ribu apakah itu sampai di pasaran tradisional sampai harga segitu ataukah ada anggaran-anggaran tertentu lagi yang di-charge sehingga anggaran untuk satuan harga minyak goreng per liter maupun per kg itu sudah tahu berapa jumlahnya sehingga masyarakat enggak, enggak bingung lagi ini. Memang yang minyak goreng yang komersil ya yang sudah di ini memang banyak tapi kan tidak semua orang mampu juga beli. Ini yang harus kita tegaskan, Ketua.

Soal pupuk saya mau bertanya ke PIHC tadi sekali-sekali kita kan sudah dijelaskan data pupuk yang bersubsidi yang diminta itu sesuai Ratas ya kalau enggak salah Pak Menteri ya, itu kan kalau enggak salah permintaannya hampir 30, 32 ya 32 juta tapi yang terealisasi ternyata hanya 7 atau kalau enggak sampai berapa kalau enggak salah itu sampai 9 juta. Ini kan menjadi masalah. Sampaikan saja yang sebenar-benarnya.

Terus juga ternyata pupuk subsidi ini sering juga kemarin Pak Dirut sampaikan tidak digandeng-gandengkan dengan pupuk yang tidak bersubsidi tapi di pengecernya terjadi seperti itu, Pak. Kalau mau dapat pupuk subsidi harus beli apa kemarin ya Pak Tris ya pupuk non subsidi ya, harganya berapa begitu. Kalau enggak, enggak bisa dapat. Kemarin janji dari PIHC akan mengusut ini sampai ke beberapa lini, 4 lini ya sampai di distributor. Apakah ini sudah diberlakukan kah, apakah ini lagi tidak akan terjadi kah itu yang harus ada penegasannya sehingga tidak lagi terjadi masalah-masalah pupuk ini.

Kemarin, setahu saya seingat saya, Dirut PIHC menyampaikan bahwa *Insyah Allah* tidak akan terjadi lagi tapi baru-baru ini sempat lagi dilapor terjadi lagi itu, penyandingan penerimaan pupuk bersubsidi dengan non subsidi. Ketegasannya seperti apa? Kemarin katanya harus polisi tangkap dan itu disetujui kenapa kita enggak ini masih bisa terjadi lagi kenapa, kenapa, kenapa dan kenapa.

Ini yang menjadi pertanyaan, Ketua.

Terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya tambahkan sedikit, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ya begini kemarin di Banggar itu dua minggu yang lalu disepakati bahwa alokasi subsidi untuk minyak goreng itu 7,5 triliun, itu sudah. Nah, saya..

KETUA RAPAT:

7,5 triliun pakai uang APBN?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Uang APBN.

KETUA RAPAT:

Bukan BPDPKS?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Bukan BPDPKS.

KETUA RAPAT:

Untuk 2022? 2022 atau 2000

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Untuk 2022.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Olehnya itu, saya minta ini diselamatkan uang 7,5 triliun ini karena kalau tidak mempengaruhi harga di pasar, buat apa kita alokasikan subsidi 7,5 triliun ini dan kalau ini salah sasaran enggak ada gunanya juga. Olehnya itu, saya melihat bahwa Bulog punya jangkauan sampai ke tingkat daerah. Ya, dan tentu subsidi ini tidak perlu kita subsidikan di mall, kita subsidi di UMKM, pasar

tradisional dan kios-kios, saya kira ini yang tujuannya untuk subsidi. Nah, kalau kebijakannya pemerintah salah mengimplementasikan subsidi 7,5 triliun ini ya gagal lagi kita, itu yang saya maksud, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya terakhir ya.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pimpinan, terima kasih.

Apa yang tadi disampaikan ini kan salah satu akibat-akibat tidak difungsikannya Bulog nah itu, karena Bulog punya jaringan Bulog punya gudang jadi dia perlu nanti dari Sulawesi Selatan ke Tenggara ke apa namanya ke Tengah ini nanti tujuannya langsung masuk pada tujuan begitu. Jadi mohon dikembalikan fungsi Bulog karena sudah punya pengalaman sudah punya, punya jaringan.

Yang kedua, terkait dengan pupuk, Pak Ketua. Jadi saya pernah dapat informasi pabriknya itu walaupun uangnya disiapkan 32 juta tidak mampu untuk memproduksi apalagi NPK. Saat itu kalau enggak salah cuma 2 juta. Saya juga mohon untuk disampaikan ini jangan kemudian berandai-andai-andai terus ya, begitu pemerintah mengambil kebijakan ternyata pabriknya sendiri memang tidak sanggup untuk memproduksi. Saya kira itu intinya.

Yang terakhir, pupuk ini bagaimana mengatur antara kebutuhan non subsidi dengan dengan subsidi ini, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke Pak Sutrisno tadi ngomongnya Bulog difungsikan kembali seperti dahulu begitu kan, ya berarti Bapak mesti ngomong sama Michael Camdessus waktu itu dia di IMF. Diputuskan di IMF itu bahwa fungsi Bulog bla bla bla bla tidak begini tidak begini, itu namanya Michael Camdessus waktu berdiri begini di samping Presiden di foto. Jadi kalau berubah fungsi itu mesti ke IMF lagi nanti urusannya atau Presiden mengambil kebijakan yang baru itu saja ya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Dari dialog diskusi dan masukan Anggota Komisi IV, sebelum acara ini kita akhiri akan kami bacakan rancangan kesimpulan rapat kerja pada hari ini.

INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terkait dengan kesimpulan rapat. Kami tadi berdiskusi dan dari Fraksi PDI Perjuangan untuk menekankan kesimpulan hari ini untuk mengevaluasi terhadap RKA/RKP 2023 karena melihat tidak tersinkronisasinya data-data yang ada terkait dengan RKA dan RKP, itu yang pertama. Kedua, dan saya harap di forum rapat kerja ini karena diizinkan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat melalui voting ya saya rasa dari Fraksi PDI Perjuangan jelas untuk mengevaluasi kembali dan mungkin dari teman-teman dari Fraksi lain silakan tapi mungkin hari ini kesimpulannya cukup satu yaitu mengevaluasi kembali terhadap RKA dan RKP 2023.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Maksudnya mengevaluasi apa ini, apa yang mau dievaluasi?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Jadi begini Pimpinan, kita tidak bisa menerima dan tidak juga menolak begitu loh kondisinya. Karena apa? Dari anggaran-anggaran ini tadi dari awal kita rapat banyak hal yang perlu kita evaluasi kembali terkait 2023. Ini kan dari 2022 sudah kita kasih waktu untuk perbaikan dan lain-lain dan sampai sekarang masih muncul juga di 2023. Saya paham bahwa Pimpinan, terkait siklus tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat ini adalah hak yang mungkin harus kita sampaikan di forum yang terhormat ini agar tidak menerima dan tidak menolak tetapi meminta untuk mengevaluasi kembali RKA dan RKP yang diajukan oleh Kementerian Pertanian untuk 2023.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi dilihat dulu kesimpulannya. Kita hanya menerima penjelasan, hanya menerima penjelasan bukan menerima, menerima penjelasan sesuai dengan, ini kan masih indikatif. Menerima penjelasan *tok*, enggak ada yang lain.

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

izin.

Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Kiki juga arahan dari Pak Ketua, pendapat dari teman-teman penjelasan dari Eselon I bahwa Rencana Anggaran 2023 RKA dan RKP-nya itu betul kita terima tapi mohon..

KETUA RAPAT:

Menerima penjelasan bukan menerima

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Menerima penjelasan

KETUA RAPAT:

Mereka menjelaskan, kita terima penjelasannya

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Cuma jangan ada rincian lagi.

KETUA RAPAT:

Oh belum enggak ada. Ini masih pagu indikatif.

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Nah, maksud saya begini Pak, biar kita itu lancar untuk ke depan rincian ini apa yang disampaikan oleh teman-teman diwakili oleh masing-masing Kapoksi untuk bertemu dengan Eselon I, sehingga kita dalam rapat di komisi itu akan sinkron tapi kalau sana jalan kita enggak sependapat lagi akan panjang itu usulan saya.

KETUA RAPAT:

Ya, enggak apa-apa, kita tarik panjang saja.

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Ya, *monggo* saja kalau saya sih

KETUA RAPAT:

Biar dia nanti sampai waktunya batas diserahkan ke Badan Anggaran ya enggak selesai ya enggak apa-apa *kok* itu saja, ya *toh*.

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Iya, ya silakan Pak. Ini, ini usul saya.

KETUA RAPAT:

Jadi ini hanya menerima penjelasan.

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Menerima penjelasan.

KETUA RAPAT:

Sesuai dengan Kemenkeu dan Bappenas, bukan, menerima penjelasan

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Ini hanya satu kesimpulan?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya. Kalau yang bawah itu hanya minta data kemudian evaluasi penjelasan, PHLN dan lain-lain. Enggak ada yang, enggak ada yang rincian enggak ada sama sekali.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tadi kan ada Anggota yang minta misalnya di perkebunan apa, kemudian masalah PMK bagaimana hanya itu saja.

Ya, silakan Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi terkait dengan kalau anggaran, saya pikir kita akan menerima dari sisi pagunya.

KETUA RAPAT:

Hanya penjelasan, menerima penjelasan Pak Slamet. Bukan menerima, penjelasan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih, Pak Ketua.

Justru titiknya di penjelasan yang saya dasarnya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Yang berikutnya, kaitannya dengan lampiran-lampiran yang ada di sini. Contohnya kami tentang *Food Estate* itu sudah menjadi bahasan kami untuk kemudian ada evaluasi. Itu selalu kami sampaikan, tidak ada evaluasi yang sampai kepada kami, tahu-tahu muncul produk lagi satu.

Yang kedua, e-RDCK kalau kita komitmen dengan keputusan dari Panja Pupuk ya mungkin Pak Suhardi bisa mengingatkan saya kalau salah, harusnya e-RDCK tidak perlu lagi begitu Pak ya karena kita akan berdasarkan luas lahan yang tanamnya, tapi di sini muncul lagi Pak penjelasan dari masing-masing Dirjen terkait dengan, memang di Pak Menterinya tidak muncul tapi lampirannya di sini muncul. Nah, itu yang membuat saya khususnya juga merasa keberatan. Kalau pagunya kita tidak ada perbedaan karena memang seolah-olah itu *given* tapi uraian di dalamnya ini bagaimana cari cara me apa, cara merumuskan bahwa kita tidak setuju dengan isinya, artinya harus dievaluasi isinya tapi pagunya ada, *given* kita enggak bisa menolak.

KETUA RAPAT:

Ya begini Pak Slamet contohnya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ini contohnya kesimpulan rapat yang c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian agar per kegiatan *Food Estate* dievaluasi dan meminta agar anggaran fokus kepada bantuan pemerintah untuk petani diantaranya alat dan mesin pertanian, serta infrastruktur pertanian dan pupuk organik yang berkualitas. Betul kan? Jadi nanti itu kan nanti kita ada RDP. Setelah RDP kan Bapak sudah rincikan ya kalau kita enggak terima jangan terima, nanti baru ada Raker lagi untuk diputuskan karena kita masih ada dua kali.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya Alien dulu.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Menurut saya apa yang disampaikan yang lain itu ada benarnya tapi kita juga harus menerima penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian dan setelah itu kita akan RDP untuk membahas anggaran yang akan dibahas. Kalau kita tidak setuju, ya kita tidak setuju, dan saya yakin dan percaya penganggaran yang akan disampaikan ini sesuai data-data yang disampaikan walaupun tidak ada jelas dan sebagainya, nanti kita bahas di RDP per Eselon I-nya sehingga nanti dalam Raker setelah RDP untuk menjadi keputusan kita bersama.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Daniel?

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Ya, terima kasih Pak Ketua.

Apa masukan-masukan teman perlu dipertimbangkan termasuk seperti *Food Estate* sebenarnya apa yang diharapkan itu bukan sekedar dievaluasi tetapi memang di tidak dilanjutkan karena terlalu banyak masalah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi pengertian dievaluasi begini kan nanti akan dibahas pada RDP. Kalau di RDP kita enggak apa kan selesai urusannya, kan begitu kan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Fraksi Demokrat.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Kesimpulan Fraksi Partai Demokrat meminta dievaluasi Anggaran Kementan karena pertama pagunya terlalu kecil. Kita minta supaya pagunya dinaikkan. Iya, kok APBN naik dari 2.700 triliun menjadi 2.900 triliun harusnya kan 16 triliun kita ini kok menjadi 13,7 triliun. Olehnya itulah saya minta itu dievaluasi supaya naik. Jangan kita terima yang 13,3 koma tiga koma tiga 13,7 triliun.

Yang kedua adalah memang kami Kapoksi ini sepakat untuk kita *pending* itu yang namanya *Food Estate*. Kalau masih ada di dalam mungkin hanya belum bisa melanjutkan.

KETUA RAPAT:

Ini Pak Suhardi Duka coba, ya saya dulu saya dulu, saya dulu.

Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian agar kegiatan *Food Estate* dievaluasi dan meminta agar anggaran fokus kepada bantuan pemerintah untuk petani diantaranya alat dan mesin pertanian serta infrastruktur pertanian.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Sangat setuju dengan kesimpulan ini Pak Ketua, hanya saja yang penting kesimpulannya tidak mengikat kita.

KETUA RAPAT:

Ya sekarang begini, sekarang begini saja sudah stop dulu jangan debat, Ibu Ketua akan membacakan mana yang enggak cocok baru kita evaluasi.

Silakan, Bu Ketua.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Satu lagi Pimpinan. Enggak, mohon maaf ini, ini karena saya dari awal ini, coba dilihat deh di bahan paparan ini bukan hanya di PSP *Food Estate* ini hampir di semua Eselon I ada *kok*. Jadi kalau..

KETUA RAPAT:

Ya kan gampang tinggal ditambahin saja. Jadi jangan jangan didebatin lagi. PSP, hortikultura, perkebunan tidak ada lagi akan dievaluasi masalah *Food Estate*. Dalam RDP nanti baru kita bahas bahwa ini tidak ada ini tidak boleh. Lah iya benar.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Ketua, sedikit.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Mungkin saya coba ingin menangkap yang disampaikan teman-teman semua sebenarnya sama. Kalimat ini benar sih menerima di ujung bawahnya tuh dengan catatan dan catatannya tuh banyak sekali. Catatannya itu banyak sekali, begitu. Nah nanti..

KETUA RAPAT:

Jadi ini kan catatan yang teman-teman Anggota tadi menanyakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Ya catatannya tuh banyak sekali. Nah, yang kita terima dulu ya dengan catatan yang banyak sekali, nanti pada saat RDP nah itu baru kita ambil keputusan terkait dengan *budgeting* itu, itu yang yang saya pahami begitu. Jadi yang dikatakan Kakak Kiki Kapoksi, Pak Darori Kapoksi, Pak Slamet Kapoksi, dan juga Pak Suhardi Duka, itu di poin pertama itu ada, menerima penjelasan Kementerian Pertanian, di bagian bawah tuh dengan beberapa catatan. Itu, itu sebenarnya tuh poinnya di situ jadi..

KETUA RAPAT:

Pak Ansi

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Ya.

KETUA RAPAT:

Nah, saya jelaskan di sini. Setelah g naikin lagi. “Selanjutnya Komisi IV akan melakukan pembahasan lebih lanjut..”

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Yes.

KETUA RAPAT:

“bersama dengan Eselon I Kementerian Pertanian dalam Rapat Dengar Pendapat.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pas.

KETUA RAPAT:

Sesuai peraturan perundang-undangan.” Jelas ya?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Ya jadi..

KETUA RAPAT:

Kita akan membahas lagi, ini hanya menerima penjelasan. Jadi kalau yang pernah-pernik ini kita enggak masukan, nanti teman-teman Anggota, “tadi saya ngomong begitu kok enggak direspons?”

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Ketua, saya tambahkan sedikit ini soal logika saja. Ya, maksudnya sebelum kita mengkritisi kita harus terima dulu, kita ikat dulu ini loh ya penjelasan Kementan ya kita terima tapi kita sudah punya catatan, cuma ini masih kurang, banyak catatannya ini. Nah, nanti waktu RDP itu menurut saya sih.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Saya, sedikit saja. Semuanya bisa menerimanya ada sisi positifnya sebenarnya kan begitu Pak Menteri ya. Kalau kita tidak menerima di angka 13, begitu Pak Suhardi ya berarti kan kita kembali ke pagu yang tahun 2022 sekitar 16 triliun. Jadi tidak setuju yang 13 triliun balik ke 16 begitu ya. Jadi ini kan juga ada sisi positifnya juga kalau kemudian hari ini kita enggak terima, kita akan kembali ke pagu 16 begitu? Itu saja tambahannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Persoalannya Pak Slamet beda dengan kemarin Kementerian Kelautan. Mereka mengajukan anggaran tambahan. Menteri Pertanian tidak, tidak mengajukan anggaran tambahan.

Ya, sudah baca kesimpulan Bu Ketua, ini Bu Ketua membaca.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Sudah ya kita coba ya karena sebenarnya ini saya tadi ini mendengarkan, jadi diganti “tidak menerima” kan enggak mau, Bu Kiki kan mau “menerima” jadi “mendengarkan.” Mau? Mau “mendengarkan”, boleh mau enggak? Ya kan ganti “mendengarkan”.

Baik.

Bapak Ibu sekalian,

Saya bacakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, Pimpinan.

Mohon maaf ini kita kesimpulan keputusan rapat ini notulensi rapat dan ini dicatat semuanya. “Mendengarkan” itu bukan satu catatan untuk kesimpulan satu rapat kerja begitu. Kalau “mendengarkan”, begitu. Kalau semua orang di luar sana juga mendengarkan, harus “menerima.”

KETUA RAPAT:

Mbak Alien dilihat dulu.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu kita di sini. Tadi katanya “menerima” ada yang menolak, sekarang “mendengarkan” ada yang menolak.

F-P (.....):

Ketua.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Intinya kan kita menerima penjelasan dengan catatan.

KETUA RAPAT:

Harusnya menerima penjelasan, menerima *tok* enggak ada yang lain embel-embel lagi ya.

Sudah Bu Ketua bacakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Oke, saya bacakan ya Bapak/Ibu sekalian.

Dibalikin lagi “menerima”? Ya, kan di bawahnya ada, ada banyak.

Poin pertama,

Saya belum ngomong sama sekali, baru ngomong saja enggak boleh Ketua ini.

1. *Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 sebesar Rp13.725.351.356.000,- dengan beberapa catatan di antaranya:*

a.

Ini catatan yang tadi banyak dipertanyakan oleh Bapak/Ibu sekalian.

- a. *Eselon I Kementerian Pertanian dalam menyusun rencana program tahun 2023 harus realistis, terukur, dan bersifat masif, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi;*
- b. *Direktorat Jenderal Perkebunan agar mengembangkan komoditas perkebunan rakyat yang memiliki nilai tambah tinggi dan prospek pasar yang baik dan efektif;*
- c. *Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian agar kegiatan Food Estate..*

KETUA RAPAT:

Yang c diganti bukan hanya Dirjen, seluruh Eselon I. Seluruh Eselon I.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Oh iya seluruh ya.

Baik, c saya ulangi.

- c. *Seluruh Eselon I Kementerian Pertanian agar kegiatan Food Estate dievaluasi dan meminta agar anggaran fokus pada bantuan pemerintah untuk petani, diantaranya alat dan mesin pertanian, serta infrastruktur pertanian dan pupuk organik yang berkualitas.*

Ini masih di PSP semua, mau diubah atau enggak? “Untuk petani” begitu saja kali ya, titik. “Untuk petani” titik ya, ya.

d. Direktorat Jenderal Peternakan ..

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Ya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Yang c ini kata-kata yang bijaknya adalah “seluruh kegiatan *Food Estate* yang tersebar penganggarnya di Eselon I Kementerian Pertanian” itu yang lebih tepat. “Seluruh kegiatan *Food Estate* yang anggarannya tersebar.”

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Oke, sudah?

“Di Eselon I Kementerian Pertanian agar dievaluasi dan meminta dan”. “Meminta” ini kan jadi ini jadi pasif kan, “agar dievaluasi seluruh.”

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

“Agar dievaluasi.”

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

“Dan diminta” bukan “meminta” kan berarti jadi “diminta.”

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

“Agar dievaluasi dan fokus kepada bantuan..”

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Eggak usah pakai, enggak usah “meminta” ya dan fokus kepada anggaran, fokusnya hilangkan strip kedua. Dan fokus kepada bantuan pemerintah itu yang tadi.

c. Seluruh kegiatan Food Estate yang anggarannya tersebar di Eselon I Kementerian Pertanian agar dievaluasi dan fokus pada bantuan pemerintah untuk petani.

d. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memperhatikan ketersediaan daging, meningkatkan populasi

ternak, dan melakukan percepatan penanganan penyakit mulut dan kuku.

- e. Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan harus memperhatikan ketersediaan benih berkualitas serta alat dan mesin pertanian pasca panen.*
- f. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian agar kegiatan pengembangan wirausaha muda dijelaskan secara mendetail dan rinci.*
- g. Badan Karantina Pertanian melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit baik hewan maupun tumbuhan.*

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian Pertanian dalam rapat dengar pendapat sesuai peraturan perundang-undangan.

Para Anggota?

INTERUPSI F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Interupsi, Bu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Selama ini kan banyak kementerian mengajukan tambahan, boleh enggak Komisi IV merekomendasi agar karena banyak program yang belum terakomodir agar Kementerian Pertanian mengajukan tambahan anggaran 2023 sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana Ketua?

KETUA RAPAT:

Menterinya diam saja bagaimana.

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Ya makanya kita yang merekomendasi. Soal tidak setuju..

KETUA RAPAT:

Ngomong dulu dong sama kita, sama Anggota di sini semua, baru kita masukan nanti dalam kesimpulan rapat.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ketua.

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Ini kan rekomendasi kita, Pak, terbalik, tadinya biasanya kan menteri yang usul sekarang kita usul

KETUA RAPAT:

Kalau direkomendasikan, kalau dia enggak mau bagaimana?

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Ya sekarang kita rekomendasi, tanggapannya bagaimana setuju enggak silakan, *monggo* Pak Menteri.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ya, saya juga sepakat dengan Pak Darori tadi hanya saja saya ingin ingatkan Pak Ketua dan kita semua Pak Menteri, bahwa Undang-Undang Nomor 2 sudah tidak berlaku lagi tahun 2020 yang selama ini kita dewan kurang, kurang percaya diri sekarang kembali percaya diri karena dengan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 itu.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi ini setuju, Pemerintah?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

Itu di poin, di poin yang PMK tadi di ya itu, ini “dan melakukan percepatan penanganan penyakit mulut dan kuku”, saya berharap vaksin dan juga disinfektan itu ya uangnya itu disediakanlah intinya. Cari dari mana, marilah kita duduk bersama-sama.

KETUA RAPAT:

Oke, Pemerintah setuju atas ini poin 1?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Tapi masukin dulu ke kesimpulan ini Ketua yang d, kan kalau penanganan penyakit mulut dan kuku ini bukan hanya disinfektan, enggak usah.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Eggak usah itu percepatan sudah selesai itu.

MENTERI PERTANIAN RI:

Pimpinan, iya.

Yang pertama usul Kementan itu 19 April ada ini Pak nanti saya bagikan. Untuk tambahan anggaran di atas 2 triliun Bapak dan belum direspon jadi..

KETUA RAPAT:

Tapi kan yang tahu cuma Pak Menteri sama Tuhan, kita kan enggak tahu.

MENTERI PERTANIAN RI:

Ya kan ini masih berproses Bapak. Kita harap kemarin..

KETUA RAPAT:

Ya harusnya kan paling enggak kan kasih tahu ke kami dong untuk kami masukan dalam kesimpulan kan begitu. Ini kan yang salah kan Sekjen sebetulnya. Seharusnya Sekjennya kan memberikan ke kami dulu suratnya.

MENTERI PERTANIAN RI:

Pimpinan, izin.

Ini belum direspon, oleh karena itu kesimpulan saya setuju walaupun saya memberi *reasoning* bahwa tanggal 19 April pun kami sudah bersurat untuk kedua kali untuk tambahan anggaran di atas 2 triliun, ada rinciannya Bapak, itu yang pertama.

Yang kedua..

INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET):

Interupsi, Ketua.

Maksudnya Pak Menteri itu kan tidak setuju kalau kemudian kita menerima kesimpulan rapat hari ini, harusnya begitu kan karena kita ingin anggarannya tidak disebut 13 triliun begitu.

KETUA RAPAT:

Karena yang memutuskan bukan kita anggaran, keuangan dan Bappenas. Kalau mau meminta tambahan, kasih kami catatannya tapi tidak ada istilahnya apa pecah-pecahnya saya enggak mau, hanya gelondongan dulu, kita bicara gelondongan dulu sesuai dengan kesepakatan berapa yang diminta.

MENTERI PERTANIAN RI:

Siap.

Jadi saya setuju dengan kesimpulan yang ditambah itu.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan, Pimpinan.

Sebelum diketok Pimpinan ya, boleh ya jangan cemberut dong senyum sedikit ya boleh ya oke. Boleh enggak ini?

Oh, ya jadi begini saja Pak Menteri kami tetap dengan sikap awal berarti tolong evaluasi itu semua loh ya. Kalau sampai tidak ditindaklanjuti Pak Sekjen secara serius ini sudah kode keras loh bahwa di RDP belum tentu nanti bisa lewat juga ya, bukan berarti kita mau bantu menambah atau apa teman-teman ini terus seenaknya begitu.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pemerintah setuju?

MENTERI PERTANIAN RI:

Poin ini setuju.

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Poin 2.

2. *Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data/laporan, antara lain mengenai:*
 - a. *Evaluasi kegiatan pengembangan Food Estate;*
 - b. *Rincian mengenai Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023; dan*
 - c. *Sebaran dan penerima KUR di seluruh Indonesia Tahun 2021-2022.*

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar laporan dan data tersebut diserahkan kepada Komisi IV DPR RI sebelum rapat dengar pendapat yang akan datang.

Para Anggota?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Disebut waktunya saja Bu, rapat yang akan datang sekalian supaya definitif.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Kita rapat hari Selasa kalau tidak salah *eh*, kapan Pak, Pak Thomy, Selasa. Sebelum Hari Selasa berarti.

F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Bu Ketua, itu “dan”-nya itu kok kebanyakan mestinya enggak usah ada dan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Ya “sebaran penerima” ya.

F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Bukan yang yang b kan sudah ada a b c jadi enggak perlu “dan”. Nah.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik para Anggota? *Eh* tanggalnya mana ini. Rapat Dengar Pendapat Hari Selasa tanggal berapa itu 6, 7, 5, 6, 7 ya tanggal 7.

KETUA RAPAT:

Sekarang begini saja enggak usah masukan tanggal. Pak Kasdi datanya siap enggak?

DIRJEN PERKEBUNAN:

Siap, Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, biasa kan saya memberikan apresiasi apabila bahan rapat oleh Kementerian Pertanian Nomor 1, Jumat pun diantar, jadi besok Jumat diantar ke rumah masing-masing Anggota ya. Komitmen kalau enggak saya batalin RDP-nya loh ya.

Oke pemerintah setuju?

MENTERI PERTANIAN RI:

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Poin 3.

3. Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk mengevaluasi importasi daging sapi dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku.

Para Anggota?

KETUA RAPAT:

“Sapi/kerbau.”

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

Saya cuman tanya setiap tahun kayaknya kita selalu bahas tentang importasi dari negara yang bebas PMK, tapi selama ini juga India termasuk salah satu negara yang belum bebas PMK dagingnya

KETUA RAPAT:

Perlu saya jawab enggak Mbak Alien? Enggak, perlu saya jawab enggak?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Enggak juga enggak apa-apa sih.

KETUA RAPAT:

Oh ya sudah enggak usah saya jawab. Nanti kalau saya jawab nanti ada yang enggak enak, ada yang enggak nyaman oke. Paham?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Paham.

KETUA RAPAT:

Yang memutuskan ini, ini temannya ini.

Jadi nilainya berapa yang mau dicantumkan di sini? Sekjen berapa yang diajukan gelondongannya?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

2 triliun, Bapak tambahannya ya, ya, 2 sampai 3 triliun Pak.

KETUA RAPAT:

Jangan 2 sampai 3 triliun, bagaimana. Yang diajukan berapa?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Kalau dengan surat ini 2 triliun Bapak.

KETUA RAPAT:

Ya salah sendiri orang mintanya 7 triliun, nanti dikasihnya 3,5.

INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET):

Interupsi Pak, interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Jadi saya pikir memang penting untuk memasukkan itu, cuma sebelum diakhiri tadi kan enggak yakin, Pak. Dari awal 2 dikasih ruang 2 sampai 3. Jadi supaya belanjanya jelas gelondongannya juga mungkin Pak Menteri bisa tunjukkan pada kami. Pada prinsipnya jangankan 3, Pak ini mengajukan juga belum tentu dapat, makanya tadi dari awal saya pertanyaan saya kan coba berapa sih muncul angka kan 70 triliun. Nah, sekarang sampaikan sehingga secara formal memang gelondongannya dibutuhkan. Mengajukan mah mengajukan saja, Pak tanggung-tanggung 2 triliun, begitu ya. Jadi pastikan jangan 2 sampai 3 di situ kesimpulannya bingung Pak Sekjen.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Katanya Pak Slamet suratnya cuman 2 triliun.

MENTERI PERTANIAN RI:

Ya yang saya baca 2 triliun ini, tidak semudah yang kita pikirkan di penetapan anggaran itu Bapak, maafkan saya. Artinya.. tidak, tidak Bapak jadi..

KETUA RAPAT:

Itu, itu ilmu dari LHK itu.

MENTERI PERTANIAN RI:

Ini tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya bahkan bilang begini Pak, kalau perlu cetak uang kalau untuk pertanian pasti dia kembali dengan cepat. Nah, maafkan saya, saya, saya ini menjelaskan yang seperti itu maksudnya bahwa kami sudah berusaha dan itu yang kemungkinan ruang yang mereka bukakan sehingga hadir surat ini, tetapi saya setuju kalau ini masuk kesimpulan berapapun yang kita taruh di situ itu yang kita usulkan kembali bahwa sesuai, kan selalu saya memakai alasan rapat kita. Dengan rapat ini Bapak, saya setengah mati karena kebutuhan kita itu segitu besar.

KETUA RAPAT:

Ya enggak bisa lah, Saudara Menteri. Orang bikin suratnya 2 triliun tiba-tiba kita minta 4 triliun, entar kita katanya ada apa-apa lagi.

Sudah nomor 3, Anggota sudah setuju? Pemerintah? Nomor 3 dulu tadi kan belum diketok.

MENTERI PERTANIAN RI:

Setuju, setuju.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

4. Komisi IV mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023 sebesar Rp2.000.000.000.000,-

Anggota? Pemerintah?

(RAPAT:SETUJU)

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Enggak ini bukan berarti RNI, Bulog sama siapa ini PIHC enggak masuk kesimpulan. Kita minta dong data sebaran yang tadi Makmur itu. Karena begini ya gara-gara Program Makmur itu ada yang enggak masuk Program Makmur itu jadi ribut di bawah. Jadi jangan bikin masalah di Dapil kita masing-masing begitu loh ya.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi nanti saya minta komitmennya tidak perlu masukan kesimpulan rapat, ID Food sama PI. Waktu RDP bahan tersebut sudah ada walaupun Anda tidak ikut tapi saya berharap nanti diundang saja supaya ikut ya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

Enggak ini menguatkan Kapoksi PDIP. Enggak, tapi kalau bisa Ketua memang data yang disampaikan tadi yang Makmur ini kita juga perlu tahu dan kalau bisa masukin kesimpulan sekarang biar nanti di RDP ada dasarnya kita juga.

KETUA RAPAT:

Saya rasa mereka komitmen lah hanya data saja *kok*. Kalau enggak komitmen ya kita usir itu saja.

INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET):

Interupsi, Pimpinan sedikit.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Jadi tampaknya pun tadi betul ya data-data daerah yang Makmur dan daerah yang tidak Makmur itu penting saya pikir supaya ini jelas.

Yang kedua, dari awal kita mendorong ini Pak Ketua, PMK ini sampai kita dorong menjadi bencana nasional sehingga anggarannya tidak disisir dari, tidak diambil dari dana Kementan. Nanti konsekuensi logis dari kesimpulan bahwa penanganan PMK dipercepat itu akan apa apakah nanti program PKH yang akan menggeser beberapa program yang terkait dengan rakyat kita, masyarakat kita atau ada konsekuensi yang harus dipertimbangkan mungkin perlu pergeseran-pergeseran dari internal dalam rangka penanganan PMK.

jadi itu mungkin catatannya yang apakah nanti di forum mana saya pikir perlu menjadi perhatian kita. Jangan sampai kesimpulan bahwa penanganan percepatan dana apa penanganan PMK mengambil program-program walaupun saya yakin Pak Ketua akan *keukeuh* kalau yang diambil adalah terkait dengan Program Dapil tapi kalau enggak ada uangnya juga repot perlu dicari solusi, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya dari awal sudah ngomong tiga kali baik sama Dirjen maupun Sekjen maupun Menteri tapi mereka enggak ada respon. Kan saya sudah bilang tadi, “ayo *refocusing* kita bahas pindahkan sisir 10, 10, 10, 10.” Kalau 10 Eselon I kan sudah 100 miliar ini sudah cukup untuk beli vaksin 3 juta tadi kan karena kurang lebih 110 miliar atau 120 miliar untuk beli vaksin dengan 3 juta dosis tapi enggak ada respons ya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Ketua.

Sedikit saja Pak Ketua, terakhir.

KETUA RAPAT:

Ya, satu menit.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Menteri,
Teman-teman semua.

Saya hanya mau menegaskan *spirit* dari rapat kita hari ini. *Spirit* dari rapat kita hari ini adalah banyak sekali catatan Pak dan evaluasi. Sebenarnya kalau saya dengar tadi Kapoksi-kapoksi pada ingin menolak sebenarnya, Pak tapi kemudian keputusannya adalah menerima penjelasan ini, itu berarti mohon pada saat RDP kita nanti program, RKL dan segala macamnya itu, itu tidak lari jauh dari *spirit* ataupun semangat yang kita bahas pada hari ini. Ini komitmen kita bersama, satu.

Yang kedua, Pak Menteri, Pak Menteri lihat Komisi IV itu betul-betul men-*support* Kementerian Pertanian. Buktinya Pak Menteri tidak menyebutkan ada surat untuk menambah 2 triliun, teman-teman memberikan usulan dan rekomendasinya. Tetapi saya ingin menegaskan juga anggaran mau ditambah sampai 10, 20 triliun kalau kemudian tidak tepat sasaran pun perencanaannya juga tidak tepat pun, tidak ada dampak kepada petani, peternak dan seterusnya juga tidak akan ada manfaatnya apa-apa begitu. Karena itu, kesimpulannya

adalah pada saat RDP nanti semoga *spirit* kita ini bisa bertemu dalam satu semangat, kira-kira seperti itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bahan RDP besok harus sudah di-*sidekick*, Anggota terima semuanya, paling lambat hari Sabtu karena kita harus membaca dulu untuk RDP hari Selasa.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sebelum kita menutup Rapat Kerja hari ini, kami persilakan Menteri Pertanian untuk menyampaikan kata penutup dalam rapat kerja hari ini.

Silakan singkat saja, Pak.

MENTERI PERTANIAN RI:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV,
Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Alhamdulillah, Raker hari ini sudah berjalan dan saya kira banyak sekali catatan-catatan yang kami harus sempurnakan termasuk beberapa yang harus kami penuhi dan *Insy Allah* kami juga titipkan dalam RDP mudah-mudahan penyempurnaan-penyempurnaan sudah dilakukan seperti apa yang pernah kita lewati yang lalu. Pada gilirannya penyempurnaan itu ada di RDP. Bahkan, untuk kedua kali RDP pun pernah kita jalani dan kita selesaikan juga.

Saya kira itu Pak Ketua.

Terima kasih.

Saya tidak berkomentar lagi selain bahwa kami kerja Pak, kami kerja *Insy Allah* seperti apa yang menjadi harapan dan kebutuhan yang kita coba lakukan. Kurang lebih terima kasih. Sekian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja kita pada hari ini.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, rapat kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.11 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002